

**POLITIK KEWARGANEGARAAN: PERJUANGAN
MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN AIR BERSIH DI
DESA PRANTI KABUPATEN REMBANG**

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:
Umi Kholifah
2006016099

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Kholifah
NIM : 2006016099
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Politik Kewarganegaraan: Perjuangan Masyarakat dalam Mendapatkan Air Bersih di Desa Pranti Kabupaten Rembang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2024

Pembimbing,



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

SKRIPSI
POLITIK KEWARGANEGARAAN: PERJUANGAN
MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN AIR BERSIH DI
DESA PRANTI KABUPATEN REMBANG

Disusun Oleh:

Umi Kholifah

2006016099

Telah dipertahan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 06 Mei 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

M. Nur Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

Penguji I


Moh. Yanin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 April 2024



Umi Kholifah

NIM. 2006016099

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Politik Kewarganegaraan: Perjuangan Masyarakat dalam Mendapatkan Air Bersih di Desa Pranti Kabupaten Rembang" dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mampu menghadapi kendala selama pengerjaan skripsi.

Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat islam. Tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Politik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian dalam skripsi ini mampu terealisasi sesuai dengan rencana dan tidak banyak hambatan yang bermakna tidak jauh dari dukungan dan kerjasama dari beberapa pihak terkait, maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah bertanggung jawab penuh selama penulis melaksanakan proses belajar di UIN Walisongo.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Wali Dosen dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongso Semarang yang telah mendidik dan membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Pemerintah Desa Pranti dan Masyarakat Desa Pranti yang telah bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta peneliti yaitu Bapak Istiyanto dan Ibu Sri yang selalu memberikan do'a, semangat, kasih sayang dan telah berjuang selama

ini. Semoga Allah SWT mengganti jerih payah Bapak dan Ibu dengan kesehatan, keselamatan dan keberkahan di dunia dan akhirat kelak.

7. Kedua saudaraku tercinta yaitu Mas Amin Supriyono dan Dek Ayuk yang menjadi salah satu penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak kepada kakakku tercinta Mas Amin yang senantiasa support dan memberikan semangat kepada penulis untuk tetap bertahan memberikan yang terbaik untuk keluarga.
8. Rekan-rekan kelas Ilmu Politik C yang telah menemani dan berjuang bersama-sama untuk menuntut ilmu semasa perkuliahan berlangsung.
9. Teman-teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan dan di perantauan, Ainnaya Dwi Agustina, Della Ayu Rukmana dan Lilis Setyowati yang menjadi saksi seluruh proses perjuangan penulis semasa kuliah dari awal mahasiswa baru sampai lulus dan menemani berproses bersama-sama sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis, Asyadad Mubarak dan Admid Alkhaira Aziz yang telah menemani kehidupan semasa kuliah dan senantiasa bersedia diminta bantuan ketika penulis merasa bingung terhadap laptop yang tiba-tiba aneh. Terimakasih sudah memberikan warna.
11. Sahabat penulis, Mba Osi, Nuning, Rosi, Mba Ijah, Mba Iska yang telah kebersamai, menyemangati, mewarnai kehidupan penulis, dan saksi perjuangan seorang gadis kabupaten yang berjiwa pantang menyerah ini.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik 2022, terima kasih telah menjadi wadah berkembang untuk penulis.
13. Rekan-rekan BPH DEMA FISIP 2023, Jidan, Key, Cindy, Elok, Rista yang telah kebersamai, memberikan semangat dan warna kehidupan bagi penulis.
14. Teman-teman grub serius, Ilham dan Mas Muha yang telah kebersamai dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.
15. Bank Indonesia, terima kasih telah memberikan dukungan financial selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
16. GenBI Korkom Semarang, terimakasih telah menjadi tempat bersinergi bersama dan memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
17. Rekan-rekan KKN MIT Posko 104, terima kasih telah menjadi keluarga yang senantiasa memberikan pelajaran dan keberaamaan kepada penulis.

18. Teman-teman kos Putri Bapak Shodikin, Mba Latifa, Ami, Ana, Mba Wirna yang telah kebersamai penulis selama beberapa tahun di perantauan.
19. Terima kasih semua drama korea dan playlist musik Dewa 19 dan Tulus, yang telah menemani dan tempat beristirahat sejenak selama proses penyusunan skripsi.
20. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.

Setelah menyelesaikan skripsi dengan banyak tantangan dan perjuangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang penulis lakukan kepada pihak terkait.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 26 April 2024



Umi Kholifah

NIM. 2006016099

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Bapak Istiyanto Ibu Sufi'ati (Alm) dan Ibu Sri yang telah senantiasa memberikan kasih sayang penuh cinta serta memperjuangkan segalanya untuk pendidikan saya, salah satunya dengan mendapatkan gelar sarjana.

Kepada Kakakku tersayang Mas Amin dan Adikku ngeselin Dek Ayuk yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

MOTTO

"Jangan biarkan penonton mempermainkan hidupmu"

-Umi-

"Allah selalu mewujudkan hal yang mustahil melalui cara yang lebih mustahil lagi. Jadi, tenanglah!"

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II KERANGKA TEORI..... | 23 |
| A. Deskripsi Kewarganegaraan dari Peran Politik Kewargaan dalam Perjuangan Masyarakat..... | 23 |
| B. Peran Negara dalam Pemenuhan Air Bersih..... | 28 |
| C. Politik Kewargaan sebagai Alat Perjuangan Masyarakat Desa Pranti Atas Air Bersih..... | 31 |
| 1. Kewargaan sebagai Keanggotaan | 34 |
| 2. Kewargaan sebagai Status Legal..... | 34 |
| 3. Kewargaan sebagai Hak..... | 35 |
| 4. Kewargaan sebagai Partisipasi..... | 37 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA PRANTI KABUPATEN REMBANG | 40 |
| 1. Sejarah Kabupaten Rembang | 40 |
| 2. Letak Geografis Kabupaten Rembang | 41 |
| 1. Sejarah Desa Pranti | 42 |
| 2. Visi dan Misi Desa Pranti..... | 42 |

| | |
|--|------------|
| 3. Kondisi Geografis | 44 |
| 4. Kondisi Pemerintahan Desa | 45 |
| BAB IV PERJUANGAN MASYARAKAT DESA PRANTI MENDAPATKAN AIR BERSIH | 58 |
| A. Kondisi Air Bersih Desa Pranti | 58 |
| 1. Sungai | 58 |
| 2. Embung | 60 |
| B. Bentuk Perjuangan Masyarakat dalam Memperoleh Air Bersih | 64 |
| 1. <i>Ngangsu</i> atau menimba air | 65 |
| 2. Pengelolaan air bersih sederhana | 67 |
| 3. Mengajukan proposal bantuan droping air bersih ke Pemerintah Kabupaten Rembang dan CSR (Corporate Social Responsibility). | 77 |
| 4. Membeli air bersih melalui perantara air (water broker) | 82 |
| BAB V DAMPAK PERJUANGAN HAK MENDAPATKAN AIR BERSIH | 93 |
| 1. Terpenuhinya kebutuhan air. | 93 |
| 2. Memudahkan akses pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga melalui sistem pengelolaan air bersih sederhana. | 96 |
| BAB IV PENUTUP | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 101 |
| LAMPIRAN..... | 105 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 110 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1. Batas Wilayah Kabupaten Rembang | 42 |
| Tabel 2. Batas Wilayah Desa Pranti | 45 |
| Tabel 3. Rincian Jumlah Penduduk Desa Pranti | 47 |
| Tabel 4. Prasarana Kesehatan Desa Pranti | 48 |
| Tabel 5. Prasarana Pendidikan Desa Pranti..... | 48 |
| Tabel 6. Prasarana Umum | 49 |
| Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pranti | 49 |
| Tabel 8. Sumber Daya Alam Desa Pranti..... | 53 |
| Tabel 9. Sumber Daya Manusia Desa Pranti..... | 53 |
| Tabel 10. Sumber Daya Sosial Budaya Desa Pranti | 56 |
| Tabel 11. Sumber Daya Ekonomi Desa Pranti | 57 |
| Tabel 12. Struktur Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum .. | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------------------------------------|
| Gambar 1. Dimensi - Dimensi Kewargaan | 33 |
| Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Rembang | 41 |
| Gambar 3. peta Wilayah Desa Pranti | 44 |
| Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Pranti | 47 |
| Gambar 5. Makanan Tradisional Dumbeg | 55 |
| Gambar 6. Sungai Desa Pranti di Musim Kemarau | 59 |
| Gambar 7. Sungai Desa pranti di Awal Musim Hujan | 60 |
| Gambar 8. Kondisi Embung RW 02 Desa Pranti di Awal Musim Hujan..... | 61 |
| Gambar 9. Kondisi Embung RW 01 Desa Pranti di Awal Musim Hujan..... | 61 |
| Gambar 10. Kondidi Rehabilitasi Embung Desa Pranti di Awal Musim Hujan | 62 |
| Gambar 11. Potret Ngangsu | 66 |
| Gambar 12. penampungan Air Bersih dari Embung Pranti Lor dan Pranti Kiduli | 69 |
| Gambar 13. Daftar Laporan Distribusi Air Bersih dalam Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Rembang Tahun 2013 | 79 |
| Gambar 14. Dropping Air Bersih ke Masyarakat..... | 81 |
| Gambar 15. Meteran PAB Milik Pak Budi | 84 |
| Gambar 16. Embung Pribadi Milik Pak Budi | 85 |
| Gambar 17. Penampungan Air Bersih PAB Milik Pak Budi..... | 89 |
| Gambar 18. Ilustrasi Pembelian Tangki Air Bersih..... | 90 |
| Gambar 19. SPAM Perdesaan Padat Karya Desa Pranti | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 20. Ilustrasi Instalasi Pengelolaan Air Sederhana (IPAS) | Error! Bookmark not defined. |

ABSTRAK

Perjuangan politik kewarganegaraan masyarakat dalam mendapatkan air bersih di Desa Pranti, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang menjadi isu menarik untuk dikaji. Masyarakat Desa Pranti dihadapkan oleh permasalahan kurangnya ketersediaan air bersih ketika musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sumber mata air di Desa Pranti sehingga sumber air baku masyarakat hanya berasal dari air sungai dan embung. Pemenuhan air bersih dari pemerintah ke masyarakat dalam bentuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat akibat tidak adanya sumber air baku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan berbagai bentuk ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pranti, bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapatkan air bersih, serta dampak perjuangan masyarakat terhadap pemenuhan air bersih.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Pranti Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori politik kewarganegaraan oleh Kristian Stokke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pranti mengalami ketimpangan hak, ketimpangan politik, dan ketimpangan sosial. Masyarakat berinisiatif pengelolaan air bersih sederhana dengan pembuatan bilik di pinggir bibir sungai yang dilakukan secara swadaya, menimbulkan adanya hak serta menarik keterlibatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak atas air. Adanya pemutusan akses air bersih secara sepihak oleh PAB milik Pak Budi yang dikarenakan adanya ketegangan politik. Kelangkaan air bersih akibat kurangnya ketersediaan air dan kurangnya bantuan air dari pemerintah. Bentuk perjuangan untuk mengatasi hal tersebut yaitu ngangsu atau menimba air, pengelolaan air bersih sederhana, mengajukan proposal bantuan dropping air, membeli air bersih melalui perantara air (water broker). Sedangkan dampak dari bentuk perjuangan tersebut yakni terpenuhinya kebutuhan air dan kemudahan akses pemenuhan air bersih melalui sistem pengelolaan air bersih sederhana.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Perjuangan Politik, dan Air Bersih

ABSTRACT

The civic political struggle of the community in getting clean water in Pranti Village, Sulang District, Rembang Regency is an interesting issue to study. The people of Pranti Village are faced with the problem of lack of clean water availability during the dry season. This is caused by the absence of springs in Pranti Village so that the community's raw water source only comes from river water and reservoirs. Fulfillment of clean water from the government to the community in the form of a Drinking Water Supply System (SPAM), in reality cannot meet the community's clean water needs due to the absence of raw water sources. Therefore, this research aims to describe the various forms of inequality felt by the people of Pranti Village, the forms of the community's struggle to get clean water, and the impact of the community's struggle on providing clean water.

This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique was carried out through interviews, observation and documentation methods carried out in Pranti Village, Sulang District, Rembang Regency. Meanwhile, the theory used in this research is the political theory of citizenship by Kristian Stokke. The results of this research show that the people of Pranti Village experience inequality of rights, political inequality and social inequality. The community took the initiative to manage simple clean water by building booths on the edge of the river which was carried out independently, creating rights and attracting government involvement to fulfill the need for water rights. There was a unilateral termination of access to clean water by Pak Budi's PAB due to political tensions. The scarcity of clean water is due to lack of water availability and lack of water assistance from the government. Forms of struggle to overcome this include collecting water, simple clean water management, submitting proposals for water drop assistance, buying clean water through water brokers. Meanwhile, the impact of this form of struggle is the fulfillment of water needs and easy access to clean water through a simple clean water management system.

Keywords: Citizenship, Political Struggle, and Clean Water

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengidentifikasi ketersediaan air bersih sebagai aspek penting dalam pembangunan terkhusus pelayanan publik. Air bersih mengacu pada jenis sumber daya tertentu yang berkualitas tinggi, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk sanitasi (Chaerunnissa, 2014). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan air domestik sebagai air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti minum, menyiapkan makanan, dan konsumsi umum. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua air cocok untuk digunakan sehari-hari, karena air yang terkontaminasi merupakan ancaman besar bagi kesehatan manusia. Indikasi sanitasi yang tidak memadai antara lain pencemaran air, menipisnya sumber air alami, dan sumur tercemar limbah industri.

Air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam dan lingkungan hidup serta merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Air juga merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan penting bagi kesejahteraan semua orang. Kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa air. Komite Hak Ekonomi dan Sosial dalam pernyataannya mengenai hak atas air menyoroti tiga aspek penting dari hak atas air yang harus diwujudkan suatu negara, yaitu: a) ketersediaan, b) kualitas, c) kemudahan penggunaan. Pencapaian (*accessibility*), meliputi aksesibilitas fisik (*physical accesibility*), keterjangkauan (*affordability* atau *economic access*), non-diskriminasi, dan aksesibilitas informasi (*information access*) (Wattimena J. A., 2021). Hal inilah yang menjadi kebutuhan mendasar akan air bagi umat manusia, sehingga melalui Konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992, tanggal 22 Maret setiap tahunnya ditetapkan sebagai “Hari Air Sedunia”. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2017), 2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Sekitar seperempat penduduk kekurangan air minum yang cukup. Pada tahun 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa sebanyak 2,2 miliar orang, Sekitar seperempat penduduk dunia kekurangan air minum bersih. Sementara itu, Laporan Prakiraan Penyediaan Air Bersih Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pasokan air per kapita Indonesia diperkirakan sebesar 181.498 meter kubik per tahun pada tahun 2035, menurun dari 265.420 meter kubik pada tahun 2010 meter kubik per kapita per tahun (Isnur, 2023).

Sebagai upaya penanganan ketersediaan air bersih, agenda pembangunan dunia yang memiliki tujuan mencapai kesejahteraan manusia secara global yakni Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan pembangunan

berkelanjutan. Dilansir dari laman Kumparan.com menyebutkan bahwa SDGs menerapkan konsep pembangunan yang inklusif dan komprehensif sebagai proyek untuk meratakan pembangunan global. Salah satu tujuannya pada poin keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak atau clean water and sanitation. Melalui akses air bersih dan sanitasi layak United Nations Development Goals (UNDP) meyakini bahwa salah satu upaya tersebut mampu memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian secara perlahan melalui pembangunan berkelanjutan.

Krisis air bersih nampaknya tidak hanya terjadi di negara Indonesia namun juga terjadi di negara-negara lain. Sebagian di negara lain seperti ada negara di Timur Tengah dan Afrika Utara telah dihadapkan bukan hanya krisis air bersih namun kekurangan air bersih yang parah. Krisis air bersih tentu menjadi isu lintas negara karena hampir setiap negara mengalami bencana krisis air bersih. Mengutip laman berita yang di rilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS pada 17 Januari 2024 menyebutkan bahwa statistik tahun 2022 mencatat, Indonesia mengalami sebanyak 3.544 bencana alam dimana 98 persen bersifat hidrometrologi. Dari bencana alam tadi sebanyak 3.183 nyawa terenggut dan sejumlah 18 juta orang akan terdampak selama satu decade terakhir. Disebutkan juga bahwa di dunia, proyeksi penurunan curah hujan 1-4 persen di 2020-2034 akan menyebabkan kekeringan dan konflik alokasi air.

Berdasarkan buku yang berjudul Krisis Air Bersih di Indonesia Fenomena, Dampak & Solusi karya A zyyati Ridha Alfian, SKM., MKM (Azyyati Ridha Alfian, 2023) menyebutkan tiga permasalahan air bersih di Indonesia antara lain: pertama, akses untuk memperoleh air bersih. Beberapa daerah yang dikategorikan pedalaman bisa dikatakan sarana dan prasarannya belum merata. Seperti jalur transportasi di daerah perdesaan yang belum aspal atau masih berupa tanah dan krikil, serta keadaan kontur jalanan perbukitan. Membuat akses penyaluran air bersih sulit menjangkau karena kendaraan yang terbatas. Kedua, Penyebaran air bersih yang tidak merata. Sebagian masyarakat Indonesia telah menggunakan air PDAM, namun nyatanya layanan air bersih PDAM belum bisa menjangkau seluruh daerah dan menyebabkan masyarakat menggunakan air dari sumur galian. Permasalahannya adalah masyarakat tidak banyak mengetahui kelayakan gunanya, sehingga menambah daftar permasalahan air bersih. Ketiga, Sumber air yang kotor akibat sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia masih dikategorikan belum baik. Seperti, masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah, belum mengetahui cara mendaur ulang sampah, dan masih di temukannya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di aliran air sungai maupun sumber mata air lainnya.

Air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia. Sehingga, krisis air bersih dapat dikatakan tanggungjawab bersama bukan hanya tugas perseorangan ataupun salah satu pihak. Dimana antara pemerintah dengan masyarakat perlu saling bersinergi dan bertindak untuk mengupayakan kelestarian sumber mata air bersih, menjaga lingkungan agar tetap lestari, serta mengetahui dan paham terkait penggunaan air bersih dengan bijak. Namun, perlu kita ketahui bersama juga bahwa negara menjamin hak rakyat atas air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pemenuhan hak air bersih merupakan tugas pemerintah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; “Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air”.

Mengenai penelitian yang relevan atas realisasi hak atas air bersih, telah dilakukan peneliti sebelumnya dan dibahas dari sudut pandang sosiologis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Josina Auguesthina Yvonnr Wattimena (2021), hasil yang ditemukan oleh Eko Wiji Purwanto (2020) fokus pada kajian realisasi hak atas air bersih yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Mewujudkan hak atas air bersih dan sehat merupakan wujud tanggung jawab Negara sebagai pengemban kewajiban berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Hak Air Nasional tahun 1945; “Bumi, air dan sumber daya alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga pasal ini secara tegas melarang penguasaan sumber daya alam di tangan perseorangan atau pihak-pihak (Wattimena J. A., 2021). Air bersih dapat dicapai melalui pendekatan mandiri atau berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang air minum (Purwanto, 2020).

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tujuan menyediakan air bersih bagi masyarakat yang selalu membutuhkan air bersih. Selain mendirikan PDAM, pemerintah juga melaksanakan PAMSIMAS, sebuah program bantuan berbasis masyarakat yang menyediakan proyek air bersih, air minum dan sanitasi. Namun penyediaan air melalui jaringan PAMSIMAS dan PDAM dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat karena sering terjadi kendala pada distribusi air, kualitas air, dan produksi air (Haris Adi Nugroho, Madvan Sinatriya, 2022).

Sepanjang musim kemarau beberapa wilayah di Indonesia masih terjadi kekurangan ketersediaan air bersih atau terdampak kekeringan salah satunya Kabupaten Rembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang tahun 2020 terdapat 67 Desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang terdampak kekeringan. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 25 Desa dari 9 Kecamatan terdampak. Namun, tahun 2023 tercatat sebanyak 85 Desa di 14 Kecamatan terdampak kekeringan. Rentetan peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Rembang. Penelitian ini hanya berfokus pada satu Desa di salah satu Kecamatan yang terdampak yakni pada Desa Pranti Kecamatan Sulang.

Pemilihan objek penelitian di Desa Pranti Kabupaten Rembang bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari arsip kantor BPBD Kabupaten Rembang, sebanyak 306 KK terdampak kekeringan di Desa Pranti. Disusul tahun 2021 sebanyak 315 KK dan tahun 2023 sebanyak 328 KK terdampak kekeringan. Maka dapat disimpulkan bahwa kekeringan yang melanda di desa Pranti belum menemukan titik terang dikarenakan semakin tambah tahun jumlah KK yang terdampak kekeringan tidak mengalami penurunan. Oleh karenanya penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Pranti untuk dikaji lebih dalam mengenai perjuangan masyarakat Desa Pranti untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara terkait air bersih, serta mengetahui tindakan pemerintah baik di tingkat Desa maupun Daerah dan dampaknya.

Masyarakat Desa Pranti mengalami kesulitan akses air bersih pada tahun ini terhitung sejak bulan Juli tahun 2023. Sebelumnya masyarakat desa Pranti mendapatkan akses air bersih melalui embung air dengan tarif Rp.3.000/kubik dari desa Landoh yang merupakan milik perorangan mantan kepala Desa Bogorame dengan cara sistem tadah di beberapa titik untuk kemudian disalurkan ke rumah warga Desa Pranti. Namun, ketika kontestasi politik terdapat kabar berita bahwa masyarakat yang ia bantu akses airnya tidak memilih calon yang beliau dukung dalam pemilihan kepala desa Pranti tahun 2019. Sehingga mantan kepala desa tersebut memutuskan akses air bersih masyarakat Desa Pranti yang mengambil air dari embung air beliau di Desa Landoh. Menariknya, ada beberapa masyarakat di desa pranti yang mendapatkan akses air bersih dari embung mantan kepala desa tersebut melalui cara kulo nuwun ke rumah pribadi mantan kepala desa tersebut untuk dapat akses air bersih dari embung miliknya secara pribadi dan dipatok tarif Rp.5.000/kubik. Menurut keterangan salah satu masyarakat Desa Pranti, embung air mantan kepala desa pranti tersebut tidak pernah mengalami kekeringan sehingga akses air bersih kebutuhan rumah tangga masyarakat desa pranti dapat terpenuhi. Kini Pemerintah Desa Pranti membuat SPAM Perdesaan Padat Karya dari tahun anggaran 2021 bersama masyarakat yang bersifat swadaya dan mengambil air yang bersumber dari aliran sungai yang melewati sepanjang desa Pranti.

Pembuatan SPAM Perdesaan Padat Karya milik Desa Pranti tersebut belum menjadi solusi dari akses air bersih oleh masyarakat. Sebab ketika musim kemarau tiba air yang berada di sungai mengalami kekeringan dan di sekitar beberapa wilayah desa tidak ada titik sumber mata air. Akibatnya masyarakat Desa Pranti mengalami kekurangan air bersih di musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Air bersih yang diperoleh masyarakat dari SPAM Perdesaan Padat Karya hanya digunakan untuk keperluan mencuci, mandi, dan minum ternak. Sedangkan keperluan memasak dan minum masyarakat Desa Pranti membeli galon atau air bersih Gunung Kajar yang dijual pick up yang keliling desa setiap beberapa hari sekali. Namun, kenyataannya ketika musim kemarau tiba Desa Pranti termasuk golongan desa yang terkena bencana kekeringan ekstrem sehingga memerlukan setidaknya 4-6 mobil bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Rembang per harinya.

Oleh karena itu, program SPAM pedesaan padat karya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, juga dikaitkan dengan perjuangan masyarakat melalui kebijakan hak-hak sipil sehingga menjadikan kajian ini menarik bagi penulis. Tindakan masyarakat dalam konteks politik untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara guna memenuhi kebutuhan air bersih, serta peran pemerintah dalam memenuhi hak warga negara di tengah permasalahan kekeringan yang terjadi di desa Pranti menjadi fokus kajian dari penulis. Penulis akan mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk perjuangan masyarakat serta menganalisis dampak bantuan pemenuhan air bersih dari pemerintah ke masyarakat.

Program SPAM pedesaan padat karya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih juga dikaitkan dengan perjuangan masyarakat melalui kebijakan hak-hak sipil sehingga menjadikan kajian ini menarik bagi penulis. Topik perjuangan masyarakat perlu dikaji karena memiliki makna penting dalam bidang politik khususnya politik kewarganegaraan tentang bagaimana bentuk-bentuk perjuangan masyarakat dalam mendapatkan air dan kesetaraan hak warga negara dengan pemerintah. Setelah diketahui bentuk-bentuk perjuangannya dapat dianalisis kembali apa saja dampak pemenuhan air bersih dari pemerintah ke masyarakat. Disisi lain, adanya kajian tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam bentuk partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjuangan masyarakat Desa Peranti Kabupaten Rembang mendapatkan akses air bersih?
2. Apa dampak pemenuhan air bersih dari pemerintah ke masyarakat Desa Pranti Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diketahui rumusan masalah dalam penelitian kita perlu mengetahui tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui permasalahan air bersih yang di hadapi oleh masyarakat Desa Peranti Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui tindakan masyarakat Desa Peranti Kabupaten Rembang dalam mendapatkan air bersih.
3. Mengetahui dampak pemenuhan air bersih dari pemerintah ke masyarakat Desa Pranti Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah di uraikan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang Ilmu Politik terkhusus terkait politik kewarganegaraan air.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak tindakan masyarakat dalam upaya akses air bersih.
2. Manfaat Praktis:
 - a) Setelah meengetahui permasalahan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat Desa Peranti Kabupaten Rembang peneliti berharap pemerintah daerah setempat dapat membuat regulasi tindakan pencegahan maupun penanggulangan ketersediaan air bersih di wilayah penelitian maupun sekitarnya.
 - b) Menambah wawasan penulis terkait permasalahan politik kewarganegaraan air khususnya perjuangan masyarakat Desa Peranti dalam mendapatkan akses air bersih terutama pada musim kemarau tiba.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan mengambil tema politik kewarganegaraan bukan merupakan studi yang baru karena ada banyak peneliti yang telah mengkaji fenomena tersebut. Namun sebelum melakukan kajian penelitian, penulis menggali informasi dari penelitian terdahulu dalam bentuk tinjauan pustaka yang sesuai dengan tema yang diajukan penulis, yakni perjuangan masyarakat. Tujuan meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi perspektif penelitian yang berbeda sehingga penulis dapat menempatkan temuan penelitian yang akan dikaji. Topik politik kewarganegaraan dalam perjuangan masyarakat belum banyak dikaji oleh para sarjana sebelumnya. Sehingga berikut penulis menyajikan dalam dua tema yakni pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kebijakan pemenuhan air bersih.

1. Pemenuhan hak-hak kewarganegaraan

Hak dan kewajiban merupakan unsur penting dan harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks kewarganegaraan, hak dan kewajiban merupakan nilai inti warga negara yang esensial dalam membentuk masyarakat madani. Mayoritas masyarakat telah memahami hak dan tanggung jawab kewarganegaraan akan tetapi dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang beragam menyebabkan terlupakannya apa yang menjadi hak dan kewajiban. Hal tersebut dilihat dari studi yang berjudul "Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil" oleh Fahdian Rahmandani dan Samsuri (2019). Pendidikan sebagai sosialisasi diperlukan untuk menyeimbangkan hak dan tanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, seluruh hak dan tanggung jawab dapat ditanamkan pada seluruh warga negara, sehingga menciptakan warga negara inovatif yang dapat membuat perbedaan. Jenis komponen hak dan kewajiban ada empat yaitu hukum, sosial, politik, dan partisipatif (Fahdian Rahmandani, 2019).

Perwujudan hak atas air bersih dan sehat mempunyai dimensi yang sangat luas, tidak hanya dimensi kesehatan saja, namun juga dimensi lingkungan hidup yang pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Studi pemenuhan hak air bersih dilakukan oleh Josina Auguethina Yvonnr Wattimena (2021) tentang "Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat". Oleh karena itu, peraturan untuk melindungi hak atas air bersih dan sehat telah diperkenalkan, diadopsi dan diratifikasi dalam bentuk "kontrak hukum" dan dalam arti "hukum lunak"

melalui berbagai undang-undang hukum domestik masing-masing negara dimana salah satu pesertanya yaitu Indonesia. Di sisi lain, melindungi hak atas air bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Negara-negara peserta yang telah meratifikasinya harus memberikan solusi efektif untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Wattimena J. A., 2021).

Penelitian ini memiliki 2 titik fokus konsep penelitian, yakni politik kewarganegaraan dan perjuangan masyarakat. Pada perjuangan masyarakat contohnya perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat yang dikaji Nia Ramdhaniaty (2018) berjudul "Perempuan Adat Non-elit, Eksklusi Berlapis, dan Perjuangan Hak Kewarganegaraan atas Hutan Adat Studi Kasus du Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten". Peneliti menemukan hasil kesepakatan menyatukan pemahaman dengan membentuk sebuah komunitas sebagai wadah perjuangannya dari tahapan konsolidasi yang dilakukan oleh KSPPM. Hasil penelitian tersebut memiliki makna bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan sebuah strategi untuk mempermudah perjuangan (Ramdhaniaty, 2018). Berikutnya industri pabrik semen di Pegunungan Kenting dan gerakan sosial masyarakat adat Samin yang memperjuangkan keadilan lingkungan dikaji oleh Johann Christian Philippas (2023) dengan judul "Spiritualitas Politik Sebagai Dasar Perjuangan Masyarakat Adat Samin Melawan Ekonomi Kapitalisme Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo Pati". Gerakan tersebut di pelopori oleh masyarakat adat Samin yang tidak dapat di pisahkan dari dimensi spiritualitas masyarakatnya. Kegiatan keseharian mereka sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka melahirkan kesadaran politik-ekonomi bersamaan dengan epistemologi lokal dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat adat Samin. Kesadaran tersebut membentuk tindakan solidaritas masyarakat adat Samin untuk membangun jejaring berjuang bersama melawan pabrik semen sebagai upaya melestarikan lingkungan (Filipus, 2023).

Berdasarkan beberapa contoh perjuangan masyarakat diatas, dapat di ketahui bahwa kewarganegaraan dibentuk dan diimplikasikan oleh serangkaian gerakan melawan ketidakadilan; sebuah gerakan yang melibatkan serangkaian perjuangan oleh masyarakat kelas menengah dan bawah, organisasi perwakilan dan aktivisnya untuk sebagai bentuk representasi politik, pengakuan

kultural, dan keadilan ekonomi serta masyarakat. Perjuangan tersebut umumnya menghasilkan integrasi ke dalam negara melalui proses non-diskursif dan diskursif. Membangun ikatan solidaritas antar faksiperjuangan sangatlah penting, namun upaya yang dilakukan sejauh ini belum cukup besar untuk masuk dalam kategori yang diharapkan (Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018). Bentuk dan fragmentasi gerakan sosial tersebut mencerminkan keragaman ketidakadilan dan posisi aktor sosial, sekaligus dipengaruhi oleh dinamika politik.

2. Kebijakan pemenuhan air bersih

Penyediaan akses air bersih atau air minum merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan konkuren. Melalui kajian dengan judul "Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19" oleh Eko Wiji Purwanto (2020) Penyediaan air bersih dicapai melalui dua pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan berbasis masyarakat (mandiri) dan yang lainnya adalah pendekatan terorganisir melalui badan usaha milik daerah di sektor air minum (BUMD). Pendekatan independen berbasis masyarakat mendorong masyarakat untuk memainkan peran penting dalam menyediakan air bersih, dari hulu hingga hilir, mulai dari pengambilan air primer hingga distribusi ke rumah tangga. Pendekatan ini biasanya diterapkan di daerah pedesaan dimana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sulit dijangkau. Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis institusi. Pendekatan ini memungkinkan akses terhadap layanan air melalui perusahaan lokal di sektor air minum (BUMD). Pemerintah daerah membentuk BUMD air minum sebagai badan yang menyediakan akses terhadap air minum berupa perumd atau perusahaan air minum yang operasionalnya masih terbatas pada wilayah ibukota kabupaten/kota atau perkotaan (Purwanto, 2020).

Salah satu elemen pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketersediaan air bersih. Seperti kajian dari Chika Chaerunnissa (2014) tentang "Partisipasi Masyarakat daam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung)". Akses terhadap air bersih dan sanitasi masih sulit di daerah pedesaan, sehingga mendorong dilaksanakannya program PAMSIMAS. Peran masyarakat dalam upaya pelaksanaan program sangat penting di sini.

Contoh pendekatan berbasis masyarakat yang mandiri adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa Legok dan Tambakserang. Bentuk partisipasinya misalnya berupa sumbangan pemikiran nyata seperti usulan, saran, dan kritik, namun dalam pelaksanaannya berupa tenaga, uang, dan peran stakeholder diperlukan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menyumbangkan gagasan (Chaerunnissa, 2014) .

Menurut kajian yang berjudul "Akses Air Bersih di Indonesia" yang dikaji oleh Ni Made Sukartini dan Samsubar Saleh (2016) akses pada air tidak hanya mencakup kuantitas; dalam arti tersedia dalam jumlah yang mencukupi, akan tetapi dalam hal kualitas air yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan penurunan tingkat morbiditas. Dalam konteks kewarganegaraan melibatkan kesediaan dan kemampuan masyarakatnya untuk bertanggung jawab atas urusan politik pemerintahannya. Jadi, disini peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk jalannya pembangunan dan realisasi program penyediaan akses air bersih (Saleh, 2016).

Metode penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilihat dari salah satu kajian seperti yang berjudul "Peran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa" oleh Paendong Joan Lolawang (2022). Cara penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bentuk perjuangan dapat dilihat dari luas lingkup partisipasi. Kemudian kita lihat komunikasi seperti apa yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat, apakah ada hubungan dua arah yang memberikan ruang lebih besar bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas (Lolawang, 2022). Kemudian kajian Naofal Bayu Saputra Dewa, Sulton dan Ambiro Puji Asmaroin (2020) tentang "Perjuangan Kaum Disabilitas dalam Mendapatkan Identitas Kewargaan" Menunjukkan bahwa upaya strategis untuk memenuhi tuntutan kewarganegaraan dapat dicapai melalui jarak atau melalui keterlibatan langsung dalam proses kekuasaan melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Meskipun Indonesia mempunyai pemerintahan yang tampak demokratis, namun isi pemerintahannya jauh dari apa yang diharapkan, karena masih banyak kelompok marginal dalam masyarakat. Kewarganegaraan di sini diartikan sebagai perjuangan melawan relasi kekuasaan politik,

ekonomi, dan budaya yang menindas, mengucilkan, dan mendiskriminasi kelompok tertentu (Dewa, 2020).

Pengembangan kebijakan pemerintah merupakan langkah penting dalam menentukan solusi dan alternatif yang berbeda dalam proses yang dinamis. Seperti studi yang berjudul "Formulasi Kebijakan Pembangunan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas" oleh Chamid Sutikno, Shadu Satwika Wijaya, dan Andi Zaelani (2020). Upaya yang dilakukan pemerintah desa Dermaji untuk membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan. Penentuan alternatif dan opsi pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder dan berbagai unsur, serta hasil musyawarah untuk penentuan alternatif kebijakan pembangunan desa melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memberikan aspirasi yang dimuat dalam rancangan rod map pembangunan Desa Dermaji (Chamid Sutikno, 2020).

Berbagai hasil penemuan studi penelitian yang dilakukan para sarjana sebelumnya penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan topik penelitian yang diteliti oleh penulis. Dari temuan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia memahami pentingnya hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, namun karena berbagai aktivitas masyarakat, mereka melupakan hak dan tanggung jawabnya. Karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar seperti hak atas air bersih, maka perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikannya secara efektif sebagai sebuah tanggung jawab. Perjuangan masyarakat merupakan salah satu contoh upaya pemerintah yang belum dilaksanakan secara efektif di beberapa bidang. Padahal, ketersediaan air bersih merupakan salah satu unsur pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik.

Kajian-kajian penelitian di atas memiliki persamaan dengan penulis, khususnya terkait hak kewarganegaraan dan perjuangan masyarakat. Namun yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menempatkan perjuangan masyarakat dalam konteks politik dimana dalam akses air bersih masyarakat terdapat temuan adanya campur tangan unsur politik calon kepala Desa Pranti yang tidak terpilih. Meskipun demikian pemerintah Desa Pranti kini bersama masyarakat membuat jalan alternatif untuk masyarakat dapat mengakses air bersih yang berasal dari sungai dengan cara pembuatan SPAM Perdesaan Padat Karya yang dibentuk dari anggaran tahun 2021. Akan tetapi, pembuatan

SPAM Perdesaan Padat Karya tersebut bukanlah akhir dari solusi permasalahan akses air bersih di Desa Pranti, karena ketika musim kemarau tiba masyarakat kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat adanya kekeringan yang melanda desa tersebut.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis perjuangan masyarakat terhadap isu-isu yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan itu segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat 2). Kata kewarganegaraan dalam Bahasa Latin yaitu *civicus*, kemudian di serap dalam Bahasa Inggris *civic* yang bermakna warga negara atau kewarganegaraan. Warga negara diartikan sebagai warga, anggota (member) dari suatu negara. Sedangkan secara estimologi, warga negara merupakan anggota dari sekelompok manusia yang hidup ataupun tinggal di wilayah hukum tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban (Ristek Dikti, 2016).

Aristoteles memiliki kontribusi penting dalam pemikiran tentang kewarganegaraan dan politik. Dalam karyanya "Politics", Aristoteles (384-322 BC) membahas konsep kewarganegaraan (atau "citizenship" dalam bahasa Inggris) sebagai bagian integral dari struktur politik suatu negara. Bagi Aristoteles, kewarganegaraan tidak hanya berarti memiliki status formal sebagai warga negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam urusan publik dan pemerintahan negara. Aristoteles menekankan bahwa kewarganegaraan sejati tidak hanya bergantung pada status hukum semata, tetapi juga pada partisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Baginya, warga negara adalah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik, memegang jabatan publik, dan secara aktif berkontribusi untuk kepentingan bersama (Nurvenayanti, 2016) (Azra, 2003).

Menurut Gunsteren (1998) mendefinisikan pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan dalam tiga aspek: 1) mempunyai hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; 2) Warga negara memiliki akses terhadap pengadilan yang dikelola bersama untuk mengajukan perkara berdasarkan aturan yang berlaku sama bagi

warga negara di semua tingkatan. 3) Kondisi sosial ekonomi minimal terjamin. Dari ketiga aspek yang disebutkan Marshall, kita dapat menyimpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan suatu gerakan pembebasan dalam ranah politik, sosial-ekonomi, dan hukum sebagaimana konsep negara demokrasi, konsep negara kesejahteraan, dan supremasi hukum (Abdul Aziz Wahab, 2011).

2. Peran Negara dalam Pemenuhan Air Bersih

Pemerintah atau negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak warga negaranya. Seperti Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kelangkaan air dan terbatasnya ketersediaan air bersih menjadi masalah yang cukup serius bagi kelangsungan hidup manusia. Air sendiri menjadi bagian unsur penyusun tubuh sekitar 70% di dalam tubuh manusia sehingga kebutuhan akan air bersih sangat penting. Secara garis besar persoalan yang timbul akibat kurangnya ketersediaan dan akses air bersih akan menimbulkan masalah seperti masalah kesehatan akibat kurangnya asupan air atau kualitas air bersih yang tidak mumpuni, terganggunya aktivitas pertanian dan peternakan, dan terganggunya beberapa aktivitas kehidupan manusia dalam keberlangsungan hidup.

Persoalan akses dan pengelolaan sumber daya air lintas batas sering kali menjadi sumber ketegangan antar negara. Konflik antara Arab-Israel pada tahun 1967 adalah salah satu contoh paling terkenal dari bagaimana masalah air dapat menjadi pemicu konflik. Sumber daya air merupakan aspek vital bagi kehidupan manusia dan ekonomi. Ketika sumber daya air tersebut tersebar di wilayah yang melintasi batas negara, kemungkinan konflik meningkat karena setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Upaya-upaya diplomasi, perjanjian internasional, dan kerja sama regional dapat menjadi solusi untuk mencegah konflik yang berkaitan dengan sumber daya air lintas batas. Namun, tantangan-tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks seringkali membuat penyelesaian masalah ini menjadi sulit. Penting bagi komunitas internasional untuk terus memperhatikan dan mengatasi ketegangan yang muncul dari masalah sumber daya air lintas batas, karena konflik semacam itu dapat memiliki dampak yang sangat

merugikan bagi kedamaian dan stabilitas global. Akses universal atas air merupakan persoalan secara global dan menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia sebagai upaya pemenuhan hak atas air sebagai hak asasi manusia. Kebutuhan paling mendasarnya adalah akses terhadap air yang bersih dan aman. Karena air tidak hanya dibutuhkan untuk minum namun juga untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, kebutuhan higienis dasar serta mendukung terpenuhinya hak atas kesehatan untuk mencegah penyakit (Kasim, 2015).

Pendekatan yang diusulkan oleh Helmi Kasim (2015), yaitu menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas air, sesuai dengan paradigma hak asasi manusia yang telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Paradigma tersebut diadopsi dalam UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28I ayat (4) yang mengatur tentang tanggung jawab negara utamanya pemerintah dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Pemenuhan hak atas air tidak hanya mencakup akses fisik terhadap air yang bersih dan layak, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga ketersediaan, keberlanjutan, dan kualitas air, serta melindungi sumber daya air dari kerusakan dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap hak asasi manusia. Ini termasuk kebijakan, regulasi, dan program-program yang mendukung akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta upaya untuk melindungi dan menjaga sumber daya air secara berkelanjutan. (Kasim, 2015).

3. Politik Kewargaan

Dalam negara demokratis, hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik dan sipil, biasanya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara. Namun, implementasi hak-hak ini tergantung pada political will atau kemauan politik dari penguasa atau pemerintah untuk melaksanakannya. Penegakan hak-hak sipil dan politik memang membutuhkan komitmen dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hukum dan politik yang mendukung perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut. Hal ini termasuk

pembuatan undang-undang yang memadai, institusi yang efektif untuk menegakkan hukum, serta kebijakan publik yang mempromosikan partisipasi politik dan kebebasan sipil (Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005).

Kewarganegaraan dibentuk melalui beberapa rangkaian gerakan melawan ketidakadilan. Gagasan terkait konsep kewargaan memberikan tawaran sebuah basis konseptual untuk mengkaji perjuangan-perjuangan tersebut melalui cara yang lebih menyeluruh sebagai politik kewargaan (Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018). Kewarganegaraan merujuk pada menjadi warga negara atau anggota suatu negara, namun dapat juga diartikan sebagai keanggotaan atau masyarakat dalam rangka hak dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa sebenarnya arti kewarganegaraan.

Kewarganegaraan merupakan sebuah konsep yang dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Istilah kewargaan menjadi populer dalam teori politik pada akhir abad ke-20. Jika diruntut berdasarkan sejarah, konsep kewarganegaraan di temukan pada masa kejayaan Yunani. Konsep politik oleh Aristoteles dalam pengertian Athena yakni kewargaan dalam pengertian klasik. Definisi lain dikemukakan oleh Charles Tilly (1995) yang mengidentifikasikan relasi antara warga dengan negara. Membicarakan kewarganegaraan pasti melibatkan relasi kuasa antara warga dengan negara.

Disamping itu, para sarjana memahami politik kewarganegaraan menjadi dua aliran yaitu: 1) kewarganegaraan formal dari sudut pandang negara. Jika ditemukan ada warga negara yang tereksklusi masalah pada legal formal atau lembaga negara, cara mengatasinya dapat berupa mengubah regulasi legal dan formal untuk mengakomodasi warga negara yang termajinalkan. Jika bukan terletak pada legal formal, maka dapat ditelaah elemen implementasi dalam pemenuhan hak warga negara. 2) kewarganegaraan informal. Van Klinken dan Berenchot (dalam Husni Mubarak, 2021) mengarahkan pengamat atau peneliti untuk memindahkan fokus kajian dari institusi formal menuju pengalaman warga biasa yang berkaitan dengan kekuasaan atau biasa disebut sebagai demokratisasi dari bawah yang cenderung informal (Husni Mubarak, 2021).

Secara umum, kewarganegaraan mengacu pada gerakan sosial yang menggambarkan hak-hak dasar warga negara, keadaan ketidakadilan dan keragaman posisi subjek dalam masyarakat, dan sekaligus dipengaruhi oleh dinamika politik. Sebagaimana dipahami secara umum Kewarganegaraan adalah keanggotaan dalam masyarakat dan menjadi dasar status formal seseorang serta hak-hak positif dan hak kewarganegaraan yang terkait dengan status tersebut (Delanty, 2000). Eric Hiariej dan Kristian Stokke dalam bukunya yang berjudul "Politik Kewargaan di Indonesia" memiliki pandangan bahwa Kewarganegaraan modern dibentuk oleh empat dimensi yang saling terkait: keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Sebaliknya, aspek status hukum dan keanggotaan lebih berkaitan dengan inklusi budaya dan hukum ke dalam masyarakat sipil, sedangkan hak dan partisipasi lebih berkaitan dengan status kepemilikan hak dan penerimaan terhadap kewajiban yang timbul dari proses inklusi.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat melakukan penelitian yang benar dan akurat diperlukan suatu metode penelitian yang disusun secara sistematis. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid sehingga penelitian dapat dikatakan layak dan menunjukkan efektivitasnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami isu-isu sosial yang relevan bagi individu atau kelompok tertentu melalui analisis mendalam terhadap kasus yang dipilih. Proses penelitian ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data dari partisipan atau sumber lainnya, menganalisis data yang terkumpul, dan menginterpretasi makna dari temuan-temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang fenomena sosial yang diteliti serta memberikan dasar bagi pengembangan solusi atau intervensi yang sesuai (Creswell, 2019).

Alasan fenomena permasalahan ini diangkat karena adanya polemik pemutusan akses air bersih oleh mantan Kepala Desa Pranti dan perjuangan

masyarakat untuk mendapatkan air bersih setelahnya. Kasus tersebut termasuk dalam politik kewarganegaraan dimana masyarakat berusaha memperjuangkan hak melalui aspirasi tentang bagaimana bentuk-bentuk perjuangan masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih. Oleh sebab itu, peristiwa tersebut dikaji secara mendalam oleh penulis melalui uraian.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan dua jenis data yang bertujuan untuk memperkuat kajian secara sistematis, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian menggunakan instrumen tertentu. Ini bisa berupa wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau metode lainnya yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Data primer memiliki beberapa keunggulan, antara lain: Akurasi, Detail, Kebuktian keabsahan, dan Konteks yang Kaya (Indriantoro dan Supomo, 2010).

Data penelitian akan diperoleh dari hasil proses wawancara dan pengamatan secara langsung dan mendalam di lapangan dengan menelusuri melalui responden. Penelitian ini nantinya akan memperoleh sumber data dari hasil wawancara Informan atau narasumber dan observasi yang dilakukan pada Desa Pranti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, dan kemudian dapat digunakan oleh pihak lain untuk analisis atau keperluan lainnya. Sumber data sekunder bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk kantor pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga riset, dan institusi lainnya. Data sekunder sering kali digunakan dalam analisis statistik karena telah diolah sebelumnya dan siap untuk digunakan. Keuntungan utama dari penggunaan data sekunder adalah efisiensi waktu dan biaya, karena tidak perlu melakukan pengumpulan data dari awal (Moehar, 2002:133).

Data sekunder dapat berupa berbagai jenis dokumen seperti buku, makalah, skripsi, thesis, jurnal, dokumen resmi, dan informasi dari website desa atau organisasi lainnya. Dengan

memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat melengkapi atau mengonfirmasi temuan mereka, memperluas kerangka analisis, atau mengidentifikasi tren atau pola yang mungkin tidak terlihat dalam data primer saja. Selain itu, penggunaan data sekunder juga dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (interview), observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Jenis-jenis data tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat populer dan sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Dalam wawancara, dua orang atau lebih terlibat dalam proses interaktif untuk bertukar informasi, pandangan, dan pengalaman terkait dengan subjek tertentu. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu peristiwa, individu, aktivitas, organisasi, motivasi, emosi, atau topik lainnya yang sedang diteliti.

Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari wawancara terstruktur yang mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, hingga wawancara tak terstruktur yang lebih bebas dan mengikuti alur percakapan yang berkembang secara alami. Jenis wawancara yang digunakan biasanya bergantung pada tujuan penelitian, kompleksitas topik, dan preferensi peneliti.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur dan menyasar masyarakat desa Pranti. Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana pewawancara mempraktikkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dia tanyakan dan menghasilkan jawaban hipotetis. Itu sebabnya pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan cermat. Wawancara jenis ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan. Ia menggali informasi informannya dengan rutin mengajukan pertanyaan terbuka.

b. Observasi Lapangan (pengamatan)

Menurut A. Gulo, observasi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat pokok-

pokok informasi sesuai dengan apa yang diperolehnya selama penelitian. Pengamatan ini melibatkan dua komponen: pengamat dan objek yang diamati.

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni fenomena perjuangan masyarakat dalam mendapatkan air bersih, dan observasi ini akan dilaksanakan di Desa Pranti Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Observasi ini melibatkan masyarakat desa Pranti dengan tujuan untuk mengetahui perjuangan masyarakat dalam mendapatkan air bersih, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pranti, dan apa dampak perjuangan mereka.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mencari data tentang variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, agenda, notulen rapat, dan lain-lain. Menurut Moleong dokumen dapat dibedakan menjadi dua yakni dokumentasi resmi dan dokumentasi pribadi. Dokumentasi resmi dibagi menjadi dokumentasi internal (seperti memo, instruksi, dan pengumuman) dan dokumentasi eksternal (diperoleh dari informasi lembaga sosial contoh bulletin, majalah, berita, pernyataan, dan siaran di media massa).

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen dari Desa Pranti berupa bukti dana desa atau APBDes tahun anggaran 2021 dalam pembuatan SPAM Perdesaan Padat Karya yang merupakan akses air bersih masyarakat Desa Pranti. Kemudian foto gambaran peristiwa masyarakat Desa Pranti dalam memperoleh air bersih baik SPAM Perdesaan Padat Karya, bantuan air bersih bencana kekeringan, dan Embung milik mantan Kepala desa Pranti. Hal tersebut bertujuan agar dapat diketahui rencana anggaran desa dan keterlibatannya dalam pembangunan akses air bersih serta bukti kuat hasil penelitian terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pranti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengambilan data secara sistematis dari wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, melalui cara mengkategorikan data, memecahnya menjadi unit-unit, mengintegrasikannya, dan mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori lalu dijabarkan dalam unit-

unit untuk kemudian di sintesa, di susun ke dalam pola, pemilahan data yang penting dan akan di pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri serta orang lain. (Sugiyono, 2008)

Konsep Miles dan Huberman digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan terjadi secara terus menerus hingga selesai pada setiap tahapan penelitian. Analisis data terdiri dari komponen-komponen berikut:

a. Reduksi data

Data yang dikumpulkan dalam laporan tersebut tentunya sangat luas dan harus dicatat secara detail dan menyeluruh. Mereduksi berarti memilih pokok-pokok pokok, merangkumnya, memusatkan perhatian pada hal-hal yang pokok, dan mencari pola serta tema.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah pengumpulan dan penjelasan suatu kumpulan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tindakan (Rijali, 2018). Data penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, hubungan antar kategori, diagram, dll.

c. Penyimpulan data (verifikasi)

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti yang lebih kuat pada langkah selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang diperoleh saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diambil akan dapat diandalkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematis mengacu pada proses atau urutan rencana laporan penelitian yang disajikan secara naratif. Di bawah ini rincian pendekatan sistematika penulisan disertai menurut pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (mencari penelitian serupa sebelumnya), dan metodologi penelitian. Ulasan di atas telah memberikan latar belakang terkait dengan topik penulis: 'Politik Kewarganegaraan: Analisis Perjuangan Masyarakat Mendapatkan Air Bersih di Desa Pranti Kabupaten Rembang. Penulis kemudian

mengajukan tiga pertanyaan mengenai masalah ini. Menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian dari sudut pandang teoritis dan praktis. Penulis juga mengulas karya peneliti sebelumnya untuk memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang disebut tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu metode atau teknik untuk mengumpulkan data dan menggunakannya sebagai bahan analisis.

BAB II. KERANGKA TEORI

Pada bab kedua penulis memaparkan uraian teoritis yang relevan dengan variabel penelitian atau permasalahan yang akan diteliti. Penulis merujuk teori politik kewargaan kristian stokke yang termuat pada buku Politik Kewargaan di Indonesia (2018) serta buku lainnya sebagai penunjang yang masih relevan dan memiliki korelasi dengan teori tersebut.

BAB III. GAMBARAN UMUM DESA PRANTI KABUPATEN REMBANG

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, meliputi geografi, demografi, kondisi sosial budaya masyarakat, profil kelembagaan (sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, program kerja, dll).

BAB IV. PERJUANGAN MASYARAKAT DESA PRANTI MENDAPATKAN AIR BERSIH

Bab keempat akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang tertulis pada bagian bab pertama. Penulis akan menjawab pertanyaan terkait permasalahan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pranti. Desa Pranti sebagai objek yang melakukan perjuangan untuk memperoleh haknya sebagai warga negara dianalisa dan dinarasikan secara deskriptif. Yang kedua, menjawab persoalan tindakan masyarakat Desa Pranti untuk memperjuangkan mendapatkan akses air bersih. Dalam konteks ini, data yang telah dikumpulkan dari para informan yang digali peneliti melalui observasi dan wawancara di lapangan seperti Kepala Desa Pranti, mantan Kepala Desa Pranti, perangkat desa maupun tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil Desa Pranti. Kemudian diuraikan oleh penulis tentang bagaimana fenomena tersebut terjadi dalam bentuk naratif. Kemudian terakhir mengulas dampak perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pranti dalam proses perjuangan hak mendapatkan air bersih. Hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian akan dikorelasikan dengan teori politik kewargaan pada bab selanjutnya.

BAB V. DAMPAK PERJUANGAN HAK MENDAPATKAN AIR BERSIH

Bab kelima ini penulis akan menyajikan analisa dari pembahasan bab empat yang dikorelasikan dengan teori kewargaan untuk melihat bagaimana dampak perjuangan masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih.

BAB VI. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian penutup, disajikan secara substantif hasil seluruh temuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, dan diambil kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan proposal yang memuat uraian langkah-langkah yang harus dilakukan pemangku kepentingan untuk setiap temuan. Saran ini mengarah pada dua hal: saran untuk memperluas penelitian dan saran untuk pengembangan kebijakan di bidang terkait.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Kewarganegaraan dari Peran Politik Kewargaan dalam Perjuangan Masyarakat

Kewarganegaraan itu segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat 2). Kata kewarganegaraan dalam Bahasa Latin yaitu *civicus*, kemudian di serap dalam Bahasa Inggris *civic* yang bermakna warga negara atau kewarganegaraan. Warga negara diartikan sebagai warga, anggota (member) dari suatu negara. Sedangkan secara estimologi, warga negara merupakan anggota dari sekelompok manusia yang hidup ataupun tinggal di wilayah hukum tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban (Ristek Dikti, 2016).

Aristoteles memiliki kontribusi penting dalam pemikiran tentang kewarganegaraan dan politik. Dalam karyanya "Politics", Aristoteles (384-322 BC) membahas konsep kewarganegaraan (atau "citizenship" dalam bahasa Inggris) sebagai bagian integral dari struktur politik suatu negara. Bagi Aristoteles, kewarganegaraan tidak hanya berarti memiliki status formal sebagai warga negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam urusan publik dan pemerintahan negara. Aristoteles menekankan bahwa kewarganegaraan sejati tidak hanya bergantung pada status hukum semata, tetapi juga pada partisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Baginya, warga negara adalah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik, memegang jabatan publik, dan secara aktif berkontribusi untuk kepentingan bersama.

Pemikiran Aristoteles tentang kewarganegaraan telah menjadi dasar bagi banyak konsep modern tentang demokrasi dan partisipasi politik. Meskipun definisi dan praktik kewarganegaraan telah berkembang sejak zaman Aristoteles, kontribusinya tetap dihargai dalam sejarah pemikiran. Warga negara diartikan sebagai penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan wewenang resmi, maka dapat dikatakan warga negara dengan standar fungsional atau terbatas. Definisi di atas tentu saja tidak sesuai dengan konsep kewarganegaraan secara umum dan praktis. Konsep kewarganegaraan adalah sesuatu yang dapat diperoleh melalui kelahiran atau keturunan sesuai azas kewarganegaraan *ius soli* dan *ius sanguinis* dan naturalisasi saat ini (Nurvenayanti, 2016) (Azra, 2003).

Istilah kata polis, polites dan politeia (bahasa Greek) menjadi kata kunci atau dikenal sebagai bagian dari Aristotle's term, yang kemudian diterjemahkan sebagai state, citizen dan constitution (bahasa Inggris). Ketiga term tersebut tidak dapat dipisahkan dan untuk memahami salah satu hal, maka perlu memahami pula yang lainnya. Dikatakan bahwa

"to understand what a constitution (politea) is, we must inquire into the nature of the city (polis); and to understand that since the city is a body of citizens (politai)_we must examine the nature of citizenship" (Aristotle, 1995:84).

"Kewarganegaraan (citizenship) merupakan bentuk dari identitas sosial politik individu yang berkembang seiring waktu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya sekadar status hukum, tetapi juga merupakan bagian dari identitas sosial dan politik seseorang yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Namun, kewarganegaraan tidak hanya tentang identitas semata. Seperti yang dikemukakan oleh JJ Cogan & Dericot (1998), kewarganegaraan juga mencakup hak-hak, kewajiban, partisipasi aktif dalam urusan publik, dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kewarganegaraan melibatkan lebih dari sekadar status atau identitas, tetapi juga meliputi peran dan tanggung jawab aktif dalam kehidupan masyarakat. Penting untuk membedakan antara definisi kewarganegaraan dan definisi warga negara. Menurut Aristoteles, definisi warga negara dapat ditentukan oleh bentuk pemerintahan atau konstitusi negara tersebut. Dalam konteks ini, definisi warga negara berkaitan dengan struktur politik suatu negara dan kriteria yang ditetapkan oleh hukum atau konstitusi. Sementara itu, definisi kewarganegaraan mencakup lebih banyak aspek, termasuk identitas, hak, kewajiban, partisipasi, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.

"it may be that someone who is a citizen in a democracy is not one in an oligarchy" (Aristotle, 1955:85).

Pada buku Polics bagian III yang berbicara terkait The Teory of Citizenship dan Constitution, Aristoteles menyebutkan bahwa konsep kewarganegaraan, warga negara dan konstitusi tidak bisa dipisahkan. Untuk memahami konstitusi, maka perlu diketahui apa itu definisi negara dan untuk mengetahui negara sebagai tempat tinggal atau tempat hidup warga, maka perlu dijelaskan pula definisi kewarganegaraan.

Setelah lahirnya konsep negara-bangsa (nation-state) terdapat istilah magna charta (1215), yang merupakan perjanjian antara raja Jhon dengan bangsawan Inggris sehingga mengawali perubahan paradigma tentang kewarganegaraan. Magna charta menjadi awal mula kewarganegaraan dipandang sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dapat mempengaruhi kedudukan atau posisi warga negara terhadap negaranya. Kemudian konsep kewarganegaraan berkembang didunia yang disebabkan dari serangkain peristiwa-peristiwa bersejarah seperti perjanjian "Westphalia" (1618-1648),

kemerdekaan Amerika Serikat (1776), dua belas negara koloni Inggris yang menetapkan konstitusinya sebagai negara berdaulat (1779), dan Revolusi Prancis (1789) (Dahlan Thaib, 2008). Setelah lahirnya gagasan kewarganegaraan dengan konsep Negara-Bangsa (Nation-State) pada masa ini, membuat arah perubahan paradigma kewarganegaraan dari kewarganegaraan yang fungsional (terbatas) menjadi kewarganegaraan kebangsaan (Nationality) yang dikenal dengan istilah "Ideologi Nasionalistik". Sehingga memberikan pemahaman bahwa warga negara merupakan bagian atau anggota dari sebuah negara bangsa (Sapriya, 2011).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, perkembangan konsep kewarganegaraan memang mengalami orientasi baru yang sangat dipengaruhi oleh konsep negara modern dengan sistem demokrasi. Salah satu ciri utama dari perkembangan kewarganegaraan pada masa kontemporer adalah upaya untuk "Internasionalisasi Kewarganegaraan". Internasionalisasi kewarganegaraan mengacu pada fenomena di mana kewarganegaraan seseorang tidak lagi terbatas pada batas-batas negara tertentu, tetapi juga melibatkan hubungan dan kewajiban di tingkat internasional. Ini terkait dengan perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi, politik, dan sosial antar negara. Beberapa contoh praktis dari internasionalisasi kewarganegaraan termasuk:

- Dua Kewarganegaraan (Dual Citizenship): Banyak negara modern yang mengizinkan warganya untuk memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Ini memungkinkan individu untuk memiliki koneksi dan kewajiban di dua negara yang berbeda.
- Perjanjian Kewarganegaraan (Citizenship Agreements): Negara-negara dapat menjalin perjanjian tentang kewarganegaraan, yang memfasilitasi proses naturalisasi dan memberikan hak-hak tertentu kepada warga negara dari negara mitra.
- Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan: Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) berupaya untuk mempromosikan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak warga negara di seluruh dunia.
- Krisis Pengungsi dan Migrasi: Krisis pengungsi dan migrasi global telah memunculkan isu-isu kewarganegaraan yang kompleks, dengan banyak negara berusaha untuk menangani tantangan ini secara bersama-sama melalui kerja sama internasional.
- Pendidikan Global dan Kewarganegaraan: Pendidikan global semakin menekankan pentingnya memahami kewarganegaraan dalam konteks global, termasuk hubungan antarnegara dan isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keadilan sosial.

Semua ini menunjukkan bahwa dalam konteks masa kontemporer, konsep kewarganegaraan tidak lagi terbatas pada wilayah geografis suatu negara, tetapi juga melibatkan dimensi internasional yang penting dalam pembentukan identitas dan tanggung jawab kewarganegaraan. Seperti yang dijelaskan oleh Lynch tahun 1992 (Abdul Aziz Wahab, 2011) bahwa;

Pengembangan ide ini mengilustrasikan evolusi kompleks dari interaksi sosial dan politik antara individu, komunitas lokal, nasional, dan global. Dimulai dari hubungan yang lebih lokal dan teritorial, seperti ikatan dalam keluarga atau suku bangsa, interaksi ini berkembang menjadi interaksi antar negara kota atau kesatuan nasional. Kesimpulannya, gagasan ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dan politik yang melintasi berbagai tingkat skala, mulai dari yang lokal hingga global, serta pentingnya konsep kewarganegaraan dalam membentuk identitas dan hubungan antara individu, komunitas, dan negara.

Gunsteren (1988) dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2001) berpendapat bahwa terdapat tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara, yaitu: 1. Batas kemampuan otonomi (Authonomy); 2. Pemberian pertimbangan (Judgment); 3. Loyalitas (loyalty). Dari pandangan Gunsteren tersebut timbul beberapa pandangan terkait kewarganegaraan seperti; Pertama, dalam arti terbatas kewarganegaraan merujuk pada definisi kedudukan warganegara yang sama dalam bidang politik dan partisipasi, sedangkan dalam arti luasnya kewarganegaraan merujuk pada kedudukan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kedua, formal dan substantif. Kewarganegaraan formal berkaitan dengan hak dan kewajiban, sedangkan kewarganegaraan substantif berkaitan dengan watak warga negara yang riil dan pengaruh politiknya.

Menurut Gunsteren (1998) mendefinisikan pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan dalam tiga aspek: 1) mempunyai hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; 2) Warga negara memiliki akses terhadap pengadilan yang dikelola bersama untuk mengajukan perkara berdasarkan aturan yang berlaku sama bagi warga negara di semua tingkatan. 3) Kondisi sosial ekonomi minimal terjamin. Dari ketiga aspek yang disebutkan Marshall, kita dapat menyimpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan suatu gerakan pembebasan dalam ranah politik, sosial-ekonomi, dan hukum sebagaimana konsep negara demokrasi, konsep negara kesejahteraan, dan supremasi hukum (Abdul Aziz Wahab, 2011).

Tahun 1970 konsep kewarganegaraan semakin pluralistik. Alasannya yakni di salah satu pihak berusaha mendorong adanya nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, disisi lain kewarganegaraan dituntut

mampu mengelola kondisi pluralistik masyarakat tersebut. Dilihat dari negara-bangsa, dimensi dunia usaha, dan organisasi sosial kemasyarakatan, petinggi atau penguasa mulai membicarakan sistem demokrasi, hukum, dan kesejahteraan karena adanya tuntutan dari warga negara serta dunia usaha yang menuntut adanya kebebasan dari beban birokrasi untuk memfokuskan usaha mencari laba (keuntungan). Konsep kewarganegaraan tahun 1970-an bergeser dari esensi kewarganegaraan menjadi pertimbangan situasional dan mulai dipersoalkan terkait masalah kewajiban, kepedulian, dan loyalitas kepada birokrasi.

Tahun 1980-an sampai dengan sekarang konsep kewarganegaraan mengarah ke agenda politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lynch (1992) dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2001) mengemukakan bahwa isu dunia yang mengarah pada konsep kewarganegaraan internasionalisasi terdapat tiga dimensi tingkatan kewarganegaraan yaitu: local community (keanggotaan masyarakat lokal), national citizenship (kewarganegaraan nasional), dan international citizenship (kewarganegaraan internasional). Sedangkan bentuk teori kewarganegaraan di Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila, dimana Pancasila merupakan jati diri bangsa, pandangan hidup, ideologi bangsa dan negara, falsafah bangsa dan negara, serta dasar negara Republik Indonesia. Maka, penjelasan kedudukan manusia sebagai warga negara di Indonesia dalam konsep kewarganegaraannya telah tertuang dan dijelaskan dalam Pancasila baik secara eksplisit maupun implisit (Nurvenayanti, 2016).

Pemahaman yang baik tentang hubungan antara warga negara dengan negaranya merupakan langkah penting dalam memahami konsep kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan tidak hanya melibatkan hak dan kewajiban, tetapi juga menyangkut kedalaman ikatan dan identitas antara individu dan negara tempatnya tinggal. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan kesadaran kewarganegaraan. Sebagai ideologi negara, Pancasila mencakup nilai-nilai yang mendasari hubungan harmonis antara warga negara dan negaranya, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat Indonesia dapat memahami arti penting dari keterlibatan aktif dalam urusan publik, pentingnya menghormati hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana berkontribusi dalam pembangunan negara yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis antara warga negara dan negaranya, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi, keadilan, dan persatuan dalam masyarakat.

B. Peran Negara dalam Pemenuhan Air Bersih

Pemerintah atau negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak warga negaranya. Seperti Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Kelangkaan air dan terbatasnya ketersediaan air bersih menjadi masalah yang cukup serius bagi kelangsungan hidup manusia. Air sendiri menjadi bagian unsur penyusun tubuh sekitar 70% di dalam tubuh manusia sehingga kebutuhan akan air bersih sangat penting. Secara garis besar persoalan yang timbul akibat kurangnya ketersediaan dan akses air bersih akan menimbulkan masalah seperti masalah kesehatan akibat kurangnya asupan air atau kualitas air bersih yang tidak mumpuni, terganggunya aktivitas pertanian dan peternakan, dan terganggunya beberapa aktivitas kehidupan manusia dalam keberlangsungan hidup.

Selain persoalan tersebut, Persoalan akses air menjadi salah satu tantangan serius dalam hubungan antar negara, terutama di wilayah yang memiliki sumber daya air yang melintasi batas wilayah lebih dari satu negara. Persaingan dan konflik terkait dengan sumber daya air dapat mengancam stabilitas regional dan bahkan menciptakan ketegangan antar negara. Sejarah telah mencatat beberapa konflik yang dipicu oleh perselisihan terkait sumber daya air, seperti konflik antara Arab-Israel pada tahun 1967 yang sebagian besar berkaitan dengan kendala akses air. Konflik semacam ini menyoroti pentingnya manajemen air yang bijaksana dan kerjasama lintas batas untuk mencegah eskalasi ke konflik bersenjata.

Terkait dengan akses universal atas air, hal ini memang menjadi tantangan global yang penting, karena air adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air yang cukup, bersih, dan aman adalah hak asasi manusia yang esensial. Air tidak hanya diperlukan untuk konsumsi langsung seperti minum, tetapi juga untuk pertanian, sanitasi, industri, dan kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama internasional dan pembangunan solusi yang berkelanjutan sangat penting. Ini termasuk pembentukan perjanjian dan mekanisme kerjasama antar negara untuk manajemen sumber daya air yang adil dan berkelanjutan, pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk pengelolaan air yang efisien, serta promosi kesadaran dan tanggung jawab sosial tentang pentingnya pelestarian sumber daya air. Dengan upaya bersama dan komitmen global, diharapkan masalah akses air dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan, sehingga hak atas air sebagai hak asasi manusia dapat terpenuhi untuk semua orang di seluruh dunia (Kasim, 2015).

Masalah air memang memiliki dampak yang sangat fundamental terhadap kehidupan manusia dan perkembangan negara. Ketersediaan air yang cukup dan berkualitas memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pertanian, industri, hingga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara terhadap akses air merupakan hal yang sangat penting. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas air tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara. Konsep kedaulatan menyangkut kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengatur dan mengendalikan urusan dalam batas wilayahnya. Kekuasaan ini mencakup aspek politik dan ekonomi, yang mencerminkan kedaulatan politik atas rakyat serta kedaulatan ekonomi atas sumber daya alam, termasuk tanah dan air. Sebagai contoh, dalam konteks sejarah feudalisme, kedaulatan seorang raja tidak hanya mencakup aspek politik seperti pengaturan pemerintahan dan kebijakan politik, tetapi juga mencakup kedaulatan atas sumber daya ekonomi seperti tanah dan air. Raja memiliki kontrol penuh atas sumber-sumber kekayaan alam, termasuk air, dan dapat mengatur distribusi dan penggunaannya sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Dalam konteks modern, tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas air juga tercermin dalam kebijakan publik, hukum lingkungan, dan regulasi ekonomi yang mengatur akses, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya air dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan bersama dan untuk keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas air menyoroti kompleksitas dalam manajemen sumber daya alam dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan tantangan utama dalam tata kelola air yang berkelanjutan dan adil (Asshiddiqie, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, konsep kedaulatan yang berlaku di Indonesia yakni kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar." Sehingga, kekuasaan tertinggi termasuk perihal pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya air, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemegang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi pedoman penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Dasar konstitusionalnya disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terkhusus mengatur terkait penguasaan oleh negara atas bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep hak menguasai negara berdasarkan ketentuan tersebut telah

ditafsirkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dan menjadi yurisprudensi yang dirujuk dalam putusan pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air.

Sumber daya alam air memiliki karakteristik yang sangat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem. Kepemilikan atas air, seperti halnya kepemilikan sumber daya alam lainnya, seharusnya didasarkan pada konsep kepemilikan publik. Hal ini karena air adalah kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dan akses yang adil dan merata terhadap air merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Dalam perspektif ini, konsep pengelolaan sumber daya air harus diletakkan di tangan negara sebagai wakil dari masyarakat, yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan melindungi sumber daya air tersebut. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengadakan kebijakan, mengambil tindakan pengurusan, mengatur, mengelola, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan perlindungan sumber daya air. Konsep pengelolaan air yang berbasis pada kewenangan negara ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan, pengaturan akses dan distribusi air, pengelolaan infrastruktur air, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebijakan dan regulasi terkait air. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah konflik yang berpotensi timbul akibat kelangkaan air dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya yang vital ini (Kasim, 2015).

Disisi lain perspektif penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 juga mengatur terkait pemenuhan hak asasi manusia dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang memuat secara komprehensif perlindungan atas hak asasi manusia. Menurut perspektif HAM pemenuhan hak warga negara atas air diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 terkait hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan tersebut pengaturan terkait hak atas air memang tidak disebutkan secara spesifik. Namun, jika hak atas air tidak terpenuhi atau akses terhadap air minum yang sehat dan aman akan menghalangi hak-hak ini. Sehingga, pemenuhan hak atas air menjadi prasyarat terpenuhinya hak-hak sebagaimana semestinya sesuai dengan Pasal 28H UDD 1945.

Menurut Helmi Kasim (2015), sebagai bentuk hak asasi manusia maka pemenuhan hak atas air dapat dilakukan melalui paradigma menghargai (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil). Paradigma tersebut diadopsi dalam UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28I ayat

(4) yang mengatur tentang tanggung jawab negara utamanya pemerintah dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut juga maka pemenuhan hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara khususnya pemerintah (Kasim, 2015).

C. Politik Kewargaan sebagai Alat Perjuangan Masyarakat Desa Pranti Atas Air Bersih

Dalam negara demokratis, hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik dan sipil, biasanya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara. Namun, implementasi hak-hak ini tergantung pada political will atau kemauan politik dari penguasa atau pemerintah untuk melaksanakannya. Penegakan hak-hak sipil dan politik memang membutuhkan komitmen dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hukum dan politik yang mendukung perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut. Hal ini termasuk pembuatan undang-undang yang memadai, institusi yang efektif untuk menegakkan hukum, serta kebijakan publik yang mempromosikan partisipasi politik dan kebebasan sipil.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hak-hak sipil dan politik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, pemantauan terhadap kebijakan pemerintah, advokasi untuk perlindungan hak-hak individu, serta aksi kolektif untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan merupakan bagian dari upaya yang diperlukan. Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah melindungi individu atau warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau pemerintah. Hak-hak ini memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Penegakan hak-hak ini menjadi landasan penting dalam memastikan keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan (Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005) .

Kewarganegaraan dibentuk melalui beberapa rangkaian gerakan melawan ketidakadilan. Gagasan terkait konsep kewargaan memberikan tawaran sebuah basis konseptual untuk mengkaji perjuangan-perjuangan tersebut melalui cara yang lebih menyeluruh sebagai politik kewargaan (Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018). Kewarganegaraan merujuk pada menjadi warga negara atau anggota suatu negara, namun dapat juga diartikan sebagai keanggotaan atau masyarakat dalam rangka hak dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa sebenarnya arti kewargaan negaraan.

Kewarganegaraan merupakan sebuah konsep yang dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Istilah kewargan menjadi populer dalam teori politik pada akhir abad ke-20. Jika diruntut berdasarkan sejarah, konsep kewarganegaraan di temukan pada masa kejayaan Yunani. Konsep politik oleh Aristoteles dalam pengertian Athena yakni kewargan dalam pengertian klasik. Definisi lain dikemukakan oleh Charles Tilly (1995) yang mengidentifikasi relasi antara warga dengan negara. Membicarakan kewarganegaraan pasti melibatkan relasi kuasa antara warga dengan negara.

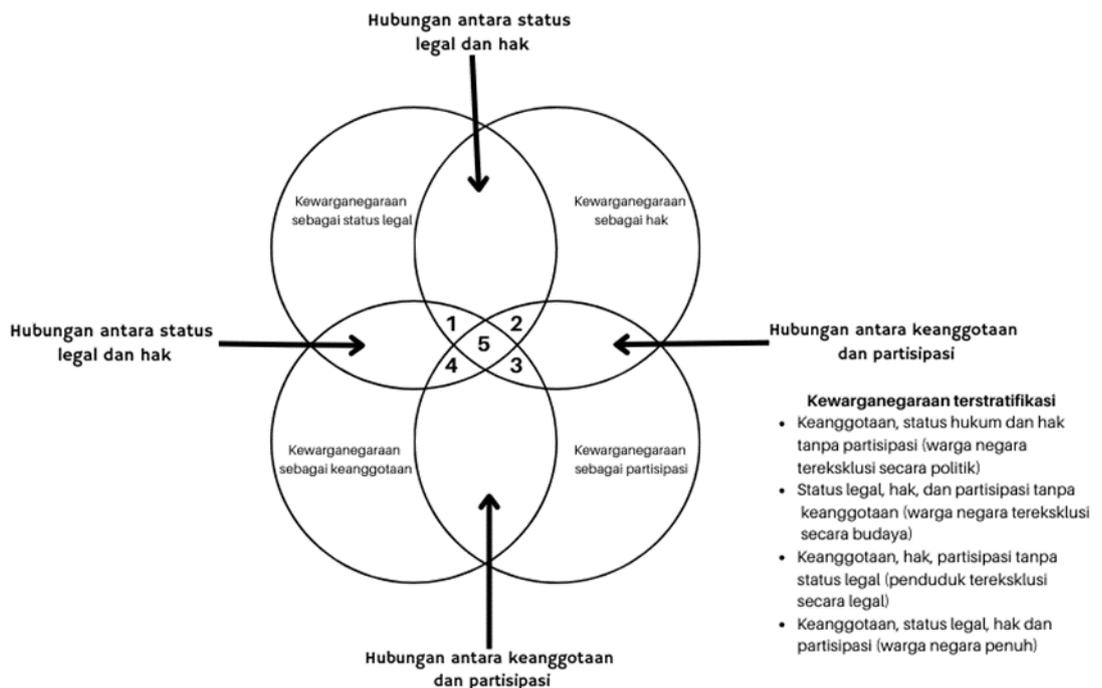
Sedangkan dalam teori politik modern, terdapat tiga aliran yang dapat mendeskripsikan politik kewarganegaraan: Pertama, perspektif liberal. Marshal (1950) mendeskripsikan perkembangan kewarganegaraan dari elit, kelas menengah, dan kelas bawah. Sekitar pada abad ke-18, hanya kelas elit yang memiliki hak kebebasan dan kepemilikan; abad ke-19, kelas menengah telah memiliki kesempatan berpartisipasi politik; abad ke-20, kelas bawah diperbolehkan ikut berpartisipasi politik di negara sosial demokrat dan kesejahteraan. Kedua, model republikan. Disini jenis kewargan merujuk pada masyarakat itu sendiri yang ingin memenuhi keadaban publik daripada status legalnya. Karena, status legal dapat terpenuhi dengan sendirinya jika semua kalangan di masyarakat berusaha mewujudkan nilai dan keadaban publik. Ketiga, komunitarian. Berbeda dengan dua tradisi lainnya, komunitarian menekankan pada identitas ekspresi dari anggota komunitas politik. Sehingga, tradisi komunitarian ini berfokus pada pengelolaan masyarakat yang beragam dan menekankan bahwa keragaman identitas yang mewakili dalam berbagai ciri khas komunitas kenyataannya tidak semua mendapatkan ruang yang sama (Husni Mubarak, 2021).

Disamping itu, para sarjana memahami politik kewarganegaraan menjadi dua aliran yaitu: 1) kewarganegaraan formal dari sudut pandang negara. Jika ditemukan ada warga negara yang tereksklusi masalah pada legal formal atau lembaga negara, cara mengatasinya dapat berupa mengubah regulasi legal dan formal untuk mengakomodasi warga negara yang termajinalkan. Jika bukan terletak pada legal formal, maka dapat ditelaah elemen implementasi dalam pemenuhan hak warga negara. 2) kewarganegaraan informal. Van Klinken dan Berenchot (dalam Husni Mubarak, 2021) mengarahkan pengamat atau peneliti untuk memindahkan fokus kajian dari institusi formal menuju pengalaman warga biasa yang berkaitan dengan kekuasaan atau biasa disebut sebagai demokratisasi dari bawah yang cenderung informal (Husni Mubarak, 2021).

Secara umum, kewarganegaraan mengacu pada gerakan sosial yang menggambarkan hak-hak dasar warga negara, keadaan ketidakadilan dan keragaman posisi subjek dalam masyarakat, dan sekaligus dipengaruhi oleh

dinamika politik. Sebagaimana dipahami secara umum Kewarganegaraan adalah keanggotaan dalam masyarakat dan menjadi dasar status formal seseorang serta hak-hak positif dan hak kewarganegaraan yang terkait dengan status tersebut (Delanty, 2000). Eric Hiariej dan Kristian Stokke dalam bukunya yang berjudul "Politik Kewargaan di Indonesia" memiliki pandangan bahwa Kewarganegaraan modern dibentuk oleh empat dimensi yang saling terkait: keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Sebaliknya, aspek status hukum dan keanggotaan lebih berkaitan dengan inklusi budaya dan hukum ke dalam masyarakat sipil, sedangkan hak dan partisipasi lebih berkaitan dengan status kepemilikan hak dan penerimaan terhadap kewajiban yang timbul dari proses inklusi.

Gambar 1. Dimensi - Dimensi Kewargaan



Sumber: Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Meski masing-masing pendekatan memberikan bobot yang berbeda, keempat dimensi di atas merupakan elemen penting dari kewarganegaraan. Hal ini mencakup penekanan pada hak-hak individu dalam pendekatan

kewarganegaraan liberal, yang berfokus pada partisipasi politik dalam pendekatan civic-republik, serta proses inklusi dan partisipasi sosial dalam pendekatan komunitarian (R., 2002). Empat dimensi tersebut merupakan suatu upaya untuk menjelaskan kerangka komprehensif dalam melakukan kajian politik kewargaan tanpa perlu terikat di salah satu perspektif saja.

1. Kewargaan sebagai Keanggotaan

Dimensi keanggotaan dalam kewargaan menekankan bahwa kewargaan berdasar pada sebuah pembeda antara yang di dalam dan di luar komunitas, namun makna komunitas dan kriterianya dapat bersifat dinamis sesuai waktu dan ruang. Model kewargaan lama seperti Yunani berdasarkan pada keanggotaan dalam serta partisipasi hanya diperuntukkan bagi elite di level negara-kota; kemudian pada negara Romawi memberikan hak-hak legal tanpa partisipasi politik bagi penduduk dibawah kepemimpinannya demi menjaga kendali atas teritori kekuasaannya (Magnette, 2005). Sedangkan kewargaan modern, (Brubaker, 1992) mendefinisikan dimensi keanggotaan dalam suatu bangsa diasumsikan dibatasi oleh teritori, homogen, dan stabil. Sehingga, Heater (1999) memiliki perspektif bahwa kewargaan dan kebangsaan melebur selama dua abad terakhir.

Proses meleburnya kewargaan dan kebangsaan menyebabkan bangsa menjadi basis universal untuk mendiskritifkan komunitas politik warga negara. Namun, komunitas bangsa dapat terbentuk dari beraneka ragam dengan pembedaan dasar antara konstruksi kebangsaan berbasis etno-kultural dan yuridis-politik yakni komunitas bangsa yang terbentuk dari sebuah esensi budaya atau pembentukan negara berbasis pada teritori (Eric Hiariiej dan Kristian Stokke, 2018; Brubaker, 1992). Sehingga substansi dari keanggotaan ialah menjadi bagian dari suatu komunitas yang bersifat dinamis dari masa ke masa. Dimana dulu komunitas ini berupa suku atau masyarakat adat yang homogen, namun kini keanggotaan dalam konteks kewarganegaraan memiliki makna yang lebih besar yaitu negara-bangsa.

2. Kewargaan sebagai Status Legal

Pada keanggotaan dalam suatu komunitas bangsa dan negara menerapkan kewargaan sebagai status legal, yaitu adanya hubungan kontraktual sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara individu dengan negara. Heater (1999) mencatat bahwa hukum internasional mengakui adanya hak negara berdaulat untuk

mendeskriftkan siapa saja yang berhak menjadi warga negara. Bermula pada perbedaan antara konstruksi komunitas bangsa berbasis etnis-kultural dan yuridis-politis, kewarganegaraan digolongkan berdasarkan kewargaan orang tua (*ius sanguinis*) atau berdasarkan di negara mana seseorang dilahirkan (*ius soli*). Selain itu, kewargaan juga dapat diberikan pada situasi tertentu seperti proses pernikahan seorang warga negara (*ius matrimonii*) atau bertempat tinggal di suatu negara selama periode tertentu (*ius domicilii*).

Shachar (2009) memiliki gambaran kewargaan seperti sebuah undian kelahiran. Dimana kewargaan merupakan sebuah properti yang dapat dipindahkan ketika seseorang lahir (dapat berdasarkan tempat kelahiran maupun darah) serta menciptakan destingtif antara mereka yang lahir mendapatkan keberuntungan dan peluang yang lebih besar untuk memperoleh kekayaan, hak, dan partisipasi dan mereka yang memperoleh nasib sebaliknya. Peristiwa tersebutlah yang mendorong lahirnya prinsip kewargaan alternatif yaitu *ius nexi*, yang memiliki makna kewargaan didasarkan pada fakta sosial dan secara tidak sengaja diadakan untuk kepentingan pragmatis memperoleh suatu keuntungan tertentu.

3. Kewargaan sebagai Hak

Keanggotaan dan status hukum berhubungan dengan dimensi ketiga ini yaitu hak. Marshall (1992) mengkategorikan hak menjadi tiga jenis, yakni: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Marshall (1992) memperkenalkan kategori umum yang mencakup tiga jenis hak: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil adalah hak yang memungkinkan perlindungan keselamatan dan privasi pribadi. Hal ini mencakup hak atas keadilan dan perwakilan hukum, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi (kebebasan pers), hak untuk mengadakan kontrak dan memiliki hak milik pribadi, dan hak atas kebebasan beragama. Hak politik mencakup hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses politik dan publik. Misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk membentuk organisasi atau partai politik, dan hak untuk menyatakan perlawanan atau protes. Hak-hak sosial mencakup hak atas bantuan sosial, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, hak atas redistribusi dan kompensasi, hak atas pendidikan dan kesempatan di pasar tenaga kerja, dan lain-lain (Janoski, T. & B. Gran, 2002).

M.J. smith dan Pangsapa (2008) berspekulasi bahwa Pendekatan terhadap kewarganegaraan lingkungan memang semakin menjadi fokus utama dalam studi mengenai hak-hak atas lingkungan hidup dan perlindungan alam. Ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar kewarganegaraan lingkungan sering kali berkaitan dengan bagaimana mengatasi ketegangan antara berbagai bentuk hak, seperti kebebasan sipil dan politik individu, dengan hak kelompok sosial dan kultural. Ini mengacu pada upaya untuk memastikan kesetaraan, kesamaan, dan universalitas hak-hak individu sambil memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok yang mungkin terpinggirkan atau terabaikan.

Fokus penelitian pada kewarganegaraan lingkungan, seperti dalam kasus perjuangan masyarakat Desa Pranti untuk pemenuhan air bersih, sangat relevan dan penting. Air adalah sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, dan pemenuhan hak atas akses air bersih merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Melalui penelitian seperti ini, kita dapat memahami dinamika interaksi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan lingkungan, serta tantangan dalam memastikan pemenuhan hak-hak warga negara dalam konteks lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dengan menganalisis perjuangan masyarakat Desa Pranti, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak atas air bersih, hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, dan upaya kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak warga negara terkait lingkungan hidup. Dengan demikian, skripsi yang berfokus pada kewarganegaraan lingkungan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya pemenuhan hak-hak warga negara dalam konteks lingkungan hidup yang semakin terdesak.

4. Kewargaan sebagai Partisipasi

Setelah keanggotaan atau komunitas, status legal dan hak, kewargaan juga berkaitan dengan kewajiban. Misalnya bentuk kewajiban warga negara membayar pajak dan wajib militer. Komunitarian memiliki perspektif penekanan pada partisipasi di tingkat masyarakat dan fungsi integratif dari kewargaan aktif, dimana kewargaan memiliki makna membawa seseorang keluar dari wilayah privat ke dalam kehidupan publik. Penekanan terhadap kewargaan aktif berarti proses untuk menjadi seorang warga negara dipandang bukan hanya sebagai isu identitas, status legal maupun hak (Joppke, 2008). Namun, juga berkaitan dengan persoalan keterlibatan aktif dalam komunitas negara.

Cornwall (2004) menjelaskan perbedaan antara ruang partisipatif yang direbut oleh gerakan rakyat dan ruang partisipatif yang diberikan kepada kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai isu yang telah dideskriptifkan dari luar dan dari atas. Gagasan tentang ruang partisipatif yang direbut oleh gerakan rakyat memiliki gambaran sebuah transformasi dan emansipasi. Sedangkan ruang yang diberikan undangan kepada suatu kelompok untuk ikut berpartisipasi dalam isu-isu yang dibuat oleh negara daripada warga negara yang berdaulat dan menggunakan kontrol politik melalui partisipasi demokratis.

Janoski dan Gran (2002) sependapat dengan argumen bahwa warga negara itu terstratifikasi, bukan hanya dalam bentuk keanggotaan, status legal, dan hak. Namun juga dapat melalui berbagai kemungkinan dan kapasitas yang berbeda untuk partisipasi politik. Oleh karena itu, Janoski dan Gran (2002) memiliki perspektif bahwa stratifikasi tersebut dapat dicerminkan dalam konsepsi diri warga negara. Sehingga ia mengusulkan tiga bentuk warga negara yang ideal berdasarkan praktik politiknya. Pertama, warga negara partisipan yaitu mereka yang digabungkan dari atas sebagai pendukung elite politik atau berpartisipasi aktif dalam ranah mobilisasi untuk integrasi politik dari bawah. Kedua, warga negara non-partisipan yakni warga negara yang memperoleh atau mendapatkan otoritas dan program politik namun tidak memberikan dukungan secara aktif. Ketiga, warga negara oportunistis yang condong mengedepankan kepentingan pribadi dan hanya ikut serta berpartisipasi secara politik jika mengganggu kepentingan mereka.

Jadi, partisipasi menjadikan dimensi kunci dalam politik kewargaan, dimana ia menunjukkan perlunya perhatian analitis pada hubungan yang kompleks dan kontekstual antara ruang politik dengan kapasitas serta strategi politik para aktor. Kewargaan memiliki makna sebagai bentuk perjuangan, oleh karenanya pengkajian antara hubungan warga negara dengan komunitas yakni negara atau bangsa perlu dikaji dalam bentuk partisipasi. Contohnya pada perjuangan masyarakat memperoleh air bersih dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk dimensi kewargaan partisipasi. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan atau interaksi ruang yang direbut oleh gerakan rakyat maupun terklasifikasikan dalam tiga bentuk warga negara menurut Janoski dan Gran (2002).

Eric Hiariej dan Kristian Stokke (2018) menegaskan bahwa keempat dimensi kewargaan ini saling terkait. Seperti yang telah dijelaskan di atas, keanggotaan merupakan basis status legal, kemudian saling berhubungan dan memiliki efek hak dan partisipasi warga negara. Meskipun tampaknya muncul secara berurutan, Eric Hiariej dan Kristian Stokke (2018) berpandangan bahwa keempat dimensi ini sangat kompleks dan bersifat multi arah. Sehingga, politik kewargaan tidak semestinya dipahami secara berurutan, namun dapat dijadikan landasan yang kompleks terhadap proses-proses politik yang senantiasa terbuka. Kewargaan juga dapat bersifat politis, yang berarti memiliki makna ia selalu melibatkan kontestasi, dari soal siapa yang mengontrol alat produksi hingga siapa yang berhak mendapatkan keuntungan kesejahteraan (Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018).

Kristian Stokke (2018) mendefinisikan bahwa politik kewargaan sebagai perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi yang substantif dan terlembaga, atau memiliki makna perjuangan untuk keadilan kultural, sosial, yuridis, dan politik. Perihal aktor kepentingan, strategi, dan kapasitas, politik kewargaan selalu kompleks. Secara geografis juga beragam karena kewarganegaraan dipolitisasi dan dilembagakan dalam suatu tempat dan teritori yang beragam, pada skala berlapis dan saling terkait, melalui jejaring spasial lintas tempat, skala, dan teritori.

Landasan kewargaan dapat dikatakan selalu bersifat politis karena kewargaan dibangun melalui praktik-praktik sosial, ketegangan, dan konflik dimana dalam pembentukannya banyak dipengaruhi oleh pertarungan kekuasaan antara kelompok dominan dan individu vis-a-vis masyarakat sipil dan gerakan rakyat sektoral serta aktivis. Untuk memelihara kekuasaan, maka kelompok pertama memegang dan mengontrol formasi kewargaan. Mereka juga dapat menstabilisasi proses tersebut melalui pemberlakuan serangkaian regulasi atau

tata aturan yang relevan untuk mengatur dan melembagakan perjuangan-perjuangan kelas. Berbeda dengan kelompok terakhir yang selalu menjadi tulang punggung bagi kekuatan sosial dan politik yang mengedepankan beragam praktik maupun tuntutan kewargaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PRANTI KABUPATEN REMBANG

A. Profil Kabupaten Rembang

1. Sejarah Kabupaten Rembang

Rembang memiliki sejarah yang kaya dan panjang, yang dapat ditelusuri kembali hingga masa Kerajaan Majapahit dan masa kejayaan armada Laksamana Cheng Ho dari China. Nama Rembang tercatat dalam Kitab Negarakertagama, sebuah naskah yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa Rembang telah menjadi bagian dari kerajaan tersebut pada zaman dahulu. Lasem, yang merupakan kecamatan di Rembang saat ini, dikenal sebagai daerah otonom Majapahit dengan bandar laut yang maju. Ini menunjukkan pentingnya peran Lasem dalam perdagangan dan pelayaran pada masa itu. Kehadiran masyarakat keturunan Tionghoa di Rembang dapat ditelusuri kembali hingga masa armada Laksamana Cheng Ho. Pengaruh budaya Tionghoa dapat ditemukan dalam arsitektur dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Rembang pernah menjadi bagian dari kekuasaan Lasem. Namun, setelah penguasa Lasem dikalahkan oleh Belanda, wilayahnya berubah menjadi distrik yang menjadi bagian dari Kabupaten Rembang. Sejarah tersebut memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan politik, perdagangan, dan budaya di wilayah Rembang dan Lasem selama berabad-abad. Hal ini menggambarkan warisan sejarah yang kaya dan beragam di Jawa Tengah, Indonesia.

Rembang memiliki tempat yang sangat penting dalam sejarah perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia karena di sinilah RA Kartini membangun sekolah khusus perempuan pribumi pertama. Inisiatif ini adalah bagian dari upaya Kartini untuk memberikan pendidikan kepada perempuan agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan berperan aktif dalam masyarakat. Rembang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi RA Kartini. Makamnya terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Bulu. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara Kartini dan wilayah Rembang, serta penghargaan yang diberikan kepada beliau atas perjuangan dan kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, yang menandai perubahan status administratif wilayah ini menjadi sebuah kabupaten. Hal ini memberikan pengakuan resmi atas pentingnya wilayah Rembang dalam struktur pemerintahan Indonesia. Hari jadi Kabupaten Rembang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 1741, yang mengacu pada peristiwa heroik yang dilakukan oleh Ingabehi Anggadajaja, Bupati Rembang saat itu, dalam mengobarkan perang suci melawan penjajah Belanda. Penetapan hari jadi ini sebagai penghormatan terhadap perjuangan dan semangat patriotisme masyarakat Rembang dalam melawan penjajah.

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Rembang



Sumber: Google maps

2. Letak Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, dan Kabupaten Pati di barat. Kabupaten Rembang dilalui oleh Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), yang merupakan jalur utama di pantai utara Pulau Jawa. Hal ini memudahkan aksesibilitas ke dan dari kabupaten ini. Wilayah selatan Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Butak yang memiliki ketinggian 679 meter. Di bagian utara terdapat perbukitan dengan puncak Gunung Lasem yang mencapai ketinggian 806 meter. Kawasan ini, termasuk Gunung Butak, dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak. Kabupaten Rembang memiliki peran strategis sebagai gerbang sebelah timur Provinsi Jawa

Tengah karena berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadikan Kabupaten Rembang sebagai pintu gerbang yang penting dalam hubungan antarprovinsi di Pulau Jawa. Dengan kondisi geografisnya yang beragam dan posisinya yang strategis, Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, dan industri.

Tabel 1. Batas Wilayah Kabupaten Rembang

| BATAS WILAYAH | |
|----------------------|---|
| Utara | : Berbatasan dengan Laut Jawa |
| Selatan | : Berbatasan dengan Kabupaten Blora |
| Timur | : Berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur |
| Barat | : Berbatasan dengan Kabupaten Pati |

sumber : rembangkab.go.id

B. Profil Desa Pranti

1. Sejarah Desa Pranti

Awalnya Desa Pranti merupakan perkumpulan para orang yang sedang bersemedi dan tidak pernah sibuk melakukan aktivitas bercocok tanam maupun mencari lahan pertanian. Pada zaman itu sebelah utara Ranti dan sebelah Selatan Pranti sibuk mencari lahan pertanian. Maka, mereka sekarang memperoleh lahan yang cukup luas dibandingkan dengan orang daerah Pranti yang gemar berhuru-hara dan mencari ilmu kekebalan tubuh.

Singkat cerita peninggalan saat ini sangatlah singkat dan sempit karena pengaruh searah dan adat yang di ceritakan oleh mbah Mranti. Demikianlah maka diciptakan nama Pranti sebagai nama Desa yang di tempati masyarakat sampai sekarang. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pranti

2. Visi dan Misi Desa Pranti

Visi merupakan sebuah gambaran tentang perencanaan pada masa yang akan datang dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Pranti dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan di Desa Pranti seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa serta masyarakat desa secara umum. Visi Desa Pranti yakni:

"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pranti Melalui Berbagai Program Pemberdayaan dan Progran Pembangunan"

Visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ini mencerminkan upaya pemerintah desa untuk memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik. Maksud dari meningkatkan kesejahteraan adalah menciptakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa berkomitmen untuk melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan program-program pembangunan yang dijalankan dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, melalui suasana musyawarah dan mufakat, diharapkan tercipta keharmonisan dan kebersamaan di antara masyarakat, yang merupakan landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Selain itu, landasan persatuan dan kesatuan yang kuat juga menjadi fokus dalam visi tersebut. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara masyarakat, diharapkan tercipta kerjasama yang solid dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, inti dari visi tersebut adalah menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan secara bersama-sama, dengan mengedepankan partisipasi, musyawarah, dan persatuan sebagai nilai-nilai utama dalam penyelenggaraan

Misi adalah turunan atau penjabaran dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Oleh karena itu, penjabaran dari

visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa jabatan kepala desa. adapun misi pembangunan jangka menengah Desa Pranti sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa periode lalu, sesuai dengan RPJMDes Desa Pranti.
- b. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi: pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan sumber daya alam (SDA), dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- c. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Pranti yang aman, tertib, guyib dan rukun, dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip: duduk sama rendah berdiri sama tinggi, dan ringan sama dijinjing berat sama dipikul.
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Pranti yang meliputi:
 - Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan dan akuntabel.
 - Pelayanan masyarakat yang prima yakni cepat, tepat, dan benar.
 - Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
 - Pemeliharaan jalur transportasi jalan dan jembatan sehingga selalu dalam keadaan baik guna menunjang kelancaran laju ekonomi masyarakat.

3. Kondisi Geografis

Memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung serta permasalahan yang ada merupakan sesuatu yang cukup penting karena dapat memberikan makna penting dalam pengambilan keputusan terkait Pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan menyelesaikan masalah di masyarakat.

Gambar 3. peta Wilayah Desa Pranti



Sumber: Google maps

Desa Pranti merupakan salah satu dari total 21 Desa di wilayah Kecamatan Sulang yang terletak 5 Km kearah Utara dari Kecamatan Sulang. Desa Pranti memiliki luas wilayah 70,140 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa pranti sebagai berikut:

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Pranti

| BATAS DESA | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Utara | : Berbatasan dengan Desa Pedak |
| Selatan | : Berbatasan dengan Desa Bogorame |
| Timur | : Berbatasan dengan Desa Bogorame |
| Barat | : Berbatasan dengan Desa Pedak |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

4. Kondisi Pemerintahan Desa
 - a. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Pranti sebesar 70,140 ha. Desa Pranti sendiri terdiri dari dua dusun yakni: Dusun Pranti Kidul dan Dusun Pranti Lor. Adapun pembagian wilayahnya terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 7

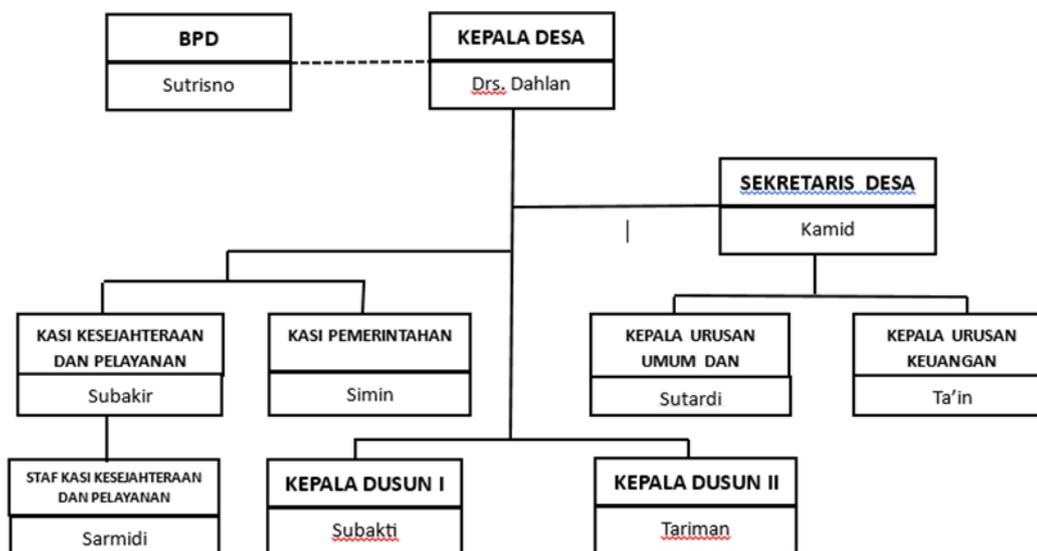
Rukun Tangga (RT). Perangkat Desa Pranti sendiri terdiri 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, 2 Kepala Dusun dan 1 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.

b. Struktur Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa memang mengatur tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peran penting dalam tata kelola desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan. Ketiga kelembagaan ini bekerja secara bersama-sama untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, dengan tetap mengakui dan menghormati asal-usul dan adat istiadat setempat sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik di tingkat lokal.

Desa memiliki dua unsur yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. ia berfungsi untuk menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sebagai check and balance dari roda pemerintahan Desa. BPD memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama dalam tingkatan Desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, dan tokoh agama.

Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Pranti



Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

c. Kondisi Demografis

Berdasarkan keterangan yang diambil dari pihak Desa Pranti serta berdasarkan RPJMDes Desa Pranti, seluruh penduduknya beragama Islam. Desa Pranti yang terdiri dari dua dusun yakni Dusun Pranti Lor dan Dusun Pranti Kidul, memiliki jumlah penduduk total 925 jiwa atau 297 KK. adapun rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Jumlah Penduduk Desa Pranti

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1. | Laki-Laki | 458 |
| 2. | Perempuan | 467 |
| 3. | Kepala Keluarga | 297 |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

d. Sarana dan Prasarana

Pembangunan masyarakat desa semestinya berdampak pada perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang lebih baik. Pemerintah sendiri telah gencar dalam upaya peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia dalam negeri, maka diperlukan juga alat penunjang demi tercapainya tujuan tersebut melalui sarana dan prasarana. Dalam tingkatan Desa sendiri, pemerintah pusat telah mengupayakan peningkatan kualitas SDM seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya prasarana yang mumpuni, masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan makmur.

- Prasarana Kesehatan Desa Pranti

Desa dengan akses kesehatan yang memadai merupakan salah satu variabel penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, Desa Pranti memiliki beberapa prasarana kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4. Prasarana Kesehatan Desa Pranti

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------|---------|
| 1. | Posyandu | 2 unit |
| 2. | Lansia | - |
| 3. | Posbiandu | - |
| 4. | Polindes | 1 unit |
| 5. | Bidan Desa | 1 orang |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

- Prasarana Pendidikan Desa Pranti

Kemudian, Desa Pranti juga memiliki prasarana pendidikan untuk menunjang kualitas hidup masyarakatnya melalui beberapa prasarana sebagai berikut:

Tabel 5. Prasarana Pendidikan Desa Pranti

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1. | Taman Kanak-Kanak / TK | 1 unit |
| 2. | PAUD | 1 unit |
| 3. | SD | 1 unit |
| 4. | SLTP / MTs | - |

| | | |
|----|-----------|--------|
| 5. | SLTA / MA | - |
| 6. | TPA / TPQ | 2 unit |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

- Prasarana Umum Lainnya

Meskipun aspek prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan, prasarana lainnya juga tidak kalah memiliki manfaat penting lainnya. Oleh karena itu, Desa Pranti juga memiliki beberapa prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk barang publik sebagai berikut:

Tabel 6. Prasarana Umum

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1. | Tempat ibadah | 5 unit |
| 2. | Lapangan olahraga | 2 unit |
| 3. | Gedung serba guna | - |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

- i. Pendidikan

Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni. Berdasarkan data yang di catat oleh pemerintah Desa Pranti, adapun tingkat pendidikan masyarakatnya sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pranti

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|----|----------------------------|----------------|
| 1. | Tidak Sekolah / Buta Huruf | - |
| 2. | Tidak Tamat SD / Sederajat | 56 |
| 3. | Tamat SD / Sederajat | 105 |

| | | |
|----|------------------------|-----|
| 4. | Tamat SLTP / Sederajat | 79 |
| 5. | Tamat SLTA / Sederajat | 110 |
| 6. | Tamat D1, D2, D3 | 5 |
| 7. | Sarjana / S-1 | 8 |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

e. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa pranti

- Keadaan Sosial

Desa Pranti memiliki beberapa kegiatan organisasi masyarakat yang menjadi salah satu aset desa untuk dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi dalam proses pembangunan desa pada masyarakat.

- Remaja Masjid

Remaja masjid merupakan sebuah organisasi yang mewadahi remaja muslim dalam upaya memakmurkan Masjid, dengan berorientasi pada aktivitas kemasjidan, keilmuan, keislaman, keremajaan dan keterampilan sehingga anggotanya dapat mengembangkan diri sesuai bakat dan krrativitas merrka di bawah naungan pembinaan pengurus atau ta'mir masjid (Aslati, 2018). Kelompok remaja masjid pada Desa Pranti dapat bermanfaat bagi Desa sebagai sarana penyampaian informasi dalam proses pembangunan desa melalui pemberdayaan pemudanya.

- Karang Taruna

Karang taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dan menjadi wadah atau tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, karang taruna tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk masyarakat terkhusus generasi muda dalam suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas yang setara dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Desa Pranti bukanlah Desa dengan jumlah penduduk terbilang besar dibanding dengan desa lainnya (Sunoto, 2017). Namun, perihal bidang sosial warga Desa Pranti terbilang paguyuban dan saling gotong royong untuk kemudian kembali manfaatnya ke masyarakat.

➤ Jama'ah Yasin

Jamaah Yasinan dapat disebut dengan *the dynamic local group*, yaitu suatu kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan yang bersifat dinamis dan terselenggara pada tingkat RT, RW, dusun/kampung, maupun komunitas tertentu. Selain berfungsi sebagai media pembinaan dan media dakwan, yasinan juga menjadi salah satu bentuk ruang publik dimana masyarakat dapat menerima atau menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan yang ada pada desanya.

➤ Tahlilan

Tahlilan merupakan suatu ritual atau upacara selamatan yang biasa dilakukan sebagian umat Islam untuk memperingati dan mendo'akan orang yang telah meninggal dunia. Biasanya tradisi tahlilan ini dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ketujuh, kemudian dilakukan pada hari ke-40, ke-100, kesatu tahun pertama meninggal dunia, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Kegiatan tahlilan bukanlah sebuah kegiatan yang wajib dilakukan semua orang. Tahlilan menjadi pilihan bebas bagi setiap orang dan keluarga dalam masyarakat yang berkaitan adanya keinginan mendoakan orangtua mereka atau tidak. Kegiatan ini juga tidak mengharuskan sekelompok orang untuk berkumpul di rumah duka, namun juga dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berjamaah dalam satu tempat maupun berpisah tempat.

➤ Kelompok Arisan

Arisan adalah kegiatan sekumpulan orang atau kelompok yang mengumpulkan uang secara teratur pada setiap periode tertentu yang telah disepakati. Arisan menjadi salah satu bentuk kegiatan paguyuban masyarakat agar hubungan antar tetangga, warga, atau desa dapat tetap terjaga. Kelompok yang menjalankan arisan kebanyakan dilakukan oleh gender perempuan yakni para ibu-ibu. Namun, arisan bapak-bapak juga seringkali dapat dijumpai di beberapa wilayah.

➤ Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Pendekatan Posyandu didasarkan pada konsep pelayanan yang dikelola secara terpadu dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. (Departemen Kesehatan RI. 2006). Tujuan dari pelaksanaan kegiatan posyandu yakni untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas.

Posyandu pada Desa Pranti rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Diharapkan dengan terlaksanakannya kegiatan tersebut dapat mencegah peningkatan kematian ibu dan bayi baik saat kehamilan, persalinan, atau pasca kehamilan melalui pemberdayaan Masyarakat.

f. Keadaan Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Pranti memiliki mata pencarian yang bergerak di bidang pertanian. Namun, permasalahan terkait mata pencarian penduduk ialah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat dengan perkembangan penduduk sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan dalam pembangunan desa yakni melakukan usaha perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat dengan cara penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usahanya terkhusus dalam bidang perdagangan.

Desa Pranti sendiri cukup terkenal dengan sebutan Desa penghasil *air legen* yang ada di Kecamatan Sulang. Namun, angka kemiskinan pada Desa ini terbilang masih cukup tinggi masyarakat harus bisa mencari peluang lain yang mampu menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan alam yang terdapat di Desa Pranti terbilang amat mendukung baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain Desa Pranti memiliki letak geografis yang cukup strategis yakni merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 2 kecamatan antara Kecamatan Sulang dan Kecamatan Sumber.

g. Potensi Desa Pranti

- Sumber Daya Alam

Desa Pranti memiliki sumber daya alam seperti lahan kosong, sungai, perkebunan, dan sawah yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. berikut rincian sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Pranti:

Tabel 8. Sumber Daya Alam Desa Pranti

| No | Uraian Sumber Daya Alam (SDA) | Volume | Satuan |
|----|-------------------------------|---------|----------------|
| 1. | Pasar Urug | 500.000 | m ³ |
| 2. | Lahan Tegalan | 41,80 | Ha |
| 3. | Lahan Persawahan | 10,89 | Ha |
| 4. | Sungai | 3.510 | M |
| 5. | Tanaman Perkebunan (Tebu) | 12,02 | Ha |
| 6. | Embung | 2 | Buah |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aspek penting dalam terbentuknya sebuah organisasi atau kelompok. Desa Pranti memiliki beraneka ragam SDM sebagai berikut:

Tabel 9. Sumber Daya Manusia Desa Pranti

| No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------------|--------|--------|
| 1. | Kepala Keluarga | 297 | KK |
| 2. | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 458 | Orang |
| 3. | Jumlah Penduduk Perempuan | 467 | Orang |
| 4. | Lulusan SD / MI | 105 | Orang |
| 5. | Lulusan SLTP / MTS | 79 | Orang |
| 6. | Lulusan SLTA / MA | 110 | Orang |
| 7. | S1 / Diploma | 13 | Orang |
| 8. | Putus Sekolah | - | Orang |

| | | | |
|-----|----------------|-----|-------|
| 9. | Buta Huruf | - | Orang |
| 10. | Petani | 172 | Orang |
| 11. | Pedagang | 18 | Orang |
| 12. | PNS | 5 | Orang |
| 13. | Tukang | 32 | Orang |
| 14. | Guru | 8 | Orang |
| 15. | Bidan/perawat | 1 | Orang |
| 16. | Pensiunan | 1 | Orang |
| 17. | Sopir/Angkutan | 6 | Orang |
| 18. | Buruh | 72 | Orang |
| 19. | Swasta | 30 | Orang |
| | Jumlah | 925 | Orang |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

- Sumber Daya Sosial Budaya

Potensi sumber daya sosial budaya yang dimiliki oleh Desa Pranti yaitu banyaknya lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat seperti:

- Gotong Royong

Gotong royong merupakan salah satu bentuk keanekaragaman budaya Indonesia yang telah mendarah daging menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong memiliki makna bekerja sama. seperti tolong menolong maupun saling bantu membantu dalam suatu komunitas. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Oleh karenanya, dalam kehidupan bermasyarakat sikap gotong royong diperlukan guna menyelesaikan permasalahan dan sebagai bentuk solidaritas antar makhluk sosial.

Masyarakat desa cenderung masih terkenal akan budaya kearifan lokal satu ini. Seperti halnya Desa Pranti yang masih kental akan budaya gotong royong. Hal tersebut dapat tercerminkan melalui kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan di desa, membantu tetangga dalam menyiapkan acara hajatan besar, saling membantu dalam hal pertanian, dan lain sebagainya.

➤ Tradisi Ruwahan

Ruwahan merupakan tradisi dari bentuk amal shaleh untuk orang tua yang telah meninggal dan dilaksanakan menjelang momen Ramadhan setelah Nisfu Sya'ban. Tradisi ini bertujuan untuk saling bermaaf-maafan karena akan dilaksanakannya puasa Ramadhan yang diiringi doa bersama agar diberikan kemudahan serta kesehatan selama melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Masyarakat di desa pada umumnya juga melakukan pembersihan pada makam leluhur sebelum mengadakan nyadran bersama atau ziarah kubur dengan membawa kembang sebagai taburannya.

➤ Bersih Desa (Ruwat Bumi)

Bersih desa atau ruwat bumi atau sedekah bumi atau yang biasa masyarakat Desa Pranti sebut *gas deso* merupakan kegiatan tradisi masyarakat desa yang dilakukan satu kali dalam setahun sebagai bentuk tasyakuran sekaligus agar para petani dan perkebunannya diayomi oleh leluhur. Masyarakat Desa Pranti maupun masyarakat di daerah Kabupaten Rembang umumnya membuat makanan khas daerah yang bernama *dumbeg* dan *tape ketan*. *Dumbeg* merupakan makanan khas tradisional masyarakat Kabupaten Rembang yang terbuat dari tepung beras, gula jawa, santan kelapa dan potongan krambil, kemudian dibungkus menggunakan janur pohon kelapa ataupun janur pohon buah siwalan.

Gambar 5. Makanan Tradisional Dumbeg



Sumber: Google

Sedangkan tape ketan merupakan makanan tradisional yang berasal dari beras ketan dan ragi yang kemudian terfermentasi. Masyarakat Kabupaten Rembang juga terbiasa menyajikan minuman khasnya ketika sedekah bumi yaitu air legen. Desa Pranti termasuk salah satu desa yang terkenal wilayahnya penghasil air legen dan buah siwalan. Selain ciri khas makanannya, pada tradisi ini pemerintah maupun kelompok masyarakat juga sering kali mengadakan acara tontonan untuk warga seperti: ketoprak, wayang kulit, atau musik dangdut.

➤ Gapoktan

Gapoktan atau gabungan kelompok tani adalah sebuah kelompok atau kelembagaan pertanian yang dibentuk dengan tujuan memberikan fasilitas kegiatan-kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengelolaan hasil pertanian. Namun, kelompok tani atau gapoktan di Desa Pranti belum bisa berjalan dengan lancar.

➤ Kelompok Simpan Pinjam

Kelompok simpan pinjam adalah sebuah kelompok atau komunitas yang memiliki kegiatan simpanan dan pinjaman. Program kelompok simpan pinjam ini memiliki suku bunganya yang lebih rendah dari pada bank, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan menunjang perekonomian negara.

Tabel 10. Sumber Daya Sosial Budaya Desa Pranti

| No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------------|--------|--------|
| 1. | Gotong Royong | 1 kali | Bulan |
| 2. | Tradisi Ruwahan | 1 kali | Tahun |
| 3. | Bersih Desa (Ruwat Bumi) | 1 kali | Tahun |
| 4. | Gapoktan | - | - |
| 5. | Kelompok Pengajian | 2 kali | Bulan |

| | | | |
|----|------------------------|--------|-------|
| 6. | Arisan | 1 kali | Bulan |
| 7. | Kelompok Simpan Pinjam | 7 kali | Bulan |
| 8. | Posyandu | 1 kali | Bulan |
| 9. | Karang Taruna | - | - |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

- Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi dalam desa merupakan kegiatan masyarakat dalam upaya mengembangkan sistem ekonomi yang ada di desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Pranti:

Tabel 11. Sumber Daya Ekonomi Desa Pranti

| No | Uraian Sumber Daya Ekonomi | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------|--------|--------|
| 1. | Lahan Pertanian | 10,89 | Ha |
| 2. | Perkebunan | 12,02 | Ha |
| 3. | Sapi | 220 | Ekor |
| 4. | Kambing | 160 | Ekor |
| 5. | Toko | 5 | Buah |
| 6. | Warung | 8 | Buah |
| 7. | Ayam | 625 | Ekor |

Sumber: RPMDes Desa Pranti tahun 2019

BAB IV

PERJUANGAN MASYARAKAT DESA PRANTI MENDAPATKAN AIR BERSIH

A. Kondisi Air Bersih Desa Pranti

Desa Pranti seperti yang telah disinggung sebelumnya merupakan salah satu desa penghasil air legen dan buah siwalan. Berdasarkan sumber portal berita Suara Baru.id menyebutkan bahwa tanaman buah siwalan ini merupakan tanaman langka karena hanya bisa tumbuh pada daerah tertentu dengan iklim kerim dan curah hujan rata-rata 63-117 hari/tahun. Jika kita lihat secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di bagian timur wilayah provinsi Jateng yang berbatasan langsung dengan wilayah provinsi Jatim ini menjadi daerah yang cocok untuk pengembangan tanaman siwalan.

Masyarakat Desa Pranti rata-rata memiliki lahan yang di tanami pohon siwalan yang berada di sepanjang pinggiran lahan pertanian. Jadi, lahan persawahan jika musim hujan akan ditanami tanaman padi, dan jika kemarau dibiarkan tandus. Meskipun demikian, jika musim kemarau datang para petani justru dapat memanen buah siwalan dan air legennya. Karena jika musim hujan datang, petani tak jarang bisa memanen air legen yang berkualitas seperti di musim kemarau. Salah satu masyarakat Desa Pranti bernama Sumiarti menyatakan bahwa masyarakat sekitar memiliki pepatah:

"Nak banyu sat legene mancur, nak banyune kebak legene asat"

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu jika airnya kering maka air legen melimpah, jika airnya melimpah maka air legennya kering. Disini masyarakat memiliki pertanda tersendiri dimana jika stok air baku melimpah, maka air legen yang menjadi salah satu ciri khas Desa Pranti tidak dapat di panen begitupun sebaliknya.

Desa Pranti memiliki dua wilayah utama yakni Pranti Lor dan Pranti Kidul yang di dalamnya terdapat jalur sungai yang terbentang melintasi wilayah Desa Pranti. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ditemukan bahwa Desa Pranti memiliki beberapa sumber mata air guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

1. Sungai

Sungai merupakan air tawar yang bersumber secara alamiah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Permadi (2015) arus air di hulu sungai atau biasa terletak di daerah pegunungan biasanya memiliki arus lebih deras dari pada arus sungai di hilir. Oleh karena itu,

aliran sungai seringkali berliku-liku akibat terjadinya proses pengikisan dan pengendapan di sepanjang sungai. Sungai menjadi sebuah sistem yang bersifat dinamis, dimana kegiatan manusia di sepanjang aliran sungai dapat mempengaruhi kualitas air dari hulu ke hilir. Macam-macam aktivitas di wilayah aliran sungai seperti tempat tinggal penduduk, pertanian, dan industri yang berdampak pada pencemaran air (Diana Sari, 2021).

Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi sungai di Desa Pranti dimana aliran sungai yang membentang sepanjang wilayah Desa telah menjadi sumber mata air bagi masyarakat sejak dulu. Karena, jika masyarakat melakukan penggalian air sumur tidak di temukan adanya mata air yang muncul. Sehingga, air sungai ini menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Desa Pranti sejak dulu. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan langsung oleh informan masyarakat Desa Pranti:

"Nak riyen tiyang mriki nggih sungai niku, mboten wonten sumber air nggih damel bilikan pinggir sungai ngoten niku riyenne. Terus niki wonten embung di damel resepan" (Kata Ibu Yatni Masyarakat Desa Pranti pada tanggal 25 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan salah seorang perangkat desa setempat menyatakan bahwa kondisi air sungai desa pranti dulunya sangat jernih, bahkan tak heran jika banyak warga yang melakukan berbagai aktivitas di sekitaran aliran sungai seperti mencuci baju, mandi, mencuci grabah, dan lain sebagainya. Dulu juga dikatakan bahwasannya kondisi stok air sungai masih cukup dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pranti. Namun, kini berbeda dimana kondisi stok air di sungai ketika memasuki satu bulan kemarau telah habis atau kering.

Gambar 6. Sungai Desa Pranti di Musim Kemarau



Sumber: Foto ribadi eneliti

Gambar 7. Sungai Desa pranti di Awal Musim Hujan



Sumber: Foto Pribadi Peneliti

2. Embung

Salah satu faktor yang menjadi penghambat pendayagunaan pemenuhan air bersih yakni kurangnya ketersediaan sumber air pada musim kemarau. Salah satu upaya untuk mengatasi faktor tersebut dengan cara melakukan upaya konservasi air dengan jalan menyimpang kelebihan limpasan air permukaan ketika hujan dengan menggunakan embung (*small farm reservoir*). Embung berfungsi untuk menampung limpasan permukaan ketika hujan dan dapat memanfaatkannya pada musim kemarau. Kapasitas daya tampung embung sendiri sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti lokasi dan design pembuatan embung (Tarigan, 2008).

"Embung disini ada dua, yang satu paling bulan Mei sudah habis atau kering. Kalau curah hujannya banyak ya segitu bulan Mei sudah habis. Selanjutnya kan pakai embung satunya lagi perkiraan bulan September sudah habis" (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Desa Pranti memiliki dua embung sebagai penampung air hujan guna ketersediaan air di musim kemarau. Namun, ketika memasuki musim

kemarau air embung tersebut habis atau kering sehingga pemerintah mengupayakan mencari bantuan ke pemerintah daerah. Letak lokasi Embung ini berada di RW 01 dan RW 02 yang berfungsi sebagai ketersediaan air baku masyarakat. Untuk pendistribusian air yang berasal dari embung ini melalui SPAM Desa.

Gambar 8. Kondisi Embung RW 02 Desa Pranti di Awal Musim Hujan



Sumber: Dokumentasi penelitian

Gambar 9. Kondisi Embung RW 01 Desa Pranti di Awal Musim Hujan



Sumber: Foto pribadi peneliti

"Pranti sudah ada pengelola air bersih yang ngelola desa. Kemarin kan tahun 2021 dapat bantuan dari Provinsi SPAMDes, pakainya ya itu pengelolaan air sederhana dari sungai dan

embung" (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Selain dua embung yang berada di RW 01 dan RW 02, pada tahun 2023 Desa Pranti mendapatkan bantuan rehabilitasi embung baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang diatas tanah bengkok milik Desa Pranti. Lokasi embung ini berada di dekat embung yang lama pada wilayah RW 02.

Gambar 10. Kondidi Rehabilitasi Embung Desa Pranti di Awal Musim Hujan



Sumber: Foto Pribadi Peneliti

Air bersih yang terdapat di Desa Pranti tak serta merta selalu terpenuhi setiap harinya. Ketika menjelang atau memasuki musim kemarau ketersediaan air di sungai maupun hasil penampungan air hujan di embung kerap kali mengalami kehabisan atau kekeringan. Adapun faktor penyebab kurangnya ketersediaan air bersih di Desa Pranti disebabkan oleh tidak adanya sumber mata air baku. Sumber mata air merupakan suatu tempat atau lokasi dimana air muncuk secara alami dari dalam tanah kemudian membentuk suatu genangan atau aliran yang memudahkan siapa saja untuk mengaksesnya (Tessa, 2023). Sumber mata air menjadi salah satu sumber yang penting dan memiliki peran vital dalam penyediaan cadangan air bersih bagi masyarakat. Kemunculan sumber mata air ini dapat berasal dari berbagai proses seperti infiltrasi air hujan, penyaringan air yang muncul dari bebatuan maupun dari dataran tinggi dan pegunungan.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh PDAM info menyebutkan bahwa jenis sumber air berdasarkan letak dan asalnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu

air permukaan, air angkasa dan air tanah. Pertama, air permukaan yaitu air hujan yang mengalir diatas permukaan bumi akibat tidak terserap kedalam tanah karena susunan tanahnya bersifat rapat sehingga sebagian air yang tergenang mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Contoh bentuk air permukaan yaitu: air sungai, air danau/telaga dan air laut. Kedua, air angkasa yaitu air yang berasal dari langit jatuh ke permukaan bumi. Seperti air hujan, air salju dan air es. Ketiga, air tanah. Menurut Bouwer (1978) air tanah merupakan bagian penting dari siklus hidrologi dan memainkan peran yang signifikan dalam menyokong kehidupan dan kegiatan manusia di berbagai daerah.

"Karena kan sini itu sumber mata airnya kosong gak ada. Mulai saya kecil sampau sekarang ape di bor atek di buat sumur apa aja tetep gak keluar airnya. Dulu ada program dari pemerintah di bor itu sampau ratusan lebih bahkan mata bor itu sampai lebih dalam kalau ga salah makan waktu dua hari dua malam tetep gak ada airnya. Katakan tanahnya itu 60-70 meter ke bawah itu semua udah padas biru. Katane kalau sudah padas biru itu air sumber itu sulit" (Wawancara dengan Ketua PAB Desa pranti Bapak Sutardi pada tanggal 26 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan dari narasumber ketika proses wawancara diketahui bahwa Desa Pranti tidak memiliki sumber mata air yang signifikan. Pernyataan tersebut didukung oleh fakta ketika pengerjaan pengeboran sumur sedalam 60 sampai 70 meter tidak juga mendapatkan sumber mata air namun menemukan jenis tanah padas biru. Saat ini sumber mata air yang ada di Desa Pranti hanya mengandalkan air yang berasal dari sungai dan embung di desa. Namun ketika memasuki musim kemarau dimana hampir tidak ada air hujan yang turun mau tidak mau masyarakat berjuang untuk memperoleh air bersih. Dulu sebelum adanya pralon penghubung jalannya air masuk ke setiap rumah dan program-program dari pemerintah guna pemenuhan hak air bersih terhadap masyarakat, warga Desa Pranti terbiasa melakukan pemenuhan air bersih secara mandiri dengan cara pemanfaatan air sungai secara alami. Ketika musim kemarau terik masyarakat di tahun 1990 an dulu melakukan penggalian atau pemanfaatan air sungai yang paling dalam untuk memperoleh air.

"Dulu nggih nyuwun sewu, semenjak saya masih SD itu gak ada droping air tangki. Airnya ya ngangsu dari pinggir-pinggir kali. Istilahnya sungai yang paling dalam kan masih ada airnya, nah itu diambil. Kejadian itu sekitar tahun 1998-an" (Pernyataan Bapak Sutardi pada 26 Januari 2024).

B. Bentuk Perjuangan Masyarakat dalam Memperoleh Air Bersih

Aristoteles (384-322 SM) seorang tokoh ahli filsafat Yunani kuno menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk politik (*zoon politicon*) dimana hakikat kehidupannya yaitu sosial politik yang saling berinteraksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Plato memiliki gagasan bahwa sebagai bagian dari *zoon politicon*, maka manusia perlu untuk berkumpul dan membentuk sebuah negara dengan tujuan mengekspresikan pemikiran maupun keinginan-keinginan politiknya tersebut.

Namun, realitasnya pemenuhan hak akan air bersih terhadap masyarakat masih dapat dikatakan elum terpenuhi. Kelangkaan air dan terbatasnya ketersediaan air bersih menjadi masalah yang cukup serius bagi kelangsungan hidup manusia. Air menjadi bagian unsur penting dalam kehidupan semua makhluk hidup terutama manusia yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti: minum, memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Helmi (2015) mengadopsi paradigma dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa bentuk hak asasi manusia pemenuhan hak atas air dapat dilakukan melalui paradigma menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 28I ayat (4), maka pemenuhan hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara khususnya pemerintah.

Kristian Stokke (2018) memiliki pandangan kewargaan modern dibentuk melalui empat dimensi salah satunya yaitu Hak. M.J. Smith dan Pangsa (2008) berspekulasi bahwa mutualitas dan ketegangan antara berbagai bentuk hak, seperti kebebasan sipil dan politik individu, serta hak kelompok sosial dan kultural, sangat relevan dalam konteks kewargaan lingkungan. Pendekatan yang seimbang antara memperkuat perlindungan hak-hak individu dan kelompok, sambil mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan lingkungan hidup secara keseluruhan. Selain itu, keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, juga sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang mempromosikan kewargaan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi air bersih pada Desa Pranti yang terbilang cukup memprihatinkan terutama ketika memasuki musim kemarau, membuat masyarakat setempat melakukan beberapa bentuk perjuangan untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bentuk perjuangan masyarakat Desa Pranti dalam pemenuhan haknya atas air bersih dilakukan melalui beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Ngangsu* atau menimba air

Merupakan kegiatan pengambilan air menggunakan ember, gentong, maupun jerigen dari suatu tempat ke tempat yang lain. Istilah *ngangsu* tidak asing di dengar oleh mayoritas masyarakat Jawa karena pada tempo dahulu sebelum era perpipaan masyarakat biasa melakukan distribusi air dengan cara *ngangsu*. *Ngangsu* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk tradisi atau budaya tradisional dimana terjadinya pertemuan antar warga pada saat proses pengambilan air yang menimbulkan dan menambah keakraban warga.

Masyarakat Desa Pranti dahulunya memperoleh air dengan cara *ngangsu* atau memikul dirigen untuk dibawa pulang ke rumah dari bilik pinggiran sungai. Kondisi pemenuhan air bersih masyarakat Desa Pranti sebelum adanya perpipaan yaitu memanfaatkan air sumber aliran sungai. Dimana masyarakat berbondong-bondong *ngangsu* dari sungai ataupun memanfaatkan air di pinggiran sungai guna kebutuhan mencuci ataupun mandi.

"Ketika saya masih kecil pun lah ya sumurnya juga ambil dari pinggiran-pinggiran sungai air dak-dakan gitu. Jadi air resapan dari bibir sungai itu kan ada pasir nah terus dikasih sumur heluk. Dulu warga sini situ semua, terus ada program-program gitu tinggal enak. Dulu ya wis kalau yang laki-laki tukang mikuli dari sungai kemudian perempuan gendong air" (Pernyataan Bapak Sutardi pada 26 Januari 2024).

Kini memasuki era pipanisasi masyarakat tidak perlu mengupayakan *ngangsu* setiap hari seperti jaman dahulu. Namun kenyataannya di era pipanisasi saat ini *ngangsu* masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Pranti jika memasuki kemarau terik yang menyebabkan tidak adanya sumber mata air, tidak mendapatkan atau kehabisan air dari bantuan tangki air, maupun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli tangki air maupun menyalurkan air dengan pihak pengelola air di desa sebelah. Menurut keterangan salah seorang pemuda warga Desa Pranti menyebutkan bahwa sebagian masyarakat mengambil air atau *ngangsu* dari desa sebelah yaitu Desa Bencili.

"Roto-roto mbak, nak wong kene ngangsunek nek sumur Bencili kono" (Wawancara dengan Sutrisno pada 25 Januari 2024)

Gambar 11. Potret Ngangsu



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat berjuang untuk memperoleh air bersih secara mandiri melalui *ngangsu* atau mengambil air dari sumber mata air sebelah Desa Pranti. Berdasarkan teori politik kewarganegaraan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan bagian dari bentuk perjuangan untuk keadilan secara kultural dan sosial. Melalui cara *ngangsu* sebagian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta pengakuan bahwa dimensi keanggotaan dan hak warga negara belum terpenuhi secara maksimal. Dimensi keanggotaan dan hak disini ditemukan bahwa masyarakat yang tidak atau kurang mendapatkan air bersih ketika adanya *dropping* air tangki dari pemerintah yang menyebabkan mereka harus berjuang secara mandiri guna terpenuhinya kebutuhan akan air. Oleh karena itu keadilan kultural dan sosial bagi masyarakat Desa Pranti belum tercapai.

(Kornita, 2020) Berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan air terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat menggunakan strategi SO, yaitu strategi untuk mencapai tujuan kebijakan melalui pemanfaatan kekuatan serta potensi atau peluang yang dimiliki dengan melakukan kerjasama antar stakeholder guna memenuhi kebutuhan

tersebut. Model penyediaan air bersih yang mungkin dapat dilakukan bagi kebutuhan masyarakat dapat melalui Perpipaan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui BUMD PDAM, jaringan non perpipaan melalui program nasional PAMSIMAS dan swadaya masyarakat.

Namun yang menjadi persoalan di Desa Pranti yakni ketika jaringan perpipaan telah disalurkan baik dari pengelola air bersih Desa Pranti dan pihak pengelola air bersih perseorangan nyatanya tidak semua masyarakat mendapatkan aksesnya. Alasannya yakni tingginya harga untuk memasukkan jaringan pipa dari usaha perseorangan membuat masyarakat berfikir dua kali sehingga lebih memilih jalur pipa pihak desa meskipun ketika kekeringan melanda tidak memperoleh akses air bersih. Alhasil jika jalur pipa air dari pihak desa kehabisan air baku, sebagian masyarakat lebih memilih untuk *ngangsu* guna memenuhi kehidupan dalam rumah tangga.

2. Pengelolaan air bersih sederhana

Masyarakat Desa Pranti sejak dulu telah memanfaatkan air dari aliran sungai yang membentang wilayah desa. Jika dulu masih menggunakan cara tradisional yakni melalui *ngangsu* atau memindahkan air dari sungai ke rumah. Kini masyarakat telah menggunakan pipa sebagai alat distribusi pemindahan air baku ke setiap rumah. Pengelolaan air bersih sederhana Desa Pranti dilakukan dengan cara penyedotan air sungai yang kemudian dimasukkan ke dalam kolam penampungan berupa IPAS (instalasi pengelolaan air sederhana). Air sungai yang masuk ke dalam IPAS akan melalui proses filter sehingga baru bisa disalurkan ke pipa masing-masing rumah warga.

"Kalau dulu tahun 2008 pas pengelolaan pertama itu bantuan dari kabupaten bantuan perdesaan desa tertinggal. Air bakunya dulu kan dari sumur-sumur bor karena Pranti sini ngguh nyuwun sewu total keseluruhan wilayah sini kan dilingkari sungai. Bahkan untuk sumhr bor atau deker sumbernya gantung. Paling sumur deker airnya keluar tapi kalau kemarau sedikit juga engga. Dulunya itu kan di luar Desa Pranti terus akhirnya ditarik ke tower. Cuma dulunya hanya 30-an SR itu program pertama tapi masih mencukupi. Kalau sekarang hampir setiap rumah sudah memiliki SR, ada bantuan lah dari Provinsi. Jadi salinf berkesinambungan gitu loh mba antara program satu sama program yang lain jadi alat umum. Awalnya cuma sedikit

kayak RW 01 tadi kan dari Pak Mali cuma sebagian, di tahun 2008 juga cuma sebagian terus ada tambahan saling berkesinambungan sehingga sampai sekarang menyeluruh" (Wawancara dengan Ketua PAB Desa pranti Bapak Sutardi pada tanggal 26 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan air bersih sederhana di Desa Pranti berawal dari inisiatif perseorangan bersama swadaya masyarakat. Disini peran masyarakat saling gotong-royong untuk membuat sistem pengelolaan air sederhana dengan pembuatan embung di wilayah RW 01 diatas tanah bengkok desa dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan air masyarakat desa. Disebutkan bahwa pada tahun 2008 pengelolaan air bersih hanya ditujukan ke beberapa rumah warga di wilyah RW 01 dan masyarakat lainnya berjuang secara mandiri untuk pemindahan air sungai ke rumah warga.

"Sekitar tahun 2013 itu ada embung dari pak malik, lah itu plus tambahan pengelolaan air bersihnya. Tapi cuma sedikit khusus RW 01" (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Desa Pranti membangun embung kedua yang berasal dari anggaran tahun 2013 bersama dengan swadaya masyarakat. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah Desa Pranti berhasil mendapatkan bantuan pengadaan air bersih dari anggaran Pemerintah Provinsi yang berwujud Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proses pengelolaan air bersih disini melalui beberapa tahap seperti hasil adaptasi wawancara dengan ketua PAB Desa Pranti. Terkait proses pengairannya sendiri bermula dari proses pengambilan air sungai atau embung, kemudian masuk ke ipas untuk pemfilteran air, lalu dialirkan menuju tandon yang telah disediakan di setiap sudut wilayah desa baru dapat dialirkan ke setiap rumah warga.

"Desa Pranti memiliki 2 tandon di selatan, di utara ada 4 tandon jadi total 6 tandon. Jadi prosesnya air sungai atau embung masuk kipas langsung masuk ke tandon itu, nahh kalau tandon itu langsung masuk ke rumah-rumah. Lah sini pun ipasnya terkendala di air bakunya. Semisal kemarau panjang embung habis, sungai katakanlah kering. Jadi, dasar sungainya itu tidak ada (air)." (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Gambar 12. penampungan Air Bersih dari Embung Pranti Lor dan Pranti Kiduli



Sumber: Dokumentasi penelitian

Kemudian pembuatan embung yang berfungsi untuk menampung limpasan permukaan ketika hujan. Pembuatan embung di Desa Pranti dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2008, 2021, dan 2023 rehabilitasi embung yang dibangun pada tahun 2021. Di tahun 2021 bersamaan dengan pembangunan embung kedua, Pemerintah Desa Pranti mendapatkan bantuan dari anggaran Provinsi berupa infrastruktur pengelolaan air bersih yang bernama Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya.

Gambar 13. SPAM Perdesaan Padat Karya Desa Pranti



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan satu kesatuan dari sarana dan prasarana penyediaan air minum yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. SPAM memiliki 2 jenis yang meliputi : *Pertama*, SPAM jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. SPAM jaringan perpipaan ini ditujukan untuk menjamin kepastian kualitas dan kuantitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum. *Kedua*, SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengelola seluruh proses penyediaan air minum kepada masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang mencakup perencanaan, pengelolaan sumber air baku, teknologi instalasi pengolahan air, transmisi air olahan, hingga distribusi air minum kepada masyarakat atau daerah pelayanan. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam sistem SPAM:

- Perencanaan Sumber Air Baku: Tahap ini melibatkan identifikasi dan perencanaan terhadap sumber-sumber air baku yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Ini mencakup penilaian terhadap kuantitas dan kualitas air serta strategi untuk memastikan pasokan air yang memadai dan berkualitas.
- Transmisi Air Baku: Air baku yang telah dipilih dari sumber-sumber tersebut kemudian ditransmisikan dari intake (lokasi di mana air baku diambil) ke instalasi pengelolaan air (IPA) untuk proses pengolahan lebih lanjut.
- Instalasi Pengelolaan Air (IPA): IPA merupakan tempat di mana air baku diolah dan diproses menjadi air minum yang layak konsumsi. Teknologi instalasi pengelolaan air harus efektif dari segi kinerja dan biaya untuk memastikan air yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan kualitas.
- Transmisi Air Olahan: Setelah melalui proses pengolahan di IPA, air minum kemudian ditransmisikan dari lokasi IPA ke reservoir (offtake), di mana air tersebut akan disimpan sebelum didistribusikan lebih lanjut.
- Distribusi Air Minum: Tahap terakhir adalah distribusi air minum kepada masyarakat atau daerah pelayanan. Air minum yang telah

diolah dan disimpan di reservoir didistribusikan melalui jaringan pipa atau sistem distribusi lainnya ke rumah-rumah, bangunan, atau daerah pelayanan lainnya.

Melalui implementasi sistem SPAM yang baik, diharapkan dapat tercipta penyediaan air minum yang aman, terjamin kualitasnya, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ini menjadi kunci dalam memastikan akses masyarakat terhadap air minum yang layak konsumsi demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. terkait teknis dan administrasi yang berkaitan dengan proses penyediaan air minum dimasukkan dalam sistem pengelolaan SPAM.

Desa Pranti menjadi salah satu desa yang mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2021 untuk membangun SPAM Perdesaan Padat Karya yang dikelola oleh kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (KP SPAM) "Tirta Lestari". SPAM Perdesaan tersebut menjadi salah satu sumber mata air guna memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Desa Pranti. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Pranti Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM) "Tirta Lestari" Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya Desa Pranti, menyebutkan bahwa Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM) bertugas sebagai berikut:

- a) Menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih di lingkungan masyarakat.
- b) Melayani pemerataan dan mrningkatnya mutu pelayanan air bersih kepada masyarakat secara lebih luas;
- c) Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih secara efektif dan efesien (tepat dan berguna);
- d) Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun;
- e) Sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih.

Tabel 12. Struktur Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum

| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|----|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Ketua | Sutardi | Rt. 01 Rw.01 |
| 2. | Sekretaris | Retno Lestari | Rt.03 Rw. 02 |
| 3. | Bendahara | Nur Anisa Trisanti | Rt. 03 Rw. 01 |
| 4. | Seksi Operasional Pemeliharaan | 1. Tariman | Rt. 04 Rw. 02 |
| | | 2. Lasmin | Rt. 01 Rw.01 |

Sumber: SK Kepala Desa Pranti tentang Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM) "Tirta Lestari"

Dalam proses pengelolaannya, SPAM Desa Pranti mengambil sumber air baku dari sungai dan 2 embung yang dilakukan sesuai dengan jadwalnya.

"Dari RW 01 dan RW 02 itu beda, kalau dari RW 01 itu air bakunya dari embung dan air sungai, kalau RW 02 itu air sungai saja. Kalau musim kemarau IPAS ini dipakai 2 RW biasanya kan gitu. Untuk pengelolaannya biasanya gini, ada penarikan itu biasanya penarikan tagihan di satu lokasi RT satu penagihan. Kalau perlengkapan ada kerusakan di daerah berarti di lokasi lingkungan RT itu tanggungjawab RT. Setiap RT melaporkan kerusakan ini-ini, dibenahi ini-ini terus setelah itu sekalian melaporkan hasil meteran. Disini meteran kan Rp. 3.000/meter. Lah nanti keseluruhan setiap RT berapa ratus terus dilaporkan ke pengurus. Kerusakan-kerusakan kisaran menghabiskan berapa, listrik berapa, kerusakan pralon berapa, nanti terus masuk katakan honor lah tapi kan dapat honor masih sisa berapa. Kadang ya ada lebih kadang ya kalau ada kerusakan berat kadang sampai minus" (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

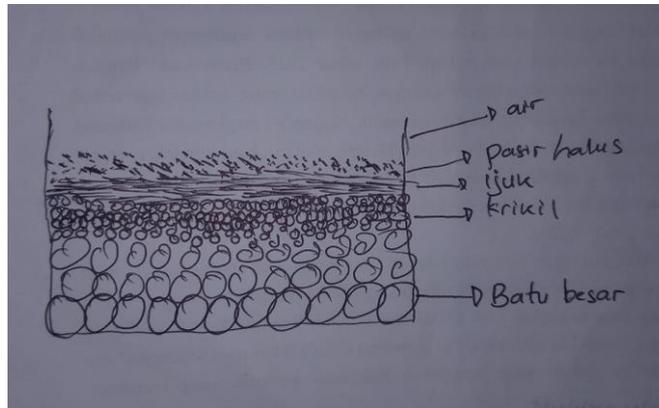
Teknis dalam pengelolaan air bersih SPAM Perdesaan Padat Karya milik Desa Pranti memiliki pengelola di setiap RT. Tugas dari pengelola di RT tersebut yaitu melakukan penarikan beban biaya air bulanan ke masyarakat serta mengecek dan bertanggung jawab atas kerusakan pipa di wilayah tersebut. Kemudian, dari pengurus tingkat RT akan melaporkan ke kelompok pengurus Desa Pranti. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna SPAM tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000/meter. Menurut keterangan beliau juga disebutkan bahwa jika

ada uang yang lebih dari hasil beban operasional tadi, akan dianggarkan untuk memberikan gaji kepada kelompok pengelola air bersih.

Kendala dari pengelolaan SPAM Perdesaan Padat Karya ini, menurut keterangan Sekretaris Desa Bapak Kamid bahwa kendala utamanya di air baku dan resapan air yang kurang sehingga perlu peningkatan. Instalasi pengelolaan air sederhana (IPAS) di Desa Pranti hanya mengalami satu kali pemfilteran. Sehingga dapat menyebabkan kualitas air baku yang keruh atau kurang jernih. Beliau juga menambahkan perlunya ada peningkatan jumlah IPAS ke dalam beberapa tahap pemfilteran agar kualitas air yang dihasilkan lebih jernih.

"Kendalanya ya air baku angger kekeringan kemarau panjang resapannya kurang perlu peningkatan, coro filter iku masih kurang. Berarti kan gini air bakunya kan keruh, berarti kalau dioperasikan hasil dari IPAS kurang maksimal atau kurang jernih. Itu kan perlu penambahan IPAS itu tadi. IPAS itu pengelolaan air sederhana membuat resapan sendiri seperti pasir, batu, kerikil. Mulai batu besar kecil-kecil sampai pasir, jadi itu lapisan-lapisannya. Dari air sungai langsung di resap itu menjadi lebih jernih. Kendalanya itu tadi, air bakunya keruh nanti hasilnya kurang maksimal. Tapu kalau air bakunya jernih hasilnya bagus mbak. Minimal kan gini. ada tambahan lagi, pertama masuk resapan satu. masuk resapan kedua, kalau ada masuk resapan ketiga. Airnya nanti kan jadi lebih bagus. Cuma ini kan istilahnya hanya satu petak resapan. Nanti kan minimal ada dua, yang pertama agak kasarlah istilahnya setengah jadu, nanti resapan akhir kan jadi lebih jernih" (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Gambar 14. Ilustrasi Instalasi Pengelolaan Air Sederhana (IPAS)



Sumber : Hasil observasi dan wawancara penelitian

Dampak dari kurang bersihnya air yang diperoleh masyarakat pelanggan SPAM juga dirasakan oleh masyarakat seperti wawancara dibawah ini. Hasil pemfilteran air ini bergantung pada kualitas air di sungai dan embung dimana saat keruh maka air yang dihasilkan SPAM akan sedikit keruh. Namun, jika air bakunya cukup jernih, maka air yang dihasilkan IPAS juga jernih.

"Resapan air masih perlu dibenahi, masih keruh coro kaline banjir butek niku mbak teseh keruh. Dadi perlu dari pihak desa respannya dibenahi. Tapi kalau dudah beralih ke embung kidul itu resapannya sudah jernih, resapannya lebih baik" (Wawancara dengan Bu Yati warga Desa Pranti pada 25 Januari 2024).

Bencana kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Rembang biasanya terjadi akibat musim kemarau yang panjang dan sumber air yang mulai habis karena belum adanya curah hujan. BPBD Kabupaten Rembang telah melakukan upaya edukasi kebencanaan terdapat pemerintah desa di beberapa wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, seperti kasus kekeringan yang terjadi di Desa Pranti hampir setiap tahun itu dapat diatasi kembali dengan cara penambahan embung atau dapat membuat kebijakan terkait efektivitas penggunaan sebelum masanya.

"Tanggung jawan bersama itu artinya kalau desa sudah teratasi disana berarti kan kembali ke edukasi. Ada edukasi bencana, bisa jadi desa salah penanganannya. Arti salah bukan berarti

tidak tau prediksi kebutuhan di desa. Sebenarnya yang kekeringan benerapa, misal itu berkaitan dengan anggaran semisal 100 KK dengan 200 jiwa sekian. Mungkin menganggarkannya mungkin hanya sekian. Nah itu berarti dia salah dalam hak mitigasi bencana. Jadi kadang desa itu seperti Pranti biasanya dua embung ini cukup musim kemarau sampai satu bulan. Kemarin itu kemarau masih tiga bulan sudah habis. Artinya dia salah prediksi dalam kegiatan. Nah itu sendiri, kami biasa artinya mengedukasi mereka. Berarti alternatif berikutnya dapat menambah embung lagi atau paling tidak efektivitas penggunaannya sebelum masanya" (Wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Rembang Bapak Puji Widodo pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh Kelompok Pengelola (KP) SPAM di Desa Pranti masih mengalami beberapa kendala yaitu air baku dan kurangnya resapan air yang mumpuni. Sungai merupakan wadah atau tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan yang mengalir secara grafitasi menuju ke tempat yang lebih rendah (Asdak, C., 1995). Baik buruknya kualitas air sungai disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Sungai (Ibisch, dkk, 2009). Jika aktifitas tersebut diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam melestarikan lingkungan sungai, maka kualitas air sungai relatif baik. Namun sebaliknya, jika tanpa diimbangi kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan kurangnya partisipasi aktif dari mereka maka kualitas air sungai akan menjadi buruk. Kemudian butuknya kualitas air sungai dapat berdampak pada menurunnya jumlah biota sungai dan akan menurunkan kualitas air sungai di bagian hilir yang akan bermuara di laut (Yogafanny, 2015).

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pranti dalam menangani permasalahan kondisi air bersih yang ada di Desa Pranti khususnya pada SPAM telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pranti tahun 2024 sebagai berikut: Pertama, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sederhana (IPAS) dengan tujuan agar kualitas air bersih memadai. Kedua, Rehabilitasi embung milik Desa yang dikarenakan tebing embung yang masih tanah. Ketiga, pembangunan bronjong sungai yang dikarenakan jalan utara IPAS tanah

ambles. Keempat, rehabilitasi cek dam sungai karena adanya sayap cek dam yang longsor.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan yang dilakukan ke Sekretaris Desa Pranti pada 21 April 2024 diketahui bahwa masyarakat perlu membayar biaya diawal penyaluran PAB Desa Pranti sebesar Rp. 500.000 ribu dan beban operasional Rp. 3.000/meter. Kemudian setelah adanya program SPAM Perdesaan Padat Karya dibangun, maka bagi masyarakat yang memasukkan akses air bersih setelahnya tidak akan dikenakan biaya awal akan tetapi cukup membayar beban operasional sebesar Rp. 3.000 ribu. Data tersebut didukung oleh hasil observasi dan wawancara selama penelitian dengan masyarakat. Disebutkan bahwa:

"Mriki biyen masukno banyu awalan bayar Rp. 500.000 mbak, terus bar niku bayar Rp.3.000 meter perbulan" (wawancara dengan masyarakat Desa Pranti pada 04 November 2023).

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat bersama pemerintah desa terkhusus melakukan kolaborasi dalam upaya pemenuhan air bersih. Pengelolaan air bersih sederhana yang diinisiatif dari sekelompok masyarakat secara swadaya di dukung dengan kekuatan yang dimiliki pihak pemerintah Desa. Pengelolaan air bersih sederhana berawal dari pemanfaatan air di pinggir sungai yang dibuat menjadi belik. Masyarakat Desa Pranti dipersilahkan untuk mengambil air jika memperlukannya. Kemudian seiring berjalannya waktu pengelolaan air bersih di Desa Pranti mendapatkan bantuan sedikit demi sedikit seperti pembuatan embung sampai dengan pengelolaan SPAM Perdesaan Padat Karya. Melihat dari dimensi kewargaan yang di angkat oleh Kristian Stokke (2018) kondisi ini disebut bagian dari dimensi status legal dan hak. Kewargaan status legal menyebutkan adanya hubungan kontraktual antara individu dengan negara sehingga memunculkan hak dan kewajiban. Dalam kasus ini, inisiatif perjuangan masyarakat yang dilakukan secara swadaya dapat menimbulkan adanya hak serta menarik keterlibatan pemerintah untuk memenuhi hak atas air bersih.

(Banu Adhibaswara, 2011) juga melakukan penelitian serupa dengan sistem pengelolaan sederhana di Desa Pranti. Menurutnya mustahil bagi negara seperti Indonesia jika mengalami kekurangan air bersih mengingat Indonesia terletak di daerah tropis dengan potensi yang besar akan sumber air, baik alami ataupun buatan. Namun kendala yang tengah dihadapi oleh Indonesia yaitu sistem pengelolaan dan penyaluran

air bersih. Pemanfaatan sumber mata air berupa langsung maupun air sungai dapat digunakan atau dikelola sehingga bisa didistribusikan ke masyarakat setempat. Untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam pengelolaan air bersih perlu diterapkan metode dan penggunaan material yang sederhana, kuat, ekonomis, dan perawatan yang mudah. Sedangkan sumber mata air dapat memanfaatkan air terdekat dan mudah dijangkau yaitu aliran sungai.

3. Mengajukan proposal bantuan droping air bersih ke Pemerintah Kabupaten Rembang dan CSR (Corporate Social Responsibility).

Kegiatan pengajuan proposal bantuan ke instansi pemerintah maupun CSR dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih ketika persediaan air baku di desa telah habis terutama di musim kemarau panjang. Desa Pranti menjadi salah satu dari sekian banyak desa di kabupaten Rembang yang sering terkena bencana kekeringan setiap tahunnya. Seperti pada bulan Agustus tahun 2023 kemarin, masyarakat dan pemerintah sudah saling bergerak untuk mengajukan proposal bantuan air bersih ke instansi maupun CSR.

Dari beberapa keterangan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menyebutkan bahwa ada juga beberapa masyarakat yang berjuang atau mengupayakan mengajukan permohonan bantuan air bersih ke tempat kerjanya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Kuntari yang merupakan anggota dari petugas pemadam kebakaran kabupaten Rembang yang mengajukan permohonan air ke kantornya secara pribadi.

"Kalau masyarakat sini kadang ya ada juga ngajuin sendiri ke tempat kerjanya mbak. Kayak saya kemarin juga mengajukan proposal air bersih ke kantor saya buat masyarakat wilayah sini aja (RT beliau)" (Wawancara dengan masyarakat Desa Pranti Bapak Kuntari pada 04 November 2023).

Beberapa ibu-ibu yang ikut mendengarkan wawancara kami juga menambahkan bahwa ada juga masyarakat yang mengajukan permohonan air bersih ke beberapa caleg ataupun partai. Mengingat bahwa tahun 2024 merupakan tahun pemilu.

"Winginane juga ada mbak tetangga saya yang ngajuin bantuan air ke partai, mbuh partai opo gitu" (Wawancara bersama masyarakat Desa Pranti Ibu Tarni pada 04 November 2023).

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan pihak pemerintah Desa Pranti untuk menanyakan pertanyaan yang sama pula terkait pengajuan permohonan bantuan air bersih bagi masyarakat.

"Tapi nggih nyuwun sewu kalau sini air bakunta asal sungai itu, ya ada air e dan embung lancar-lancar saja. Tapi nak pas kemarau panjang nggih nggak ada katakan cukup sementara. Sepertu kemarin bulan September 2023 awal sudah tutup sementara karena air embuh sudah habis. Kalau curah hujannya banyaj biasanya tidak pengajuan, tapi kalau Pranti sering pengajuan malah hampir setiap tahun pengajuan". (Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Dari sudut pandang pemerintah Desa Pranti menyebutkan pengajuan proposal bantuan air bersih biasanya diitujukan kepada pemerintah kabupaten yaitu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PDAM. Kepada BPBD sekretaris desa menyebutkan bahwa pengajuan biasanya dilakukan di bulan agustus. untuk teknis penyaluran akan difasilitasi oleh BPBD ke masyarakat Desa Pranti.

"Pengajuan ke BPBD sedangkan CSR itu hubungannya dengan BPBD ke PDAM. Jadi desa hanya menerima bantuan air. Untuk tahun kemarin sini (pranti) mengajukan proposal bantuan air untuk sekitar 960 jiwa atau 320 KK" (Wawancara melalui telfon kepada Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada 21 April 2024).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pengajuan bantuan air bersih ke Pemerintah Kabupaten diperuntukkan hampir seluruh masyarakat desa. Pemerintah melakukan pengajuan ke BPBD kemudian dari BPBD akan memproses pendistribusian air bersih selama penanganan bencana kekeringan.

"Sudah menjadi tupoksi kami secara kelembagaan jika terjadi bencana. Mulai dari pra, saat, dan pasca sudah menjadu tugas dan kewenangan BPBD. Jadu kami dari BPBD itu dasar distribusinya berdasarkan pada permohonan desa. Disana kan ada keterangan di permohonan yang terdampak berapa KK, berapa jiwa dan diwilayah rt mana ity akan dihitung. Karena kalau beban bencana itu sesuai dengan SOP BNPB itu perorang

kebutuhannya terjadi bencana itu sekitar 6 sampai 8 liter. Itu kita hitung istilahnya kaji cepat, oh itu kebutuhannya berapa to kalau terjadi bencana kekeringan. Lah itu nanti bisa menjadu tanggungjawab bersana itu tadi dari Pemerintah Desa, masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, termasuk sekarang ketambahan akademisi" (Wawancara dengan kepala bidang kedaruratan & logistik BPBD Kabupaten Rembang Bapak Puji Widodo pada 24 Januari 2024).

Gambar 15. Daftar Laporan Distribusi Air Bersih dalam Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Rembang Tahun 2013

| No. | Distrik | Terdampak | KK | Jiwa | Total (Liter dan KK) |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------------------|
| Distrik Agustus | | | | | |
| 9 Desa di 7 Kecamatan | | | | | |
| 1 | Sukorejo | Sukoharjo | 368 | 1.093 | 1.111.000 |
| 2 | Warganegara | Panenu | 398 | 2.207 | 386.000 |
| 3 | Kalirejo | Panenu | 397 | 878 | 1.000.000 |
| 4 | Kalirejo | Panenu | 641 | 1.930 | 183.000 |
| 5 | Kendalrejo | Lanum | 150 | 270 | 413.000 |
| 6 | Wiroso | Kalirejo | 150 | 540 | 253.000 |
| 7 | Wiroso | Kalirejo | 150 | 270 | 191.000 |
| 8 | Panenu | Sidarejo | 228 | 361 | 153.000 |
| 9 | Tempurejo | Sidarejo | 210 | 656 | 150.000 |
| Distrik September | | | | | |
| 10 Desa di 13 Kecamatan | | | | | |
| 10 | Mengrove | Sidarejo | 150 | 670 | 10.000 |
| 11 | Panenu | Panenu | 128 | 240 | 118.000 |
| 12 | Giridadi | Lanum | 151 | 410 | 180.000 |
| 13 | Kalirejo | Lanum | 492 | 1.108 | 253.000 |
| 14 | Kendalrejo | Panenu | 150 | 270 | 253.000 |

Sumber: kantor BPBD Kab. Rembang

Berdasarkan hasil laporan dari BPBD Kabupaten Rembang, diketahui bahwa pelaksanaan penanganan bencana kekeringan melalui distribusi air telah dilaksanakan pada 11 Agustus sampai 4 Desember 2023. BPBD Kabupaten Rembang berkolaborasi dengan Ormas/CSR/lembaga lain dengan melakukan distribusi air bersih ke 85 desa terdampak kekeringan di 14 kecamatan yang telah mengirimkan permohonan bantuan air bersih ke kantor BPBD Kabupateb Rembang melalui surat permohonan atau laporan ke call center BPBD Kabupaten Rembang. Total keseluruhan dropping air bersih yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Rembang sebanyak 9.023.400 liter atau 1.805 tangki air bersih. Adapun penerima manfaat dari distribusi air bersih selama penanganan bencana kekeringan di tahun 2023 mencapai 16.301 KK dengab 45.647 jiwa. Adapun total rekapan distribusi air bersih sejak bulan September sampai Desember

tahun 2023 yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Rembang ke masyarakat Desa Pranti sebanyak 355.000 liter dengan rincian 328 KK dan 961 jiwa terdampak.

"Salah satu penanganan bencana dengan melibatkan dunia usaha, nah nanti dunia usaha akan merapat atau berkolaborasi dengan BPBD. Karena kan komandonya itu BPBD, jadi daei mereka bersama kita bekerjasama menangani. Jadi ora terus CSR gak ada itu ndak, jadi kami mengirim surat dasar dari SK ini Rembang telah mengalami status bencana kekeringan status siaga. Dunia usaha untuk ikut terlibat dalam rangka penanganan bencana. Untuk CSR biasanya ya lembaga-lembaga yang berbadan hukum, kalau tidak yang biasanya kami tau persis oh PT ini dunia usaha ini. Organisasi masyarakat juga ada (ikut memberikan bantuan) kayak kelompok pengajian, kelompok greja, kelompok profesi-profesi juga ada" (Wawancara dengan kepala bidang kedaruratan & logistik BPBD Kabupaten Rembang Bapak Puji Widodo pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari wawancara ke Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik diketahui bahwa dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Rembang terutama bencana kekeringan, pemerintah daerah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti CSR, ormas, maupun lembaga lain. CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari hasil kegiatan bisnisnya seperti masalah limbah, polusi, sampai dengan keamanan. Dasar peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertulis pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas. tujuan dari program CSR yaitu sebagai bentuk kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Gambar 16. Dropping Air Bersih ke Masyarakat

Bagian 1



Sumber: Dokumentasi penelitian

Dokumentasi bagian 2



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dan pemerintah Desa saling berjuang untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat Desa Pranti. Melalui gerakan yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan bantuan air bersih ke beberapa CSR, lembaga, maupun komunitas lain menunjukkan adanya semangat perjuangan. Disini juga diketahui bahwa BPBD Kabupaten Rembang menjadi wadah dari bentuk perjuangan masyarakat mendapatkan air bersih. BPBD sendiri memiliki tugas dan kewenangan dalam keadaan pra, saat dan pasca bencana alam terkhusus dalam

konteks kekeringan air bersih. BPBD Kabupaten Rembang juga melakukan kolaborasi dengan beberapa CSR/lembaga/ormas untuk melakukan pendistribusian air bersih. Gerakan-gerakan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder membuahkan hasil dengan tercapainya pemenuhan air bersih untuk masyarakat Desa Pranti terkhusus ketika bencana kekeringan melanda di musim kemarau.

4. Membeli air bersih melalui perantara air (water broker)

Kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rembang masih dirasakan oleh warga. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus berupaya mendistribusikan air bersih sesuai permohonan bantuan yang diajukan oleh pemerintah desa terkait. Meskipun upaya pendistribusian air bersih telah dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat masih melakukan perjuangan mendapatkan air bersih dengan cara membeli air melalui perantara air (water broker). Adapun bentuk alat perjuangannya sebagai berikut:

- a. Membeli saluran air bersih dari Pengelola Air Bersih (PAB) milik warga Desa Bogorame.

Kebutuhan air bersih dalam kehidupan makhluk hidup terutama dalam pemenuhan air bagi kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah ada habisnya. Air menjadi salah satu barang yang tidak akan pernah habis permintaannya. Dalam upaya pemenuhan air bersih, masyarakat Desa Pranti memiliki beberapa upaya dalam perjuangan mendapatkannya. Salah satu upaya perjuangan tersebut yakni melalui pembelian air bersih dari sektor pengelola air bersih yang ada di sekitar lingkungan mereka. Masyarakat Desa Pranti memiliki dua pilihan pengelolaan air bersih yaitu pengelola air bersih SPAM Perdesaan Padat Karya yang dikelola oleh masyarakat Desa Pranti melalui pihak desa dan pengelola air bersih yang dikelola oleh milik perseorangan Pak Budi masyarakat Desa Bogorame.

"Masyarakat sini kadang niku duwe desa isih lebokke liyo desa. Sik lebokno liyo desa iki diunekno nak pas kemarau tok, kalau musim hujan pakainya yang daru desa" (Wawancara dengan masyarakat RW.01 salah satu pengguna PAB Pak Budi pada 26 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat menggunakan dua sumber PAB baik dari Desa Pranti sendiri maupun milik seorang warga Desa Bogorame. Menurut keterangan beliau, keluarga beliau memilih dua sumber PAB dikarenakan pada musim kemarau PAB milik desa mengalami kemacetan karena tidak adanya sumber air baku. Sehingga beliau memilih menjadi pelanggan pula di PAB milik Pak Budi untuk dinyalakan ketika musim kemarau tiba. Diketahui juga bahwa ketika PAB tersebut tidak digunakan maka pelanggan hanya perlu membayar beban operasional bulanan seharga beban permeter. Semisal ketika tidak menggunakan air PAB milik Desa maka pelanggan hanya perlu membayar iuran operasional sebesar Rp. 3.000/bulan, kemudian jika tidak menyalakan atau menggunakan air milik PAB milik Pak Budi dalam sebulan maka hanya perlu membayar beban operasional ke penyelenggara sebanyak Rp. 5.000/bulan.

"yaaa.. adanya PAB dari beliau juga alhamdulillah bisa membantu akses air bersih masyarakat sini. Tapi ya gitu mbak tidak semua masyarakat nyalur disana, hanya yang mau-mau saja. Rata-rata masyarakat sini lebih banyak nyalur SPAM desa karena kan lebih murah gitu"
(Wawancara dengan Sekretaris Desa pranti Bapak Kamid pada tanggal 26 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah Desa Pranti merasa terbantu dengan adanya PAB milik Pak Budi yang dapat di akses oleh sebagian masyarakatnya. Beliau juga mengatakan bahwa hanya beberapa masyarakat saja yang membeli saluran air PAB milik Pak Budi, selebihnya mayoritas hampir seluruh masyarakatnya menyalur pada SPAM Perdesaan milik Desa Pranti karena harga air permeternya yang lebih murah yaitu Rp. 3.000/meter.

Gambar 17. Meteran PAB Milik Pak Budi



Sumber: Dokumentasi penelitian

"Masyarakat sini kadang ono sik jupuk kadang ditawari banyune seko deso lio, pengelolane deso Bogorame jadi kene ngambil dari situ tapi cuma orang tertentu. Soale masyarakat sini bayare akih permetere sudah Rp. 5.000 dan sekali masuk 2 juta. Coro masyarakat kene nak wes duwe banyu seko desane nak gak terah ngemenno gak lebokno yo iku nyagerno seko desane dewe. Desa cuma bayar Rp. 3.000 permeter lah iku Rp. 5.000 permeter hampir dua kali lipat perbulan. Normale sak keluarga $3.000 \times 7 \text{ meter} = 21.000$ nak $5.000 \times 7 \text{ meter} = 35.000$. Masyarakat sik keadaane kurang mampu nggih mikir-mikir nak gak terah ngemenni seko deso liyo" (wawancara dengan Masyarakat Bu Yatni pada 25 Januari 2024).

Sebagian masyarakat Desa Pranti memilih menyalurkan air dari PAB milik Pak Budi dikarenakan air bakunya yang selalu tersedia hampir tidak mengalami kemacetan. Namun, masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang lebih jika menjadi pelanggan dari PAB tersebut dengan kisaran biaya awal 2 juta rupiah dan biaya operasional Rp. 5.000 permeter.

Pengelolaan air bersih tersebut dimiliki oleh Bapak Budi salah seorang warga Desa Bogorame. Menurut keterangan dari beberapa responden diketahui bahwa sumber air bersih tersebut berasal dari embung milik Pak Budi pribadi yang terletak di tanah pribadi beliau pada Desa Landoh. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara juga ditemukan bahwa air embung milik Pak Budi tersebut memiliki kondisi mata air yang cukup baik dimana ketika musim kemarau masih memiliki air baku yang cukup untuk dialirkan ke para pengguna PAB. Namun, ketika memasuki kemarau panjang seperti pada tahun 2023 kemarin akibat adanya el nino, aliran debit air dari embung Pak tidak selancar seperti biasanya. Akibatnya terjadi giliran dalam penyaluran air bersih mengingat banyaknya pengguna aliran PAB.

Gambar 18. Embung Pribadi Milik Pak Budi



Sumber: Dokumentasi penelitian

"Sumberane gede nek kono. Nak embung kene gak ngatasi mbak wayah kekeringan tenan. Lagek bulan opo mpun telas, kalau dari embung landoh airnya lancar nggih airnya bening bisa buat masak, nyuci, mandi. Tapu kalau minum rata-rata sini pakai galon" (Wawancara dengan Ibu Yati masyarakat Desa Pranti RW. 01 pada 26 Maret 2024).

Sumber gambar diatas diambil ketika musim kemarau pada bulan Desember 2024. Ketika hari-hari biasa kondisi

embung tersebut penuh sampai keatas dengan kondisi air yang jernih. Selaras dengan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa air dari sumber embung tersebut jernih bahkan bisa digunakan untuk memasak. Berbeda dengan kondisi air pada PAB Desa Pranti yang hanya digunakan untuk keperluan mencuci, mandi, dan minum ternak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Desa Pranti, beliau menambahkan bahwa setidaknya terdapat 50 KK masyarakat Desa Pranti yang membeli atau menggunakan PAB milik Pak Budi tersebut.

"Nak ketingale ya kurang lebig 45 atau 50 an kayaknya ada. Masalahnya kan gini mbak, kadang ada yang Pak Budi punya dari desa juga punya. Biasanya kan gitu untukantisipasi musim kemarau. Jadi kalau gak jalab airnya bisa pindah ke airnya Pak Budi kan gitu. Jadi ada yang double mbak" (wawancara dengan Sekretaris Desa Pranti Bapak Kamid pada 21 April 2024).

Meskipun masyarakat memiliki pilihan untuk berjuang mendapatkan air bersih melalui penyaluran air dari PAB di Desa Pranti dan PAB milik Pak Budi, kenyataannya tidak semua masyarakat mampu berjuang mendapatkannya. Alasannya yaitu: *Pertama*, terkendala biaya. Tidak semua masyarakat Desa Pranti mampu menjadi pelanggan PAB milik Pak Budi dikarenakan pendapatan dan pengeluaran mereka yang terbatas. Mengingat bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Pranti sebagai petani. *Kedua*, Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pelanggan PAB. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ke wilayah RW 01 dan RW 02, ditemukan fakta bahwa dulunya warga sini mendapatkan akses air bersih dari PAB pak Budi. Namun, dikarenakan adanya konflik politik akses air tersebut diberhentikan oleh pihak pengelola. Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil wawancara berikut ini:

"Warga dulu mendapatkan akses air bersih dari embung Pak Budi di daerah wilayah landoh. Akan tetapi setelah pencalonan Pak Budi kembali kedua gagal, saluran akses air warga diputus dengan alasan ada isu warga

wilayah sini tidak memilih Pak Budi. Padahal embung milik beliau tidak pernah kering. Ada beberapa warga yang masih menyalur di embung Pak Budi secara pribadi dengan cara kulo nuwun ke beliau. Perkiraan disini hanya 2 orang warga yang masih pakai" (Wawancara dengan warga wilayah RW. 02 Bapak Kuntari pada 20 Oktober 2023).

Pernyataan tersebut di tambahkan kembali oleh seseorang warga dari RW 01 yang tidak ingin disebutkan identitasnya sebagai berikut:

"Nggih mbak, dulu sini nyalur air dari Pak Budi tahun 2010 an saya lupa. Jaman biyen masukno banyu awalan cuma bayar Rp. 750.000 sekali bayar karo bayar Rp. 5.000 permeter. Tiyang Bogorame tapi sokongane tiyang mriki. ndekne nyalonke wong kene tapi gak dadu. Terus bar niku pralone dijabuti kabeh. Bar niku setelah beberaoa bulan disalurkan lagi" (Wawancara dengan masyarakat RW 01 apda 26 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi telah ditemukan bahwa untuk memperjuangkan mendapatkan air bersih melalui pembelian air dari PAB milik perseorangan warga Desa Bogorame memerlukan suatu upaya negosiasi atau istilah dalam bahasa jawa kulo nuwun. Menurut keterangan Mbah Bisri salah satu masyarakat di Desa Pranti menyebutkan bahwa PAB milik Pak Budi memiliki pengurus pengelolanya sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa di Desa Pranti juga didirikan penampungan air bersih dari PAB tersebut untuk kemudian dapat disalurkan kembali kepada pelanggan khusus di RW 01.

Meskipun penyaluran akses air bersih dari PAB milik Pak Budi tersebut diperoleh dengan cara membeli, namun setelah peristiwa tersebut sebagian masyarakat melakukan beberapa upaya perjuangan hak air bersih. Perjuangan masyarakat Desa Pranti untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama di musim kemarau dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: Pertama, kulo nuwun atau lobbying. Kegiatan ini dilakukan pasca terjadinya pemutusan air bersih secara sepihak oleh Pengelola Air Bersih milik perseorangan tersbut. Beberapa masyarakat

Desa Pranti melakukan upaya negosiasi dengan cara *kulo nuwun* atau berkunjung ke rumah beliau agar dapat memperoleh hak air bersih yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Menurut keterangan salah satu warga RW 01 yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa di lingkungannya pada saat itu hanya dua orang yang berhasil memperoleh kembali hak air bersih dari PAB tersebut. Kedua, adanya salah satu masyarakat Desa Pranti yang menjadi koordinator atau pengelola dari PAB milik Pak Budi. Berdasarkan hasil keterangan salah seorang warga RW 01 menyebutkan bahwa sekarang pihak pengelola air bersih milik Pak Budi memiliki pengurus yang merupakan salah satu warga Desa Pranti. Menurutnya tugas beliau yaitu membantu pengkoordiniran masyarakat yang menyalur air bersih di PAB milik Desa Pranti.

"Kene iki sik luweh paham Bapak mbak, soale ndekne pengelola kene sek ngurusi. dadi wong luweh paham mbak" (Wawancara dengan Mbak Yati pada 06 Januari 2024)

Kemudian, hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Pranti. Salah satunya yaitu Mbah Bisri menyebutkan bahwa penampungan air bersih yang kemudian akan disalurkan ke rumah pengguna dari PAB milik Pak Budi dibangun diatas tanah pribadi milik beliau. Beliau juga mengatakan bahwa imbalan dari peminjaman tanah tersebut yaitu Mbah Bisri mendapatkan akses air bersih dari PAB milik Pak Budi secara gratis.

"Sik nyalur teng gene pak budi nggih katah, tapi nggih kulo mboten ngerti kinten-kintene. wong kulo cuma didekei ngoten tok. maksude tanahe di enggoni (tidak dibeli). pokoke angger di enggoni ngoten mbak, dari pada ndisik gak ono banyu angel kok. nggih entuk banyu gratis niku, mboten bayar banyu perbulane Ikhlas lahir batin lah wong di saluri kanggo wong akih. Dari pada riyen ngangsume angil mbak, riyen ngangsume teng kali angger dino" (Wawancara dengan Mbah Bisri pada 25 Januari 2024).

Gambar 19. Penampungan Air Bersih PAB Milik Pak Budi



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjuangan masyarakat Desa Pranti untuk mendapatkan air bersih melalui PAB milik perseorangan perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pada membeli PAB milik desa. Beberapa masyarakat juga menjelaskan bahwa alasannya karena letak embung yang jauh sehingga memerlukan pralon yang lebih banyak. Setelah peristiwa gagalnya pencalonan kepala desa yang diusung Pak Budi pada tahun sekitar 2019, menyebabkan adanya ketegangan konflik yang berakibat pemutusan akses air bersih selama beberapa bulan.

Politik kewargaan disini dapat bersifat politik karena dibangun melalui praktik-praktik sosial, ketegangan, dan konflik. Proses pembentukannya banyak dipengaruhi oleh pertarungan kekuasaan antara kelompok dominan dan individu masyarakat sipil dan gerakan rakyat sektoral dan aktivis. Praktik sosial dalam konteks akses air bersih disini yaitu adanya perjuangan masyarakat untuk membeli akses air bersih ke PAB milik perseorangan. Kemudian ditengah jalannya pemenuhan akses air bersih tersebut sempat terjadi ketegangan konflik akibat gagalnya calon kepala desa pranti yang diusung oleh pemilik PAB

perseorangan tersebut sehingga mengakibatkan pemutusan pralon atau akses air bersih ke masyarakat Desa Pranti.

(Dion Achmad Armadi, 2019) Peningkatan terhadap kebutuhan air didorong oleh adanya peningkatan populasi penduduk dan perubahan pola konsumsi terhadap air. Akan tetapi ketersediaan air bersih cenderung menjadi permasalahan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Jumlah populasi manusia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan untuk memenuhi hidup juga meningkat baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan pendukung lainnya yang berkaitan dan bergantung pada Air.

- b. Membeli tangki air bersih atau membeli air dari pedagang air jajakan keliling

Kurangnya ketersediaan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pranti membuat sebagian masyarakat yang mampu secara financial memilih membeli air bersih tangki dari wilayah Kabupaten Rembang. Aktivitas pembelian air bersih tangki dilakukan oleh masyarakat jika air baku di desa telah habis baik air sungai maupun air embung dan jika bantuan air bersih yang diajukan belum mendatangi masyarakat sekitar.

"Kaline nak sat nggih niku ngandelke bantuan tangki, tangkine nak mboyen ngatasi tumbas tengkinan akih kados ngeten niki wonten bak air e nggih tumbas mbak. Makane teng mriki nggih rutin pengajuan bantuan air saking PDAM" (Wawancara dengan Bu Kasmini pada 04 November 2023).

Gambar 20. Ilustrasi Pembelian Tangki Air Bersih



Sumber: Google

Pernyataan tersebut didukung pula dengan warga yang lain sebagai berikut:

"Ndamel bak terus tumbas tengki, tumbas saking derekke" (Wawancara dengan Bu yati pada 26 Janusari 2024).

Hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jika keadaan darurat namun persediaan air bersih telah habis, maka masyarakat menggunakan alternatif untuk memperoleh air bersih melalui pembelian tangki air. Menurut keterangan Mbak Yulita warga rt.01 rw.01 menyebutkan bahwa kisaran harga tangki air sebesar Rp.120.000 ribu sekali dropping. Kemudian, air tersebut akan ditampung ke tandon penampungan air milik pribadi ataupun ke dalam tandon milik desa yang telah disediakan untuk penyaluran air SPAM dan disalurkan ke rumah pribadi atau kelompok yang ikut dalam iuran pembayaran. Penggunaan air hasil dari pembelian tangki air dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan memasak, mandi, mencuci, dan minum ternak (jika memiliki). Sedangkan keperluan minum rata-rata masyarakat memilih konsumsi air galon.

Jika mengacu pada teori politik kewarganegaraan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Desa Pranti. Keadilan sosial yang dimaksud yaitu dimana dimensi hak sebagai warga negara yang merupakan tanggung jawab dari sebuah negara tidak diwujudkan dengan adanya stok dropping air bersih yang cukup bagi masyarakat Desa Pranti. Hal tersebut dapat dilihat bahwa alasan masyarakat membeli tangki air bersih karena tidak adanya air baku dari desa dan stok dropping air yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan artikel dari portal berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berjudul "Dropping Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan" menyebutkan bahwa dropping air bersih menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Jumlah permintaan droping air itu sendiri memiliki tingkat fluktuatif tergantung musim di setiap daerah.

BAB V

DAMPAK PERJUANGAN HAK MENDAPATKAN AIR BERSIH

Setelah menjelaskan kondisi air bersih secara umum di Desa Pranti dan bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Maka kita dapat melihat dari sudut pandang sosial dan politik terkait apa saja dampak atau hasil yang diperoleh masyarakat Desa Pranti setelah melakukan beberapa bentuk perjuangan. Kemudian penulis akan menganalisis menggunakan teori politik kewargaan oleh Kristian Stokke (2018) serta menjelaskan lebih rinci terkait apa saja kendala ataupun kekurangan dari perjuangan masyarakat. Berikut dampak dari perjuangan masyarakat Desa Pranti dalam mendapatkan air bersih:

1. Terpenuhinya kebutuhan air.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia yang digunakan untuk kegiatan paling sederhana yakni keperluan rumah tangga bahkan sampai dengan kebutuhan industri. Peningkatan terhadap kebutuhan air didorong oleh adanya peningkatan populasi penduduk dan perubahan pola konsumsi terhadap air. Akan tetapi ketersediaan air bersih cenderung menjadi permasalahan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Jumlah populasi manusia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan untuk memenuhi hidup juga meningkat baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan pendukung lainnya yang berkaitan dan bergantung pada Air.

Masyarakat Desa Pranti telah melakukan beberapa bentuk perjuangan untuk memperoleh air bersih seperti *ngangsu* atau menimba air, pengelolaan air bersih sederhana, mengajukan permohonan bantuan droping air bersih ke pemerintah kabuten rembang dan CSR, serta membeli air bersih melalui perantara air (water broker). Bentuk-bentuk perjuangan tersebut digunakan sebagai alat perjuangan masyarakat sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi. Permasalahan air bersih yang ada di Desa Pranti yaitu tidak adanya sumber mata air di wilayah Desa Pranti. Menurut keterangan Sekretaris Desa dan ketua PAB Desa Pranti menyebutkan bahwa dari dulu masyarakat sini bergantung pada aliran sungai. Namun, sekarang ini aliran sungai sudah tidak dapat diandalkan lagi oleh masyarakat setempat karena ketika musim kemarau tiba aliran sungai kerap kali surut bahkan mengering.

"Kalau dulu sungai kan masih lestari ya mbak, nyuwun sewu. Bulan 8, 9, 10 kali itu tidak seperti sekarang ini biarpun kecil tapi masih mengalir. Apalagi sekarang ada petani tembakau khususnya di wilayah Sulang. Sungai itu mengalir sepanjang dari Pomahan sampai Kemadu dan Sulang terus mengalir sampai sini. Lah tapi kan kalau persiapan untuk

nanam bakau sungai itu kan sudah di cek atau tembok dadakan seperti karung kan diisi tanah untuk nyambong kalu tersebut. Nah kali itu kan untuk nyirami tembakau. Tapi secara otomatis yang bawah sini kan tetap kering berarti sungai tidak jalan karena diatas sudah di sambong" " (Wawancara dengan Ketua PAB Desa Pranti Bapak Sutardi pada tanggal 26 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kondisi air sungai di Desa Pranti dulunya masih bersih dan lestari. Namun, kini kondisi air sungai tersebut sering kali tidak dapat mempertahankan debit airnya sepanjang musim kemarau. Menurut keterangan Bapak Sutardi salah satu alasan keringnya sumber air sungai disebabkan oleh adanya para petani tembakau disekitaran wilayah Sulang sehingga menyebabkan debit air sungai mengering hampir sepanjang musim kemarau. Pernyataan tersebut didukung juga dengan pernyataan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga Desa Seren yang wilayahnya berdekatan dengan Desa Pranti.

"Pokok setiap petani tembakau itu, apalagi petani sing sungai iku pasti dia lebih dulu nyembong banyu kali iku sik. Yo iku dadi egois mememtingkan kepentingan pribadi. Padahal petani lain juga memerlukan air tersebut, makane aliran sungai jadi terlambat. Iku dadi problen masalah nek desoku, dadi bahan omongan" (Wawancara dengan salah satu warga petani tembakau Mbak Ami pada 20 April 2024).

Wawancara tersebut memiliki arti bahwa petani tembakau pasti membutuhkan air yang lebih banyak selama penanaman tembakau. Seperti kasus yang terjadi di sebelah Desa Pranti yaitu Desa Seren diketahui bahwa petani tembakau yang lahan pertaniannya dekat dengan sungai pasti nyembong atau membuat skat aliran sungai untuk kemudian digunakan petani menyirami tembakau. Peristiwa tersebut dilakukan oleh beberapa oknum petani sehingga membuat menjadi bahan omongan oleh masyarakat setempat.

Kekurangan pemberian air pada tanaman tembakau dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan perkembangannya menjadi abnormal. Kekurangan yang terjadi secara terus menerus selama pertumbuhan juga dapat menyebabkan tanaman tembakau menjadi menderit dan kemudian mati. Tanda-tanda tersebut dapat dilihat dari kondisi tanaman tembakau yang daun-daunnya layu akibat penyerapan air tidak dapat mengimbangi kecepatan penguatan air dari tanaman (Dwidjoseputro, 1984). Kemampuan tanaman tembakau untuk mempertahankan kandungan airnya cukup, pada daun dibagian bawah dapat menentukan kecilnya daun yang menjadi kering (krosok). Tanah tegalan yang relatif kering dalam

pemberian air yang lebih sedikit dapat mendorong pertumbuhan akar yang lebih dalam sehingga mampu menjangkau tanah yang lebih luas (Amron, 1972).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Adi Kurniawan, 2014) memiliki kesimpulan bahwa pemberian air berpengaruh terhadap kualitas tanaman tembakau. Tanaman tembakau yang tumbuh dengan pemberian air yang lebih, rata-rata menghasilkan luas daun, jumlah daun, bobot segar daun dan bobot kering daun yang tinggi dibandingkan dengan tanaman tembakau yang tumbuh kekurangan pemberian air, yakni pada perlakuan P4 yang jumlah pemberian air ditambah sebanyak 25% dari 100% pemberian air normal. Tanaman tembakau dengan luas daun, jumlah, bobot segar daun dan bobot kering daun yang relatif rendah, akibat pemberian air yang kurang dari kebutuhan air normal sebanyak 100%.

Hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pranti untuk mendapatkan air bersih dapat berdampak pada terpenuhinya kebutuhan air. Kebutuhan air tersebut melingkupi memasak, mandi, mencuci, minum, bahkan minum ternak. Bentuk perjuangan masyarakat dilakukan karena Desa Pranti tidak memiliki sumber mata air baku dan hanya mengandalkan air sungai serta embung buatan. Sumber air sungai yang menjadi sumber air baku masyarakat Desa Pranti memiliki kekurangan dimana aliran sungai tidak dapat bertahan mengalir di sepanjang musim kemarau, akibat adanya faktor dari sungai di hulu atau sungai di wilayah lain terjadi penyambongan untuk kegiatan pertanian tanaman tembakau.

Teori politik kewarganegaraan Kristian Stokke (2018) dalam bagian ini ditemukan adanya perjuangan masyarakat yang membuahkan hasil atau dampak. Berdasarkan dimensi kewarganegaraan yang di jelaskan oleh Stokke yaitu keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Dengan melakukan identifikasi terhadap bentuk perjuangan dan faktor penyebab terpenuhinya air bersih, maka diharapkan masyarakat Desa Pranti dapat memperoleh hak dan keadilan sosialnya atas air. Hal tersebut dapat dilakukan adanya upaya perundingan dengan beberapa wilayah desa yang memiliki aliran air sungai yang sama untuk membuat kesepakatan dalam penggunaan air bersih sehingga dapat tetap mengalir sampai ujung aliran sungai. Selanjutnya juga dapat dilakukan upaya pembuatan regulasi atau perjanjian sederhana mengingat bahwa debit aliran dari waduk jika pada musim kemarau berkurang. Sehingga alangkah lebih baik bagi petani tembakau yang lahan pertaniannya dekat dengan sungai dapat mempertimbangkan dampak monopoli air sungai tersebut.

2. Memudahkan akses pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga melalui sistem pengelolaan air bersih sederhana.

Kemudahan akses terhadap air bersih dapat meningkatkan taraf mutu hidup manusia serta jenjang kesejahteraan manusia terutama di negeri berkembang seperti Indonesia (Munandar, 2019). Telah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur air bersih bagi masyarakat. Hal tersebut sangat menentukan karena masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap air bersih. Melalui prioritas pembangunan infrastruktur air bersih, masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan air bersih.

Melalui bentuk perjuangan masyarakat dalam bentuk pengelolaan air bersih sederhana. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku yang ada di lingkungan terdekat. Pengelolaan air bersih sederhana telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pranti yang bersifat swadaya bersama dengan pemerintah Desa Pranti. Pengelolaan air bersih sederhana tersebut diawali dengan memanfaatkan air baku dari sungai yang di filter secara sederhana. Setelah proses pemfilteran tersebut, air akan dialirkan ke tandon di sudut desa yang telah ditentukan untuk kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga.

Kekeringan di Kabupaten Rembang telah mempengaruhi kondisi sosial, lingkungan dan perekonomian di wilayah terdampak kekeringan pada Kabupaten Rembang. Berdasarkan data analisis yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, berikut dampak-dampak yang disebabkan oleh kekeringan yang terjadi di Kabupaten Rembang:

- a) Dampak Sosial

Dampak sosial dari pasca bencana kekeringan di Kabupaten Rembang yaitu terjadi perubahan struktur sosial dan budaya dalam jangka waktu menengah dan panjang. Contohnya yaitu adanya kerentanan konflik masyarakat akibat berebutan dalam mendapatkan distribusi air bersih dimana sebagian dirasakan oleh kelompok rentan seperti wanita hamil, anak-anak, dan orang tua yang mempengaruhi kondisi fisik, mental dan sosial terdampak kekeringan. Kemudian permasalahan sosial lainnya dapat menjadi tolak ukur dampak sosial akibat kekeringan yaitu menurunnya pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Dampak sosial juga dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Pranti, dimana ketika proses droping air bersih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan air atau adanya perebutan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

b) Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan yang dihasilkan dari bencana kekeringan di Kabupaten Rembang yaitu mempengaruhi ketersediaan sumber air bersih baik untuk konsumsi, mck dan pengairan lahan pertanian. Wilayah yang terdampak kekeringan mengalami kekeringan di sumber air baku mulai dari sumber mata air sumur, embung dan bendungan. Kondisi tersebut berakibat pada penurunan kualitas lingkungan permukiman wilayah yang terdampak kekeringan. Dampak kekeringan lainnya yakni kerusakan bangunan embung dan bendungan akibat mengeringnya embung dan bendungan dan ditambah cuaca ekstrem yang lebih panas dari sebelumnya mengingat dampak el nino pada tahun 2023.

c) Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang dihasilkan akibat kekeringan di Kabupaten Rembang yaitu potensi kehilangan pendapatan karena masyarakat yang terdampak utamanya yang memiliki mata pencarian petani mengalami penurunan hasil tani, gagal panen hingga beralihnya lahan petani menjadi tidak produktif selama musim kemarau tahun 2023. Dampak lainnya yaitu terganggunya pekerjaan masyarakat karena harus mengutamakan antri untuk mendapatkan air bersih dengan jadwal kegoatan distribusi yang belum tentu setiap hari ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa pokok yang dapat disimpulkan bahwa bentuk ketimpangan dimensi kewarganegaraan yang terjadi pada perjuangan masyarakat Desa Pranti untuk mendapatkan air bersih terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu ketimpangan hak, ketimpangan politik dan ketimpangan sosial. Ketimpangan hak yang dialami oleh masyarakat Desa Pranti yaitu inisiatif pengelolaan air bersih sederhana dengan pembuatan bilik di pinggir bibir sungai yang dilakukan secara swadaya, menimbulkan adanya hak serta menarik keterlibatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak atas air. Ketimpangan politik yang dialami oleh masyarakat Desa Pranti yakni adanya pemutusan akses air bersih secara sepihak oleh PAB milik Pak Budi yang dikarenakan adanya ketegangan politik. Adapun ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat Desa Pranti yaitu kelangkaan air bersih akibat kurangnya ketersediaan air dan kurangnya bantuan air dari pemerintah, menyebabkan adanya ketimpangan sosial ekonomi. Masyarakat yang perekonomiannya baik akan membeli dua akses PAB (dari pihak desa dan Pak Budi) serta membeli droping tangki air. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki tingkat perekonomian yang baik akan beralih ke ngangsu.

Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Pranti untuk mendapatkan dimensi kewargaannya meliputi empat tahap, yaitu ngangsu atau menimba air, pengelolaan air bersih sederhana, mengajukan proposal bantuan droping air, dan membeli air bersih melalui perantara air (water broker). Tahap pertama yaitu ngangsu atau air merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu sebelum adanya pipanisasi. meskipun sekarang telah modern dengan adanya pengelola air bersih, ngangsu masih digunakan oleh sebagian masyarakat yang tidak mampu untuk membeli droping air bersih. Kemudian dilanjutkan upaya pengelolaan air bersih sederhana. Konsep ini dilakukan oleh swadaya masyarakat yang berawal pembuatan bilik sederhana di bibir sungai kemudian sekarang menjelma menjadi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). Ketiga yaitu pengajuan bantuan droping air bersih ke Pemkab dilakukan ketika kemarau panjang yang menyebabkan air baku di desa telah habis. Terakhir yaitu membeli air melalui perantara air (water broker) seperti membeli droping tangki air untuk pribadi maupun kelompok, membeli galon air minum, atau membeli air kajar keliling.

Dampak yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Pranti dalam perjuangannya memperoleh dimensi kewarganegaraan terbagi menjadi dua

bentuk, yaitu dampak hak dan dampak sosial. Dampak hak yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Pranti yaitu terpenuhinya kebutuhan air untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Sedangkan dampak sosial yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Pranti yaitu adanya pengelolaan air bersih sederhana yang dapat memudahkan akses akan air bersih bagi masyarakat.

Fenomena perjuangan politik kewarganegaraan masyarakat Desa Pranti sejalan dengan teori kewarganegaraan Kristian Stokke (2018), bahwa politik kewarganegaraan sebagai perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi yang substantif dan terlembaga, atau memiliki makna perjuangan untuk keadilan kultural, sosial, yuridis, dan politik. Perihal aktor kepentingan, strategi, dan kapasitas, politik kewarganegaraan selalu kompleks. Secara geografis juga beragam karena kewarganegaraan dipolitisasi dan dilembagakan dalam suatu tempat dan teritori yang beragam, pada skala berlapis dan saling terkait, melalui jejaring spasial lintas tempat, skala, dan teritori.

Perjuangan politik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pranti dilakukan secara formal dan informal. Ward Barendschot (2019) menjelaskan bahwa aturan formal yang tertuang dalam hukum tertulis telah banyak mengalami kesenjangan dengan hukum praktik yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pranti melakukan ngangsu dan membeli air melalui water broker sebagai bentuk perjuangan informal dimana perjuangan yang dilakukan tidak berpaku hanya pada aturan formal.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan akibat dari keterbatasan yang dimiliki peneliti. Kelemahan peneliti ini dapat menjadi pembelajaran untuk peneliti yang akan datang agar dapat menyempurnakan penelitiannya. Adapun kelemahan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya informan dari pengelola air bersih milik Pak Budi warga Desa Bogorame. Dimana fenomena perjuangan masyarakat Desa Pranti berkaitan cukup erat dengan pihak PAB tersebut.

B. Saran

1. Bagi kelompok pengelola SPAM "Tirta Lestari", hendaknya dapat menginisiasi adanya tambahan instalasi pengelolaan air sederhana (IPAS) agar air yang dihasilkan dari proses pemfilteran dapat memiliki kualitas air lebih jernih.
2. Bagi pemerintah Desa Pranti, hendaknya dapat melakukan prediksi penanganan bencana kekeringan ketika musim kemarau melalui: (1) Penghitungan mitigasi bencana kekurangan air bersih yang lebih akurat. (2) Melakukan negosiasi atau rundingan dengan beberapa desa yang memiliki sungai sejajar dengan sungai di Desa Pranti terkait adanya penyembongan sungai oleh petani tembakau. Sehingga dapat dibuat

sebuah perjanjian atau regulasi sederhana agar saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

3. Bagi masyarakat Desa Pranti, diharapkan senantiasa gotong-royong dengan para warga lainnya untuk saling berjuang mendapatkan air bersih.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan pengembangan penelitian ini, hendaknya dapat berfokus pada pokok pembahasan yang belum dibahas dalam penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan inspirasi untuk penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab, S. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alpadeta.
- Amalia Nurdin, Y. A. (2022). Analisis Potensi Sumber Mata Air Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Majene. *Jurnal Teknologi Terpadu*, Vol 10, No 2.
- Aslati, S. S. (2018). Pemberdayaan Remaja Berbasis Masjid (Studi Terhadap Remaja Masjid di Labuh Baru Barat). *Jurnal Masyarakat Madani*, Volume 3, Nomor 2.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. (p. h. 147). Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Ha Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenanda Media.
- Azyati Ridha Alfian, S. M. (2023). *Krisis Air Bersih di Indonesia Fenomena, Dampak & Solusi*. Agam Sumatera Barat: CV. Suluah Kato Khatulistiwa.
- Banu Adhibaswara, I. P. (2011). Pengelolaan Air Secara Ekonomis dengan Penggunaan Tanggul Batang Kelapa serta Penjernihan Alami. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Universitas Gunadarma*, Vol 4.
- Baru, R. S. (2019, Mei 8). Siwalan Jadi Komoditi Andalan Daerah Rembang. *Suara Baru.id*.
- Bayu Adi Kurniawan, S. F. (2014). Pengaruh Jumlah Pemberian Air Terhadap Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabaccum L.*). *Jurnal Produksi Tanaman*, Volume 2, Nomor 1 hlm. 59-64.
- bisch, R. dan Borchardt, D. 2009. *Integrated Water Resouces Management (IWRM): From*
- Brubaker, R. (1992). *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Cambridge: Harvard University Press.
- Chaerunnissa, C. (2014). Partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sinatasi berbasis berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di kabupaten Brebes (Studi kasus Desa Legok dan desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawang). *Politika*.
- Chamid Sutikno, S. S. (2020). Formulasi Kebijakan Pembangunan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Public policy and managment inquiry*, 211-227.
- Clark karno Pesik, S. P. (2019). *Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Air Bersih untuk Masyarakat Desa Karalung 1 Kecamatan Siau timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Eksekutif.

- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Thaib, P. D. (2008). *Teori dan Hukum Tata Negara*. Rajawali PT Rajagrafindo Persada.
- Davos (2024, Januari 17). Indonesia Paparkan Krisis Air, Ekonomi Biru, Hingga KSST di World Economic Forum. Diakses pada 26 Februari 2024 dari: <https://www.bappenas.go.id/berita/indonesia-paparkan-krisis-air-ekonomi-biru-hingga-ksst-di-world-economic-forum-4lQt6>
- Delanty, G. (2000). *Ciizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics*. Buckingham: Open University Press.
- Dewa, N. B. (2020). Perjuangan Kaum Disabilitas dalam Mendapatkan Identitas Kewargaan. *Civic-Culture: jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 4 (2), 1-14.
- Diana Sari, N. Y. (2021). Pemantauan dan Analisis Tingkat Pencemaran Kualitas Air Sungai di Kabupaten Tebo. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*, hal. 15-23.
- Dion Achmad Armadi, A. H. (2019). Analisis Pengelolaan Air Bersih Berkelanjutan di Kota Bogor (Studi Kasus: PDAM Tirta Pakuan). *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, hal. 1-12.
- Eric Hiariej dan Kristian Stokke. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fahdian Rahmandani, S. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI DASAR NILAI INTRINSIK WARGA. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*.
- Filipus, J. C. (2023). Spiritualitas politik Sebagai Dasar Perjuangan Masyarakat Adat Samin Melawan Ekonomi Kapitalisme Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo Pati. *Sagacity: journal of technology and Christian Aducation*.
- Haris Adi Nugroho, Madvan Sinatriya. (2022). Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. *Tugas Akhir Unissula* .
- Harjanti, W. (n.d.). Hak atas air dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia.
- Husni Mubarak, M. (2021, Maret Senin). Advokasi Inklusi Sosial: Praktik Advokasi Penghayat Merapu di Sumba, Nusa Tenggara Timur. *Seri Monografi Inklusi Sosial dan Advokasi Kewargaan #2*, pp. 106-108.
- Indriantoro dan Supomo. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Purhantara.
- Isnur, P. (2023, Juni). Benarkah Indonesia Terancam Krisis Air Bersih? *Indonesia baik.id*.
- Janoski, T. & B. Gran. (2002). *Political Citizenship: Foundations of Rights*. Dalam E.F. Isin dan B.S Turner (ed). *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage.

- Joppke, C. (2008). Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity. In P. N. F. Isin, *Citizenship Between Past and Future* (pp. 36-47). London: Routledge.
- Kasim, H. (2015). Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air. *Jurnal Konstitusi MKRI*, Volume 12 Nomor 2.
- Kornita, S. E. (2020). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap air Bersih di Kabupatrn Bengkulu. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, Volume 11, nomor 2.
- Lolawang, P. (2022). Peran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu politik*, 11 (1), 118-129.
- Ludovikus Bomans Wadu, A. F. (2020). Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Bentuk keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Moehar. (2002:133). Data Sekunder Merupakan Data Yang Telah Tersedia Dalam Berbagai Bentuk. Biasanya Tersedia Pada Kantor-Kantor Pemerintah, Biro Jasa Data.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari. (2005). Hak Sipil dan Politik. *Demokrasi*, Vol. IV No. 1.
- Munandar, I. A. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan Sudi Kasus di Indonesia*. Bypass.
- Nazarudin, d. U. (2022). Distribusi air bersih perusahaan daerah air minum pancuran telago menuju peningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Politik dan Kewarganegaraan*, 183-193.
- Nurvenayanti, I. (2016). Teori-teori Kewarganegaraan Kontemporer. *jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 2.
- Purwanto, E. w. (2020). Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume IV No.2.
- R., D. (2002). *Republican Ciizenship*. 145-157.
- Ramdhaniaty, N. (2018). Perempuan adat non elit, eksklusif berlapis, dan perjuangan hak kewarganegaraan atas hutan adat studi kasus di masyarakat adat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten. *Universitas Indonesia Library*.
- Research to Implementation. www.wasserressourcen-management.de.
- Redaksi Suara Baru (2019, Mei 8). Siwalan jadi Komoditi Andalan Daerah Rembang, diakses pada 04 April 2024 dari: <https://suarabaru.id/2019/05/08/siwalan-jadi-komodite-andalan-daerah-rembang>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 94.

- Rokhim, A. (2023, 12 April Rabu). 74 Ribu Warga di Rembang Berpotensi Kesulitan Air Bersih, ini Penyebabnya. Jawa Pos Radar Kudus.
- Rosa Gusti putri (2023, Agustus 23). Pentingnya Akses Air Bersih Sebagai Bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [Halaman web]. Diakses pada Februari 20, 2023 dari: <https://kumparan.com/rosagustiputri56/pentingnya-akses-air-bersih-sebagai-bagian-dari-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-212Saysbihb>
- Saleh, N. M. (2016). Akses Air Bersih. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 9 no. 2 Agustus.
- Sapriya, A. A. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alpadeta.
- Selatan, S. R. (2021). Sektor SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Bandung: Tirta Jabar.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sunoto, I. (2017). Mengukur Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna dengan Pendekatan Metode Fuzzy Inference System Mamdani. Jurnal Simetris, Vol. 8, No. 2.
- Tarigan, S. D. (2008). Efektivitas Embung untuk Irigasi Tanaman Hortikultura di Cikakak Sukabumi. Jurnal Tanah dan Lingkungan, 1-6.
- Tessa. (2023, Oktober 24). Pengertian dan Jenis Sumber Mata Air, Pahami dengan Baik.
- Vera002. (2019, juli 04). BMKG: Sejumlah Wilayah Indonesia Berpotensi Kekeringan. Berita Pemerintahan.
- Wattimena, J. A. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. Balobe Law Journal, h. 1-16.
- Yogafanny, E. (2015). Pengaruh Aktifitas Warga di Sempadan Sungai Terhadap Kualitas Air Sungai Winongo. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Hal. 41-50.

LAMPIRAN



Lampiran 1: Wawancara dengan Sekretaris Desa Pranti Bapak Kamid dan Ketua PAB Bapak Sutrisno



Lampiran 2: Wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Rembang Bapak Puji Widodo



Lampiran 3: Observasi dan Wawancara dengan Ibu Sumi'ah

No. 151/2006/JHL/AMKESDA-REMBANG/01
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 Jl. Raden Saleh No. 34 Rembang Telp. (0853) 2851 2870 | Email : labkesda@rembang.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

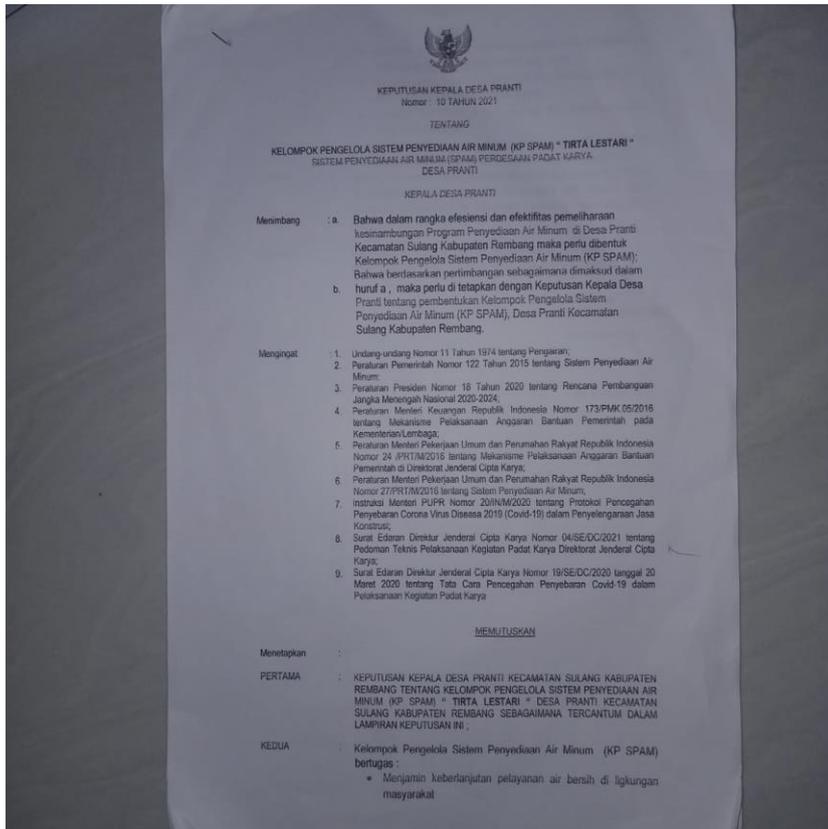
No Agenda : 0118 / VII / Bacc / 2021
 Jenis Sampel : Air Bersih
 Buku Mutu : Per.Men.Kes RI No. 416 / Menkes / Per / IX / 1990
 (Syarat Bakteriologi Air Bersih : MPN Gol Coli = $\leq 50 / 100 \text{ ml}$)
 Tgl Pengambilan : 10 Agustus 2021
 Jam Pengambilan : 11.30 WIB
 Tgl Pemeriksaan : 12 Agustus 2021
 Jam Pemeriksaan : 08.40 WIB
 Petugas Sampelng : Santiana Puskesmas Sulang
 Hasil Pemeriksaan :

| No Laboratorium | Lokasi | Tes Perkiraan | | | Tes Pengesahan | | | MPN per 100 ml Gol Coli | Kesimpulan |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|--------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | Gol Coli LB 37°C | | | Gol Coli BGLB 37°C | | | | |
| 0118/AB/Bacc/AB/2021 | Sungai Di Pranti Di Pranti Kac Sulang | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3 | 3 | 3 | >2400 | Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi Air Bersih |

Mengarahkan
 Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Rembang
 Santiana SPM
 NIP. 19631208 198603 1 012

Rembang, 10 Agustus 2021
 Pemeriksa Laboratorium
 Evi Astika Amd AK
 NIP. 19780807 201001 2 003

Lampiran 4: Dokumentasi hasil pemeriksaan laboratorium air sungai



Lampiran 4: Dokumen SK Kepala Desa Pranti tentang KP SPAM

Langka yang dikelola luar BPBD Rembang dengan rincian sebagai berikut.

| No. | SUMBER DANA | TANGKI | LITER | STATUS |
|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 1. | APBD Rembang | 320 | 1.600.000 | 11 Agustus - 30 November |
| 2. | PLTU | 55 | 275.000 | 31 Agustus - 6 September |
| 3. | SEMEN GRESIK | 205 | 1.025.000 | 7 September - 2 November |
| 4. | BRI KC REMBANG | 92 | 460.000 | 20 September - 4 Desember |
| 5. | BPBD PROV JATENG | 30 | 150.000 | 26 - 29 September |
| 6. | ALFARIA | 12 | 60.000 | 29 September - 3 Oktober |
| 7. | UNIV TERBUKA | 12 | 60.000 | 28 September - 25 Oktober |
| 8. | ALUMNI SMANSA | 40 | 200.000 | 30 September - 5 Oktober |
| 9. | WASKITA | 7 | 35.000 | 2 September |
| 10. | MDMC | 2 | 10.000 | 13 September |
| 11. | PGRI JATENQ | 53 | 265.000 | 25 September - 10 Oktober |
| 12. | KALASELA | 8 | 40.000 | 25 September - 4 November |
| 13. | IAl | 6 | 30.000 | 22 September |
| 14. | IGCR | 24 | 120.000 | 10 - 12 Oktober |
| 15. | FMI PROV | 125 | 625.000 | 11 - 26 Oktober |
| 16. | WAQAF SALMAN | 62 | 310.000 | 18 Oktober - 1 Desember |
| 17. | PT. PLN | 50 | 250.000 | 23 Oktober - 1 November |
| 18. | MAJLIS AL ISTIQOMA H | 18 | 90.000 | 25 - 30 Oktober |
| 19. | PERHIPTA NI | 16 | 80.000 | 26 Oktober - 2 November |
| 20. | KAGAMA | 26 | 130.000 | 3 - 9 November |
| 21. | PANTELKI | 10 | 50.000 | 5 November |
| 22. | KWARCAB | 25 | 125.000 | 9 - 27 November |
| 23. | BAZNAS PROV | 85 | 425.000 | 18 November - 4 Desember |
| 24. | J/MAAT | 4 | 20.000 | 19 November |
| TOTAL | | 1.287 | 6.435.000 | |

Tabel 3. Rekap distribusi air bersih APBD dan CSR melalui BPBD Rembang

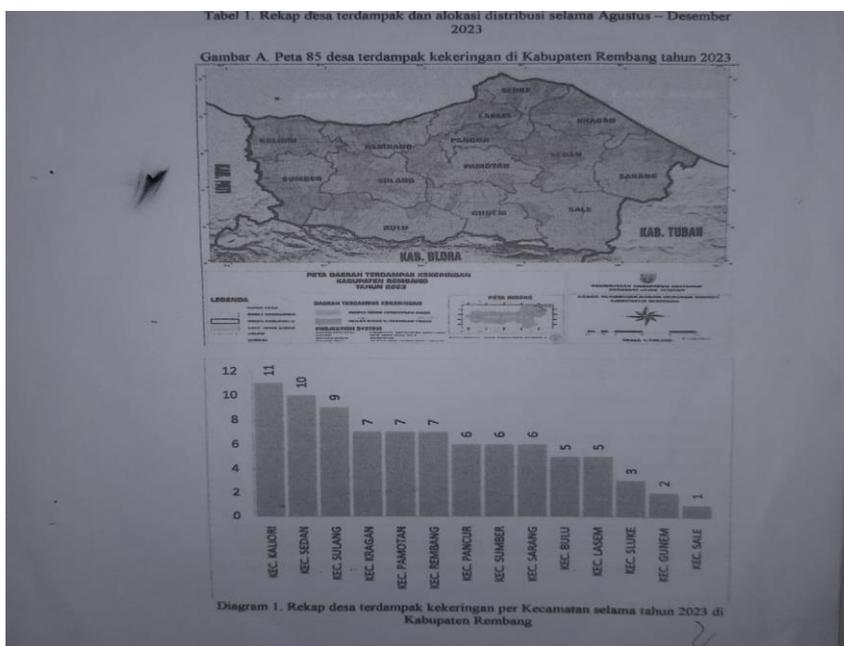
Lampiran 5: Rekap distribusi air APBD dan CSR melalui BPBD

| No. | SUMBER DANA | TANGKI | LITER | STATUS |
|--------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------------|
| 1. | KPH KEBONHA RJO | 6,5 | 32.400 | 13 September |
| 2. | PMPR | 2 | 10.000 | 15 September |
| 3. | SADANA | 4 | 20.000 | 14 September – 9 Oktober |
| 4. | BBWS PEMALI JUANA | 31,5 | 157.000 | 16 Agustus – 18 Oktober |
| 5. | KORAMIL | 35 | 174.000 | 13 – 26 September |
| 6. | BAZNAS REMBANG | 117 | 585.000 | 7 September – 26 Oktober |
| 7. | PMI REMBANG | 216 | 1.080.000 | 15 September – 4 Desember |
| 8. | KAPERWIL | 2 | 10.000 | 7 Oktober |
| 9. | POLLOS HOTEL | 4 | 20.000 | 13 - 20 Oktober |
| 10. | KEMENAG | 100 | 500.000 | 13 – 20 Oktober |
| TOTAL | | 518 | 2.588.400 | |

Tabel 3. Rekap distribusi air bersih CSR lain-lain (luar BPBD Rembang)

Selain menerima bantuan air bersih dari CSR, Ormas, Lembaga dan lain-lain, BPBD Kabupaten Rembang juga menerima bantuan toren atau tempat penyimpanan air dengan volume 1.050 liter

Lampiran 5: Rekap distribusi air APBD dan CSR melalui BPBD



Lampiran 6: Wilayah dan rekap desa terdampak kekeringan di Kabupaten Rembang selama tahun 2023


PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Alamat : Jalan Pemuda Km. 03 Rembang, Telp. (0295) 6998232
 Kode Pos 59218, Email : bpb@rembangkab.go.id
 Website : www.bpbd.rembangkab.go.id

DATA KEKERINGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 - 2023

1. Data Terdampak Kekeringan Tahun 2020
67 Desa 14 Kecamatan

| No. | Desa | Terdampak | |
|-----|----------------|-----------|-------------|
| | | Kec. | Jawa |
| 1. | Banggi | Kahori | 518 1.722 |
| 2. | Karangsekar | Kahori | 481 1.521 |
| 3. | Dresi Kulom | Kahori | 758 2.425 |
| 4. | Dresi Kulom | Kahori | 427 1.236 |
| 5. | Sidomulyo | Kahori | 542 1.665 |
| 6. | Bahadan | Kahori | 540 1.741 |
| 7. | Prani | Sulang | 306 934 |
| 8. | Pedak | Sulang | 700 2.048 |
| 9. | Landah | Sulang | 734 2.629 |
| 10. | Kaliombo | Sulang | 1.450 4.253 |
| 11. | Bogorame | Sulang | 364 1.134 |
| 12. | Seren | Sulang | 990 2.969 |
| 13. | Karangharjo | Sulang | 247 743 |
| 14. | Sendangastri | Lasem | 173 487 |
| 15. | Sendangcoyo | Lasem | 1.230 1.521 |
| 16. | Selopuro | Lasem | 692 2.198 |
| 17. | Tasiksono | Lasem | 234 765 |
| 18. | Binsangan | Lasem | 753 2.204 |
| 19. | Ngemplak | Lasem | 211 682 |
| 20. | Dusun | Lasem | 318 973 |
| 21. | Sriombo | Lasem | 594 1.851 |
| 22. | Giowak | Lasem | 153 469 |
| 23. | Bonang | Lasem | 450 1.800 |
| 24. | Karangturi | Lasem | 250 708 |
| 25. | Sumbergirang | Lasem | 518 1.483 |
| 26. | Woro | Kragan | 1.075 2.459 |
| 27. | Sendangwaru | Kragan | 809 2.078 |
| 28. | Ketangi | Panotan | 784 2.432 |
| 29. | Sendangang | Panotan | 909 2.840 |
| 30. | Kepohagung | Panotan | 148 516 |
| 31. | Sumberarjo | Panotan | 123 512 |
| 32. | Segoroomulyo | Panotan | 357 1.039 |
| 33. | Ngotet | Rembang | 1.085 3.348 |
| 34. | Turusgede | Rembang | 202 764 |
| 35. | Trinanggal | Rembang | 593 1.780 |
| 36. | Kedangrejo | Rembang | 766 2.293 |
| 37. | Leteh | Rembang | 242 696 |
| 38. | Kabangan Kidul | Rembang | |
| 39. | Gegunung Wetan | Rembang | |
| 40. | Sidowayah | Rembang | |
| 41. | Pawon | Rembang | |

Lampiran 7: Data kekeringan di kabupaten Rembang tahun 2020-2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Umi Kholifah
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 22 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Jembulwunut Rt. 02 Rw. 02
Kec. Gunung Wungkal,
Kab Pati, Jawa Tengah
E-mail : umikholifah2222@gmail.com
No HP : 085893249186



B. Riwayat Pendidikan

1. MI Minsya'ul Huda (2007 – 2013)
2. MTs. Sunan Muria Gunungwungkal (2013 – 2016)
3. SMA Negeri 1 Sulang (2016 – 2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2020 – sekarang)

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota Divisi PSDM HMJ Ilmu Politik 2021
2. Sekretaris II UKM F-Entrepreneurship 2021
3. Kepala Divisi Kewirausahaan Kamaresa tahun 2021-2022
4. Sekretaris 1 HMJ Ilmu Politik 2022
5. Sekretaris 1 DEMA FISIP 2023
6. Wakil Ketua Genbi Korkom Semarang Tahun 2023-2024

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 April 2024



Umi Kholifah
NIM. 2006016099